



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka selama tahun anggaran 2025.

Penyusunan laporan ini didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan penyusunan LAKIP ini untuk memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, realisasi indikator kinerja, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2025 dengan target kinerja sebagaimana yang telah direncanakan.

Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka, Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka, Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa capaian kinerja yang telah diraih tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berharap, melalui laporan ini, transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dapat terus terjaga dan meningkat di masa yang akan datang sehingga semakin bermanfaat bagi perkembangan dan pembangunan daerah di Kabupaten Sikka.

Maumere, 20 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

Johanes Berkhmans C. Putu Botha, ST

Pembina Utama Muda
NIP. 19741115 200012 1 005

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 merupakan pemenuhan kewajiban dari mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahunan atas pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka tahun 2024 – 2026 dan tahun 2025-2029 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyajian akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang tertuang dalam LAKIP Tahun 2025 ini, menitikberatkan pada pencapaian kinerja melalui tujuan dan sasaran sesuai Renstra Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana telah ditetapkan dan tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025. Capaian sasaran kinerja Tahun 2025 dari masing-masing sasaran dapat disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan Sasaran Renstra Tahun 2024-2026

Tabel ii.1
Tujuan, Sasaran, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025
(Renstra Tahun 2024-2026)

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
I	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,70	80,66	112,50
			Indeks Kualitas Air	52,53	77,50	147,53
			Indeks Kualitas Udara	94,51	84,97	89,91
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	68,98	78,13	113,26
			Persentase Penanganan Sampah Perkotaan	81,08	52,68	64,97
		Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	1,45	1,28	88,28
			Indeks Profesionalisme ASN	78,33	72,92	93,09
			Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	0,36	0,32	88,89
		Meningkatnya kualitas kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP	67,92	-	-

Realisasi Kinerja tahun 2025 terdapat 3 sasaran yang terdiri atas 9 indikator kinerja yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun target tahun 2025 ditetapkan sebesar 71,70. Nilai IKLH tahun 2025 sebesar 80,66 dan masuk dalam kategori sedang dengan realisasi capaian sebesar 112,50%.
 1. Indikator Indeks Kualitas Air Tahun 2025 ditetapkan target 52,53 dan realisasi 77,50 atau melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 147,57%.
 2. Indikator Indeks Kualitas Udara Tahun 2025 ditetapkan target 94,51 dan realisasi 84,97 atau tidak mencapai target, capaian kinerja sebesar 89,91%.
 3. Indikator Indeks Kualitas Lahan Tahun 2025 ditetapkan target 68,98 dan realisasi 78,13 atau melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 113,26%.
 4. Indikator Persentase Penanganan Sampah Perkotaan ditetapkan target sebesar 81,08 dan realisasi 52,68 atau tidak mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 64,97%.
- Sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan target 1,45 dan realisasi 1,28 dengan capaian kinerja sebesar 88,28 % dan dirincikan sebagai berikut:
 1. Indikator Indeks Profesionalisme ASN ditetapkan target 78,33 dan realisasi 72,92 atau tidak mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 93,09%.
 2. Indikator Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan target 0,36 dan realisasi 0,32 atau tidak mencapai target dengan capaian kinerja 88,89%.
- Sasaran meningkatnya kualitas kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dengan indikator nilai SAKIP Tahun 2025 belum dapat dilampirkan hal ini dikarenakan pihak Inspektorat Kabupaten Sikka belum melakukan evaluasi. Adapun Nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 78,20. Dengan asumsi bahwa Nilai SAKIP masih sama dengan tahun 2024 maka target untuk 2025 telah tercapai dan bahkan melebihi.

2. Tujuan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Tabel ii.2
Tujuan, Sasaran, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025
(Renstra Tahun 2025-2029)

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,91	80,66	109,13
		Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Daya Dukung Daya Tampung	0,5	0	0
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,50	-	-

Realisasi Kinerja tahun 2025 terdapat 2 sasaran yang terdiri atas 3 indikator kinerja yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yaitu meningkatkan kualitas air, udara, tutupan lahan dan pengelolaan persampahan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun target IKLH yang ditetapkan untuk tahun 2025 yaitu 73,91 dan realisasi 80,66 atau sebesar 109,13%.
- Sasaran strategis Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas dengan indikator kinerja berupa Indeks Daya Dukung Daya Tampung ditetapkan target tahun 2025 sebesar 0,5 dan belum realisasi masih berada pada capaian 0 atau belum mencapai target.
- Sasaran meningkatnya kualitas kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dengan indikator nilai SAKIP Tahun 2025 belum dapat dilampirkan hal ini dikarenakan pihak Inspektorat Kabupaten Sikka belum melakukan evaluasi. Adapun Nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 78,20 dengan capaian 99,61%. Dengan asumsi bahwa Nilai SAKIP masih sama dengan tahun 2024 maka target untuk 2025 belum tercapai dan bahkan melebihi.

Beberapa faktor permasalahan pokok pada tahun 2025 yang perlu menjadi perhatian penting bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

1. Tidak adanya tim teknis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) yang berkompeten untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas pelaku usaha yang berdampak pada pencemaran lingkungan.
2. Kurangnya pemahaman perusahaan/pemrakarsa kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan mengenai fungsi, manfaat dan kewajiban perusahaan dalam mengelola

limbah hasil pengolahan agar tidak mencemari lingkungan.

3. Banyak sejumlah sekolah masih merasa belum siap menjadi sekolah berwawasan lingkungan karena tidak memiliki lahan cukup, belum mengalokasikan anggaran, tidak memiliki SDM cukup, dll
4. Laboratorium lingkungan tidak dapat beroperasi.
5. Belum semua kecamatan mendapatkan pelayanan persampahan.
6. Rendahnya angka yang menyampaikan laporan bagi orang perseorangan/badan usaha yang memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3
7. Tingginya volume timbunan sampah sehingga menyebabkan beban pengangkutan dan penanganan sampah memerlukan biaya yang besar.
8. Sarana dan Prasarana penanganan sampah kurang memadai
9. Pungutan retribusi dilakukan oleh pihak kelurahan dan tidak berjalan lancar
10. Adanya sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (Open Dumping) pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Wairii Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
11. Dalam pengelolaan sampah rumah tangga, masyarakat masih belum berkelanjutan dalam memilah sampah dan menerapkan perilaku 3R (reduce, reuse, recycle). Masyarakat masih kurang tertib dalam hal waktu dan tempat pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya.
12. Masih kurangnya komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja sehingga penetapan kinerja yang telah direncanakan belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di tahun 2025 maka Dinas Komunikasi dan Informatika mengupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam pengelolaan persampahan yang melibatkan masyarakat, sekolah dan pelaku/pegiat pengelolaan sampah dengan lagu dan konten-konten di media sosial Dinas Lingkungan Hidup
2. Berkoordinasi dan mendampingi langsung para Petugas Penagih Retribusi pihak kelurahan
3. Melakukan persiapan penghentian aktifitas pembuangan sistem terbuka (Open Dumping) di TPA Wairii, menyusun Dokumen Rencana Penghentian dan Pelaksanaan Penutupan Sistem Pembuangan Terbuka, Memasang portal pada pintu masuk TPA, melakukan Penataan Zona 1 dan Zona 2 TPA, Menyusun Peta Jalan (Roadmap) Pengelolaan Sampah.

4. Program pembatasan sampah plastik dengan Surat Edaran Bupati Sikka Nomor Disling 660.2/180.a/VI/2025 tentang Pengurangan Sampah Plastik.
5. Mencanangkan Program Jaga Bersama Nian Tanah dengan Kegiatan Jumat Giat Berantas Sampah yang dilaksanakan setiap hari jumat di seluruh wilayah Kota Maumere.
6. Melakukan pengujian kualitas air dan udara secara berkala pada TPA Wairii.
7. Merencanakan pembangunan dan revitalisasi TPST dan TPS3R.
8. Menambah ritasi pengangkutan sampah untuk menangani timbulan sampah
9. Pemanggilan kembali para PPPK optimalisasi untuk kembali bertugas melalui Surat Bupati Sikka Nomor: BKDPSDM.800/871/2025 tanggal 17 November 2025

Terhadap langkah-langkah tersebut direncanakan melalui Pengembangan Program dan Kegiatan Tahun selanjutnya serta mengembangkan jejaringan melalui kemitraan dengan berbagai pihak yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup.

Anggaran pelaksanaan kegiatan tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka cukup optimal dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.8.179.514.105,80** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp.7.891.930.005,80** dan Belanja Modal sebesar **Rp.287.584.100,00**. Pada akhir Tahun Anggaran 2025, total realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka adalah sebesar **Rp.7.670.795.920,00** atau sebesar **93,78%** dengan capaian kinerja sebesar **95,82%**.

Semoga LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan pada masa yang akan datang.

Maumere, 20 Januari 2025
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

Johanes B. C. Putu Botha, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19741115 200012 1 005

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi.....	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi.....	3
1.3 Struktur Organisasi.....	5
1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	10
1.5 Sistematika Penyajian.....	14
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	16
2.1 Dokumen Perencanaan Tahun 2024 – 2026.....	16
2.2 Dokumen Perencanaan Tahun 2025 – 2029.....	31
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	46
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	46
3.2 Realisasi Anggaran.....	65
Bab IV Penutup.....	113
4.1 Kesimpulan.....	113
4.2 Saran	114
Lampiran	

Daftar Tabel

No.	Tabel	Judul Tabel	Hal.
1.	Tabel 1.1	Status Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Berdasarkan Jenis Kelamin	7
2.	Tabel 1.2	Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	8
3.	Tabel 1.3	Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Berdasarkan Pangkat dan Golongan	8
4.	Tabel 1.4	Data Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Berdasarkan Pejabat Struktural per-31 Desember 2025	9
5.	Tabel 1.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2025	9
6.	Tabel 1.6	Program dan Kegiatan Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025	13
7.	Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026	22
8.	Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahun 2025	25
8.	Tabel 2.3	Keselarasan IKU Tahun 2025 pada Renstra PD dengan Keputusan Kepala PD tentang IKU PD Tahun 2024-2026, RKT Perubahan PD Tahun 2025 dan PK Perubahan PD Tahun 2025	31
9.	Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029	35
10.	Tabel 2.5	Target Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029	38
11.	Tabel 2.6	Target Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029	39
12.	Tabel 2.7	Keselarasan IKU Tahun 2025 pada Renstra PD dengan Keputusan Kepala PD tentang IKU PD Tahun 2025-2029, RKT Perubahan PD Tahun 2025 dan PK Perubahan PD Tahun 2025	45
13.	Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025	47
14.	Tabel 3.2	Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023	49

15.	Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026	51
16.	Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional	53
17.	Tabel 3.5	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2025	55
18.	Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025	58
19.	Tabel 3.7	Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan Tahun 2024	59
20.	Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029	61
21.	Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi	62
22.	Tabel 3.10	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2025	63
23.	Tabel 3.11	Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025	66
24.	Tabel 3.12	Pengujian Kualitas Air dengan 8 Parameter	72
25.	Tabel 3.13	Perhitungan Indeks Kualitas Air	73
26.	Tabel 3.14	Pengujian Kualitas Udara dengan 3 Parameter	73
27.	Tabel 3.15	Perhitungan Indeks Kualitas Udara	74
28.	Tabel 3.11	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Dilakukan Pengawasan	56
29.	Tabel 3.12	Data Volume Sampah dan Jumlah Pengangkutan Sampah Tahun 2025	65
30.	Tabel 3.13	Data Jumlah dan Jenis Sampah yang Dipilah dari sektor Informal	110
31.	Tabel 3.14	Data Volume Sampah dan Jumlah Pengangkutan Sampah Tahun 2025	112

Daftar Gambar

No.	Gambar	Judul Gambar	Hal.
1.	Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	6
2.	Gambar 1.2	Rincian Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	6
3.	Gambar 3.1	Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2025	97
4.	Gambar 3.2	Komposisi Sampah di Kabupaten Sikka Berdasarkan Jenisnya	98
5.	Gambar 3.3	Sumber Sampah di Kabupaten Sikka Berdasarkan Jenisnya	100
6.	Gambar 3.4	Peta Rute Pelayanan Persampahan Pada Lima Kecamatan yang Terlayani	102
7.	Gambar 3.5	Peta Rute Pengangkutan sampah Dum Truck (4 Unit) dan Tiktik/Lokasi Tempat Penampungan Sampah/ TPS Permanen (35 Unit) beserta titik kritis	103
8.	Gambar 3.6	Rute Pengangkutan sampah Dump Truck (4 Unit)	103
9.	Gambar 3.7	Tiktik/Lokasi Tempat Penampungan Sampah/ TPS Permanen (35 Unit) dan Beserta Titik Kritis	106
10.	Gambar 3.8	Peta Rute pengangkutan sampah Truck Arm Roll (2 Unit) dan 37 titik penempatan Kontainer beserta titik kritis	107
11.	Gambar 3.9	Lokasi 37 titik penempatan Kontainer	107
12.	Gambar 3.10	Peta Rute pengangkutan sampah motor roda tiga (4 Unit) Wilayah Waioti, BK3D, Lorong Karya Murni, Lorong Garuda, Beru & Perumnas	108
13.	Gambar 3.11	Peta Rute Penyapu Jalan	109

Daftar Lampiran

No	Jenis Lampiran
1.	Pohon Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2024 – 2026 dan Renstra Tahun 2025 – 2029
2.	Cascading Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2024 – 2026 dan Renstra Tahun 2025 – 2029
3.	Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2024 – 2026 dan Renstra Tahun 2025 – 2029
4.	Monitoring Realisasi Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2024 – 2026 dan Renstra Tahun 2025 – 2029
5.	Penghargaan-penghargaan yang diterima Dinas Lingkungan Hidup dalam Tahun 2025
6.	LKPJ Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025
7.	Evaluasi Renja Triwulan IV Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025
8.	Data Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) - Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025
9.	Data Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025
10.	Data Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025
11.	Inventarisasi Dokumen RPPLH SPPL, UKL/UPL, DPLH dan Kajian Lingkungan Tahun 2025
12.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025
13.	SK Bupati Sikka Nomor 35 / HK / 2025 Tentang Penetapan RTH dan Taman Kota Sebagai Ruang Publik
14.	Usaha dan/atau Kegiatan Dilakukan Pemeriksaan Tahun 2025



BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 diharapkan dapat :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerjanya.
- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

1.1 Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup yaitu membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.

2. Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. Penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. Penyusunan perencanaan di bidang lingkungan hidup yang meliputi Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- c. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kebijakan rencana program daerah;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- f. Pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah;
- g. Pengelolaan keanekaragaman hayati dalam wilayah daerah;
- h. Perumusan kebijakan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- i. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- j. Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di daerah;
- k. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di daerah;
- l. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah;
- m. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah;
- n. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah;
- o. Pengelolaan sampah;



- p. Rekomendasi penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- q. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan pihak swasta;
- r. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas;
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

3. Tata Kerja

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 tahun 2021, Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu “Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya”

Selanjutnya dalam pasal 16 menjelaskan :

- a. Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kepala dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- e. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka sesuai tugas pokok dan fungsi mengemban dan berkontribusi pada pencapaian dua misi pembangunan Kabupaten Sikka.



Hakikatnya pembangunan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian dan berkelanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta berdasarkan tata ruang dengan kondisi yang mantap.

Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan baik perorangan maupun badan hukum yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu dilakukan agar terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif bagi masyarakat Kabupaten Sikka untuk melaksanakan pembangunan.

Setiap Perangkat Daerah memiliki permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dengan tetap berupaya menjaga kelestarian dan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Berikut beberapa masalah pokok yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

- 1) Masih Rendahnya Layanan Persampahan, disebabkan oleh beberapa masalah berikut:
 - Rendahnya pengelolaan sampah
 - Kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan
 - Belum tersedianya peraturan pemerintah daerah yang mengatur tentang penanganan limbah B3
- 2) Lemahnya Perencanaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup, disebabkan oleh beberapa masalah berikut:
 - Belum adanya dokumen RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan dokumen lingkungan lainnya
 - Belum maksimalnya upaya konservasi dan Pengelolaan RTH
- 3) Masih Adanya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan , disebabkan oleh beberapa masalah berikut:
 - Belum adanya dokumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup
 - Belum maksimalnya upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan
 - Kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan
- 4) Rendahnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH), disebabkan oleh beberapa masalah berikut:
 - Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang



telah memiliki ijin lingkungan maupun terhadap yang belum memiliki ijin lingkungan

- Belum maksimalnya upaya penegakan hukum terhadap PPPLH
- Belum adanya penyusunan kebijakan keberadaan MHA terkait PPPLH
- Rendahnya peran masyarakat terhadap PPPLH

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, jangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam 3 (tiga) tahun mendatang. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Penentuan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka didasarkan pada beberapa aspek yaitu permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup, gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dan kesesuaian dengan isu strategis Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026. Adapun isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yaitu:

“Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup”

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, dapat dilihat pada gambar berikut:

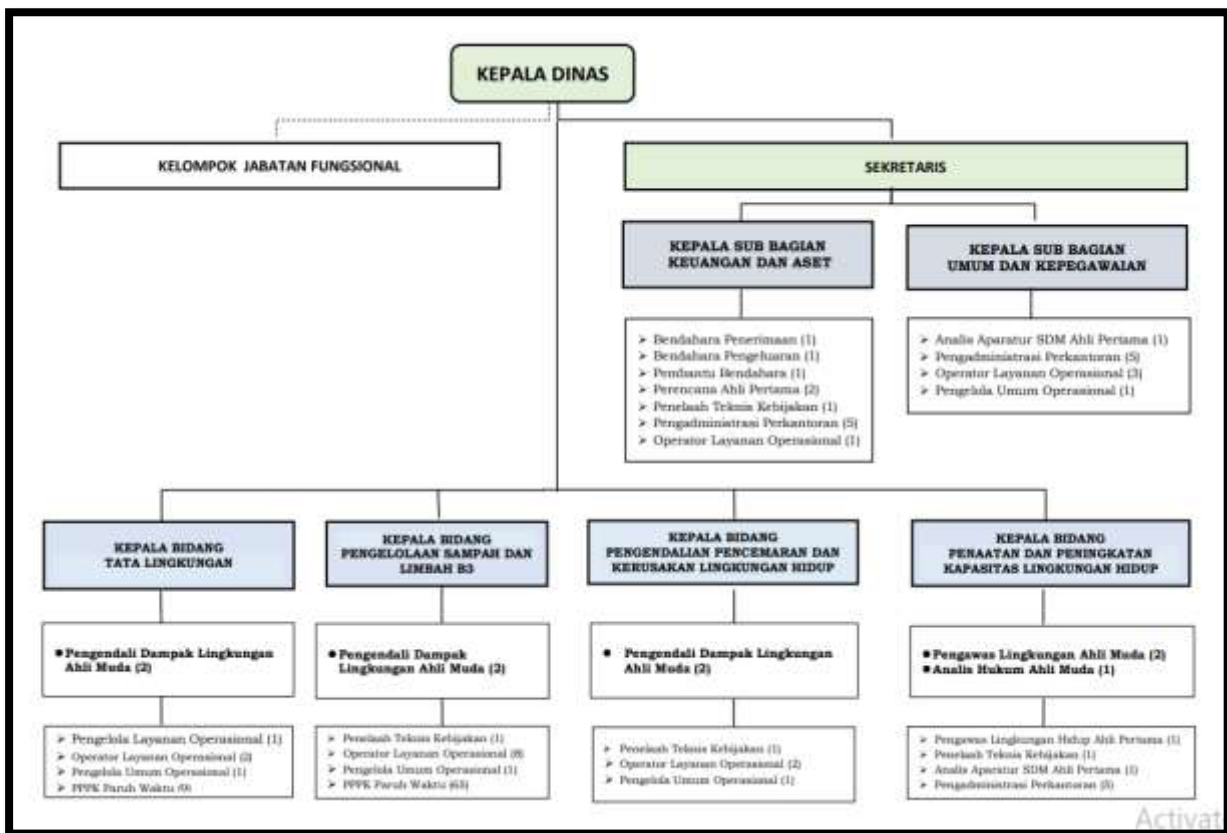


Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka



Sumber : Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021

Gambar 1.2
Rincian Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka



Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025



1. Sumber Daya Manusia

Penggunaan sumber daya yang dilibatkan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan tahun 2025 terdiri dari sumber daya manusia lingkungan hidup dan sumber daya manusia yang melekat dengan tugas pokok dan fungsi yaitu sekretariat, bidang-bidang teknis dan seksi-seksi sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu) dan Tenaga Kontrak dapat dilihat pada *Lampiran 8-10*.

Perinciannya dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.1
Status Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Aparatur Sipil Negara :			
a.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	19	15	34
b.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	20	7	27
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu)	66	13	79
Total Pegawai		105	35	140

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025

Adapun rincian nama dan jabatan pegawai ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dapat dilihat pada *Lampiran 8-10*.



b. Kualitas Pendidikan

Tabel 1.2
Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana – S2	1
2	Sarjana - S1	22
3	Diploma III	1
4	SMA/SMK/SMEA	4
5	SMP	5
6	SD	1
Jumlah		34

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kabupaten Sikka Tahun 2025

c. Pangkat dan Golongan

Tabel 1.3
Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan / Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	2
3	Pembina	IV/a	4
4	Penata Tingkat I	III/d	9
5	Penata	III/c	1
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	3
7	Penata Muda	III/a	3
8	Pengatur Tingkat I	II/d	1
9	Pengatur	II/c	3
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3
11	Pengatur Muda	II/a	3
12	Juru Tingkat I	I/d	1
Jumlah			34

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kabupaten Sikka Tahun 2025



d. Jumlah Pejabat Struktural

Tabel 1.4
Data Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
Berdasarkan Pejabat Struktural per-31 Desember 2025

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
Pegawai Negeri Sipil		34	22	12
1.	Jabatan Administrasi			
	➤ Administrator	5	5	-
	➤ Pengawas	1	-	1
	➤ Pelaksana	18	13	5
2.	Jabatan Fungsional			
	➤ Pengendalian Dampak Lingkungan	6	3	3
	➤ Pengawas Lingkungan Hidup	2	-	2
	➤ Analis Hukum	1	-	1
3.	Jabatan Pimpinan Tinggi			
	➤ Pimpinan Tinggi Pratama	1	1	-
Jumlah Pegawai Negeri Sipil		34	22	12
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		0	0	0
JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA		34	22	12

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kabupaten Sikka Tahun 2025

2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana kantor yang pengadaan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel. 1.5
Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2025

No	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Bahan	Satuan	Jumlah	Kondisi
1.	Laptop	Acer	Campuran	Unit	6	Baik
2.	AC 1/2 PK	Changhong	Campuran	Unit	2	Baik
3.	Mesin Potong Rumput	Honda	Campuran	Unit	4	Baik
4.	Motor Roda 3	Viar Karya 200 LNH	Campuran	Unit	2	Baik
5.	Mesin Sensor / Chain Saw / Gergaji Kayu	Mitsubishi Spesifikasi : STIHL MS 382 Chain Saw 25 inci	Campuran	Unit	1	Baik
6.	Multi Parameter Analyzer	Consort C6030T	Campuran	Unit	7	Baik

Sumber: Data dari Bendahara Barang Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sikka 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka menyusun program dan kegiatan strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor XX Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor XX Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor XX Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor /Bangunan Lainnya
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:**
 - a) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
- 3) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:**
 - a) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - b) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
- 4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan kegiatan:**
 - a) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota,dengan sub kegiatan :
 - a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
- 5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3, dengan kegiatan :**
 - a) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:



- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbun

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan kegiatan :

- a) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - b. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :

- a) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota
 - b. Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

9) Program Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan:

- a) Pengelolaan Sampah, dengan sub kegiatan:
 - a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - c. Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.



Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerinrah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka tahun 2025. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka pada tahun 2025 mengalami rasionalisasi akibat defisit anggaran, dimana anggaran sebelum perubahan sebesar Rp8.888.005.222,00 dan anggaran setelah perubahan sebesar Rp8.179.514.105,80 yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Program dan Kegiatan
Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.517.713.434,00	3.172.428.861,80
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.565.400,00	16.565.100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.041.142.910,00	2.728.883.742,20
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.787.500,00	56.283.200,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	132.934.500,00	128.912.600,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.037.324,00	136.051.519,60
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.245.800,00	105.732.700,00
2.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	24.348.100,00	24.826.200,00
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	24.348.100,00	24.826.200,00
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	201.888.988,00	201.811.988,00
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	163.095.088,00	163.028.088,00
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	38.793.900,00	38.783.900,00
4.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	813.998.556,00	677.844.856,00
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	813.998.556,00	677.844.856,00
5.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	13.125.000,00	18.471.900,00
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.125.000,00	18.471.900,00



6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	18.828.200,00	18.827.900,00
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.828.200,00	18.827.900,00
7.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	122.732.900,00	122.732.400,00
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	122.732.900,00	122.732.400,00
8.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	32.234.200,00	32.233.800,00
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	32.234.200,00	32.233.800,00
9.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.143.135.844,00	3.910.336.200,00
	Pengelolaan Sampah	4.143.135.844,00	3.910.336.200,00
T O T A L		8.888.005.222,00	8.179.514.105,80

1.5 Sistematika Penyajian

Adapun Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab I Pendahuluan

1.1 Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

1.2 Aspek Strategis Organisasi

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

1.5 Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1 Dokumen Perencanaan Tahun 2024-2026

2.2 Dokumen Perencanaan Tahun 2025-2029

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

3.2 Realisasi Anggaran



Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

Lampiran

1. Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029
2. Cascading Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029
3. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029
4. Monitoring Realisasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029
5. Penghargaan-penghargaan yang diterima Perangkat Daerah dalam tahun 2025



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Untuk mengukur kinerja diperlukan Perencanaan Kinerja yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dan mungkin akan timbul, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja dengan berorientasi hasil yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terintegrasi dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.

2.1 Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi kabupaten, sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Sikka.

1. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

a) Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.

Dari hasil telaah terhadap Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, maka tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yaitu:

‘ Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup’



Untuk pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup tersebut, ditetapkan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, yaitu :

‘ Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup’

b) Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 adalah Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-faktor keberhasilan dan tidak keberhasilan tersebut dapat disusun strategi dan yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam rangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka tahun 2024-2026 maka dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut :

- 1) Memanfaatkan Perda untuk meningkatkan komitmen pemerintah dan partisipasi stakeholder dalam PPPLH.
- 2) Memanfaatkan SOP dan teknologi informasi untuk menyediakan database lingkungan guna mengurangi pemanfaatan SDA secara ilegal dan mengurangi degradasi lingkungan serta perubahan iklim.
- 3) Meningkatkan komitmen pemerintahan, dukungan dana APBN dan partisipasi stakeholder untuk penyediaan sarpras pengelolaan sampah, RTH, laboratorium dan tenaga laboratorium serta mengoptimalkan SDM pengelola persampahan dan RTH guna mendukung PPPLH.
- 4) Menyusun Jakstrada pengelolaan sampah, Perda tentang pemakaman,



Standar baku mutu lingkungan daerah, kebijakan daerah terkait tata kelola TPS Limbah B3, RPPLH dan komitmen pemerintahan serta partisipasi stakeholder untuk pengelolaan lingkungan dan mengurangi degradasi lingkungan.

- 5) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup dengan mengoptimalkan partisipasi stakeholder dalam PPPLH untuk mengurangi pemanfaatan SDA secara ilegal guna mengurangi degradasi lingkungan.
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung SDM pengelolaan persampahan, RTH dan penyediaan sarpras TPST dalam pengelolaan lingkungan hidup guna mengurangi degradasi lingkungan dan perubahan iklim.

2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka pada Tahun 2024. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Kabupaten Sikka dapat digambarkan sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jln. Jend.SudirmanNo. 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Fax(0382) 22824Email dislingkupkabsikka@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIKKA
NOMOR 04.b TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024 - 2026**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah



3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
4. Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 sebagaimana termuat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini.
2. Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Keputusan Bupati Nomor Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.
- KEDUA : 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup merupakan pedoman kinerja yang digunakan untuk :
- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - b. menetapkan Perjanjian Kinerja (PK)
 - c. menyusun pohon kinerja;
 - d. menyusun cascading;
 - e. menyusun Rencana Aksi;
 - f. melakukan penyusunan laporan monitoring hasil realisasi rencana aksi pelaksanaan program dan kegiatan;



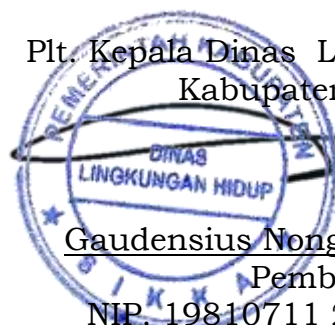
- g. menyusun Laporan Kinerja (LKj); dan
- h. melakukan evaluasi pencapaian kinerja

- 3. Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026;
- 4. Format Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini.

- KETIGA : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban melakukan:
- a. monitoring atas penerapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - b. monitoring dan evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2024.

Di tetapkan di Maumere
Tanggal : 3 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,


Gaudensius Nong Pio, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19810711 200501 1 008



Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

N o	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan / IKU	Penjelasan / Alasan / Formula Perhitungan	Satuan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Penanggung Jawab	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan : Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (0,376 IKA) + (0,405 IKU) + (0,219 IKL)	Indeks				
2	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (0,376 IKA) + (0,405 IKU) + (0,219 IKL)	Indeks	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Bidang Tata Lingkungan	APBD
					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang Tersedia	Bidang Tata Lingkungan	APBD
		Indeks Kualitas Air	Parameter yang diukur adalah TSS, DO, BOD, COD, Total Phosphat, E.Coli, Total Coliform $PIj = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ Pij adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari C _i /L _{ij} , dimana C _i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i dan L _{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j Evaluasi terhadap Pij adalah sebagai berikut: 1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika 0 ≤ Pij ≤ 1,0 2. Tercemar ringan jika 1,0 < Pij ≤ 5,0 3. Tercemar sedang jika 5,0 < Pij ≤ 10,0 4. Tercemar berat jika Pij > 10,0 Nilai Pij > 1 menurut mutu air kelas II = tidak memenuhi BM)		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	Persentase Dokumen pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Bidang Tata Lingkungan	APBD
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	APBD
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	Persentase Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut yang Dilakukan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	APBD
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	APBD
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Bidang Tata Lingkungan	APBD
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sikka	Persentase Jumlah Anakan dan Luas Lahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Bidang Tata Lingkungan	APBD
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
					Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian B3 dan limbah B3	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
Indeks Kualitas Udara	Parameter yang diukur adalah SO ₂ dan NO ₂ $IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$ dimana: IPU = Indeks Pencemaran Udara IP _{NO₂} = Indeks Pencemar NO ₂ IP _{SO₂} = Indeks Pencemar SO ₂	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD			



		Indeks Kualitas Lahan	Untuk menghitung Indeks tutupan lahan yang pertama kali dilakukan adalah menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap Prov/Kab/Kota Nilai Indeks didapatkan dengan formula : $ITH = \frac{LTH}{LWP}$ dimana: ITH = Indeks Tutupan Lahan LTH = Luas Tutupan ber-Hutan LKH = Luas Wilayah Provinsi		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
					Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingk.hidup untk lembaga kemasyr. Tingkt daerah kab/kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
		Persentase Penanganan sampah Perkotaan	Volume sampah yang terangkut Volume sampah yang dihasilkan	Persentase	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
					Pengelolaan Sampah	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
					Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian B3 dan limbah B3	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
3	Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik DLH		Indeks	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaraan Tugas dan Fungsi DLH	Sekretariat	APBD
		Indeks Profesionalisme ASN	$IPP = (25 \times 1 - A) + (25 \times (1 - B)) + (25 \times C) / 100 + (25 \times (1 - D))$	Indeks	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	APBD
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat	APBD
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Sekretariat	APBD



		Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	APBD
			$\frac{\text{Total Nilai Indikator Sarpras}}{\text{Banyaknya Indikator Sarpras}}$	Indeks	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat	APBD
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada DLH	Sekretariat	APBD
4	Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran DLH	Nilai SAKIP	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Lingkungan Hidup oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka	Nilai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DLH	Sekretariat	APBD
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat	APBD
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat	APBD
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sekretariat	APBD
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat	APBD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat	APBD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat	APBD
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat	APBD



3. Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2025
1.	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :	Indeks	71,70
			IKA : Indeks Kualitas Air	Indeks	52,53
			IKU : Indeks Kualitas Udara,	Indeks	94,51
			IKL : Indeks Kualitas Lahan	Indeks	68,98
			Persentase penanganan sampah perkotaan	Persentase	81,08
		Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik DLH	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	1,45
			Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	78,33
			Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	0,36
		Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja DLH	SAKIP	Indeks	67,92

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

4. Perjanjian Kinerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025

a) Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

b) Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;



4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

c) Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Pihak yang menyusun perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja di tingkat satuan kerja ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja dan pimpinan unit kerja. Perjanjian kinerja ditingkat SKPD dan unit kerja mandiri pemerintah provinsi/kabupaten/kota disusun oleh pimpinan SKPD kemudian ditandatangani oleh gubernur/bupati/ walikota dan pimpinan SKPD/unit kerja.

2. Waktu penyusunan perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

3. Penggunaan sasaran dan indikator

Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

- Untuk tingkat K/L/Pemda sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama K/L/Pemda dan indikator kinerja lain yang relevan.
- Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama ESE II dan indikator kinerja lain yang relevan.

4. Format Perjanjian Kinerja

a. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas:

- Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
 - Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
(terlampir)

b. Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya, sebagaimana ilustrasi pada anak lampiran berikut: (terlampir)



- c. Bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh dana dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, harus memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi alokasi dana-dana tersebut.

5. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadinya pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

6. Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja 2025

Perjanjian kinerja disusun dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran serta dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Adapun indikator kinerja sasaran strategis yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ADEODATUS BUANG DA CUNHA**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO**

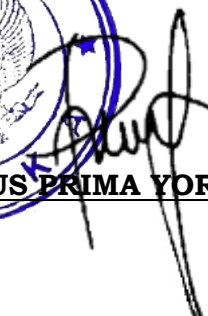
Jabatan : Bupati Sikka

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 04 November 2025

Pihak Kedua
Bupati Sikka,

JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

Drs. ADEODATUS BUANG DA CUNHA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 199903 1 006



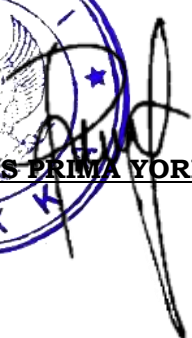
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,70
		Indeks Kualitas Air	52,53
		Indeks Kualitas Udara	94,51
		Indeks Tutupan Lahan	68,98
		Persentase Penanganan Sampah Perkotaan	81,08
2	Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	1,45
		Indeks Profesionalisme ASN	78,33
		Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	0,36
3	Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP	67,92

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	ASAL ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.172.428.861,80	APBD
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	24.826.200,00	APBD
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	201.811.988,00	APBD
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	677.844.856,00	APBD
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	18.471.900,00	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	18.827.900,00	APBD
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	122.732.400,00	APBD
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	32.233.800,00	APBD
9.	Program Pengelolaan Persampahan	3.910.336.200,00	APBD
TOTAL		8.179.514.105,80	APBD

Jumlah Anggaran yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis : **Rp8.179.514.105,80**

Maukere, 04 November 2025

Pihak Kedua
Bupati Sikka,

JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

Drs. ADEODATUS BUANG DA CUNHA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 199903 1 006



**RINCIAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup = - Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Tutupan Lahan	71,70 = 52,53 94,51 68,98	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	24.826.200,00
				Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	201.811.988,00
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	677.844.856,00
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	18.471.900,00
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	18.827.900,00
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	122.732.400,00
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup	32.233.800,00
2	Meningkatnya Layanan Persampahan	Persentase Pananganan Sampah Perkotaan	81,08	Program Pengolahan Persampahan	Persentase Volume Sampah yang tertangani	3.910.336.200,00
3	Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik DLH	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	1,45	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DLH	3.172.428.861,80
	a.Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	78,33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DLH	
	b.Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada DLH	0,36	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DLH	
4.	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja	Nilai SAKIP	67,92	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DLH	
TOTAL ANGGARAN						8.179.514.105,80

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

Drs. Adeodatus Puang Da Cunha
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 199903 1 006



5. Keselarasan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Renstra Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025

Keselarasn Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Keselarasan IKU Tahun 2025 pada Renstra PD dengan Keputusan Kepala PD
tentang IKU PD Tahun 2024-2026, RKT Perubahan PD Tahun 2025 dan PK
Perubahan PD Tahun 2025

No	IKU Dinas Lingkungan Hidup	Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2025	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :
2.	IKA : Indeks Kualitas Air	IKA : Indeks Kualitas Air	IKA : Indeks Kualitas Air	IKA : Indeks Kualitas Air
3.	IKU : Indeks Kualitas Udara	IKU : Indeks Kualitas Udara	IKU : Indeks Kualitas Udara	IKU : Indeks Kualitas Udara
4.	IKL : Indeks Kualitas Lahan	IKL : Indeks Kualitas Lahan	IKL : Indeks Kualitas Lahan	IKL : Indeks Kualitas Lahan
5.	Persentase penanganan sampah perkotaan	Persentase penanganan sampah perkotaan	Persentase penanganan sampah perkotaan	Persentase penanganan sampah perkotaan
6.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup
7.	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN
8.	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup
9.	SAKIP	SAKIP	SAKIP	SAKIP

2.2 Dokumen Perencanaan Tahun 2025-2029

a. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

a) Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan



jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan Misi Pembangunan Daerah ke-4, yaitu : ***Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan dan Berkelanjutan***. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka bertanggung jawab dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah yang pertama yaitu : ***Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan***. Tujuan Pembangunan Daerah tersebut diturunkan menjadi tujuan perangkat daerah yaitu:

“Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan”

Adapun indikator untuk tujuan perangkat daerah tersebut yaitu **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**.

Dari hasil telaah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis, maka Dinas Lingkungan Hidup bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas lingkungan fisik, biologis, dan sosial terus membaik guna mendukung kehidupan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Fokus intervensi diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas air, udara, dan tanah; penguatan kapasitas sistem pengelolaan limbah dan persampahan; pengendalian pencemaran; serta rehabilitasi dan konservasi ekosistem strategis, seperti kawasan pesisir, hutan lindung, dan daerah aliran sungai. Selain itu juga mencakup peningkatan resiliensi ekosistem terhadap tekanan perubahan iklim, termasuk pencegahan dan mitigasi risiko bencana ekologis. Dengan pendekatan berbasis data dan kolaboratif, sasaran ini mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga fungsi ekologis dan memperkuat daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Untuk pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup tersebut, maka ditetapkan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029, yaitu :

- 1) Meningkatnya lingkungan hidup yang berkualitas dengan indikator Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung.
- 2) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.



b) Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 - 2029. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 adalah Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Kabupaten Sikka.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui factor-kaftor keberhasilan dan tidak keberhasilan tersebut dapat disusun strategi dan yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam rangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka tahun 2025-2029 maka dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut :

- 1) Memanfaatkan Perda untuk meningkatkan komitmen pemerintahan dan partisipasi stakeholder dalam PPPLH.
- 2) Memanfaatkan SOP dan teknologi informasi untuk menyediakan database lingkungan guna mengurangi pemanfaatan Sumber Daya Alam secara ilegal dan mengurangi degradasi lingkungan serta perubahan iklim.
- 3) Meningkatkan komitmen pemerintahan, dukungan dana APBN dan partisipasi stakeholder untuk penyediaan sarpras pengelolaan sampah, RTH, laboratorium dan tenaga laboratorium dan pejabat pengawas lingkungan serta mengoptimalkan SDM pengelola persampahan dan RTH guna mendukung PPPLH.
- 4) Menyusun Perda tentang pemukiman, Standar baku mutu lingkungan daerah, kebijakan daerah terkait tata kelola TPS Limbah B3, DDDT dan RPPLH serta Perda tentang pengawasan PPLH dengan memanfaatkan komitmen pemerintahan serta partisipasi stakeholder untuk pengelolaan lingkungan dan mengurangi degradasi lingkungan.



- 5) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup dengan mengoptimalkan partisipasi stakeholder dalam PPPLH untuk mengurangi pemanfaatan SDA secara ilegal guna mengurangi degradasi lingkungan.
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung SDM pengelolaan persampahan, RTH dan penyediaan sarpras TPST dalam pengelolaan lingkungan hidup guna mengurangi degradasi lingkungan dan perubahan iklim.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Untuk pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup tersebut, ditetapkan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029, yaitu :

- 1) Membangun sarpras pengelolaan sampah berupa TPST dan menyediakan database lingkungan melalui komitmen pemerintahan, dukungan dana APBN serta partisipasi stakeholder untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan PPPLH melalui pemanfaatan Perda dan SOP.
- 2) Menyusun RanPerda tentang pemakaman, standar baku mutu lingkungan daerah, kebijakan daerah terkait tata kelola TPS Limbah B3, RPPLH, pengawasan PPLH melalui dukungan komitmen pemerintahan, dana APBN serta partisipasi stakeholder untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan PPPLH.
- 3) Menyusun Perda pemakaman, meningkatkan sarpras RTH, laboratorium, pejabat pengawas lingkungan melalui dukungan komitmen pemerintahan, dana APBN serta partisipasi stakeholder untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan PPPLH.
- 4) Meningkatkan pengelolaan RTH, laboratorium serta meningkatkan sarpras TPST dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui dukungan komitmen pemerintahan untuk mengurangi degradasi lingkungan.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung SDM pengelolaan persampahan, RTH, pengelolaan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup serta kerjasama dengan komunitas peduli lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup dan dalam pengelolaan lingkungan hidup guna mengurangi degradasi lingkungan dan perubahan iklim.



b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka pada tahun 2025. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Kabupaten Sikka dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan/ IKU	Penjelasn / Alasan / Formula Hitungan	Satuan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan	Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). $IKLH = (0,376 IKA) + (0,405 IKU) + (0,219 IKL)$	Indeks	Program dan Kegiatan Urusan Bidang Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	APBD
a.	Sasaran : Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung	Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) adalah ukuran kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk lain (daya dukung) serta menyerap limbah dan polutan (daya tampung), digunakan untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan agar tidak melampaui batas kapasitas ekosistem, dihitung berdasarkan data sumber daya alam, luas lahan, dan kebutuhan populasi.	Indeks	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Bidang Tata Lingkungan	APBD
					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang Tersedia	Bidang Tata Lingkungan	APBD
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	APBD
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut yang Dilakukan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	APBD
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	APBD
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase RTH	Bidang Tata Lingkungan	APBD
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Bidang Tata Lingkungan	APBD



				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
				Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penetapan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten / Kota (Surat Keputusan)	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
				Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD



					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
					Pengelolaan Sampah	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
b.	Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja yang diperoleh dari Nilai Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	APBD
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disediakan	Sekretariat	APBD
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Sekretariat	APBD
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disediakan	Sekretariat	APBD
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	Sekretariat	APBD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diselesaikan	Sekretariat	APBD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Sekretariat	APBD
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Sekretariat	APBD



Tabel 2.5
Target Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
Tahun 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	2.11.0.00.0.00.11.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,82	73,91	73,92	73,93	73,94	73,95	
2.	Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung	Indeks	0	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	78,20	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	
	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,82	73,91	73,92	73,93	73,94	73,95	

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029, Halaman 140



1. Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2025
1.	Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,91
		Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung (Indeks)	Indeks	0,5
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,50

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025



2. Perjanjian Kinerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025

a) Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

b) Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

c) Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Pihak yang menyusun perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja di tingkat satuan kerja ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja dan pimpinan unit kerja. Perjanjian kinerja ditingkat SKPD dan unit kerja mandiri pemerintah provinsi/kabupaten/kota disusun oleh pimpinan SKPD kemudian ditandatangani oleh gubernur/bupati/ walikota dan pimpinan SKPD/unit kerja.

2. Waktu penyusunan perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

3. Penggunaan sasaran dan indikator

Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.



- Untuk tingkat K/L/Pemda sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama K/L/Pemda dan indikator kinerja lain yang relevan.
- Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama ESE II dan indikator kinerja lain yang relevan.

4. Format Perjanjian Kinerja

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas:

- Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
 - Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat. (terlampir)

b. Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya, sebagaimana ilustrasi pada anak lampiran berikut: (terlampir)

- c. Bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh dana dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, harus memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi alokasi dana-dana tersebut.

3. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadinya pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

4. Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja 2025

Perjanjian kinerja disusun dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran serta dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Adapun indikator kinerja sasaran strategis yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ADEODATUS BUANG DA CUNHA**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO**
Jabatan : Bupati Sikka
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 04 November 2025

Pihak Kedua
Bupati Sikka,

JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

Drs. ADEODATUS BUANG DA CUNHA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 199903 1 006



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,91
2	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung	0,50
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,50

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	ASAL ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.172.428.861,80	APBD
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	24.826.200,00	APBD
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	201.811.988,00	APBD
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	677.844.856,00	APBD
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	18.471.900,00	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	18.827.900,00	APBD
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	122.732.400,00	APBD
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	32.233.800,00	APBD
9.	Program Pengelolaan Persampahan	3.910.336.200,00	APBD
TOTAL		8.179.514.105,80	APBD

Jumlah Anggaran yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis : **Rp8.179.514.105,80**

Maumere, 04 November 2025


 Pihak Kedua
 Bupati Sikka,
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO


 Pihak Pertama
 Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Sikka,
Drs. ADEODATUS BUANG DA CUNHA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660516 199903 1 006



**RINCIAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,91			
a.	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung	0,5	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	24.826.200,00
				Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	201.811.988,00
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH	677.844.856,00
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	18.471.900,00
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	18.827.900,00
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	122.732.400,00
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	32.233.800,00
				Program Pengolahan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	3.910.336.200,00
b.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.172.428.861,80
TOTAL ANGGARAN						8.179.514.105,80

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

Drs. Adeodatus Puang Da Cunha
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 199403 1 006



5. Keselarasan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Renstra Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025

Keselarasn Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Keselarasan IKU Tahun 2025 pada Renstra PD dengan Keputusan Kepala PD tentang IKU PD Tahun 2025-2029, RKT Perubahan PD Tahun 2025 dan PK Perubahan PD Tahun 2025

No	IKU Dinas Lingkungan Hidup	Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2025	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :
2.	Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung	Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung	Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung	Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2025 yang memuat realisasi dan capaian kinerja atas target kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam bab ini disajikan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2025.

Dalam melakukan penilaian terhadap Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka, Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, mengacu pada peraturan.

3.1 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program / kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka. Disamping itu capaian kinerja organisasi dilakukan untuk melihat setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran.

a. Analisis sesuai indikator kinerja utama tahun 2025 berpedoman pada Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka pada tahun 2025 secara umum menunjukkan kesesuaian antara target yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024–2026 dengan realisasi kinerja yang dicapai. Hal ini mencerminkan konsistensi perencanaan dan efektivitas pelaksanaan program serta kegiatan urusan bidang lingkungan hidup.



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,70	80,66	112,50
		Indeks Kualitas Air	52,53	77,50	147,53
		Indeks Kualitas Udara	94,51	84,97	89,91
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	68,98	78,13	113,26
		Persentase Penanganan Sampah Perkotaan	81,08	52,68	64,97
II	Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	1,45	1,28	88,28
		Indeks Profesionalisme ASN	78,33	72,92	93,09
		Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	0,36	0,32	88,89
III	Meningkatnya kualitas kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP	67,92	-	-

Sumber : Olahan Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun target tahun 2025 ditetapkan sebesar 71,70. Hasil pengukuran IKLH menunjukkan adanya peningkatan bahkan telah melebihi target yang ditetapkan. Nilai IKLH tahun 2025 yaitu sebesar 80,66 dan masuk dalam kategori sedang dengan realisasi capaian sebesar 112,50%. Capaian IKLH tersebut secara nasional menempatkan Kabupaten Sikka pada urutan ke-105 dari 514 Kabupaten/Kota dan di tingkat provinsi menduduki urutan pertama dari 22 Kabupaten/Kota. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup telah berjalan sesuai arah kebijakan Renstra.

Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Kualitas Air Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 52,53 dan realisasi sebesar 77,50 melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 147,57%.
2. Indikator Indeks Kualitas Udara Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 94,51 dan realisasi sebesar 84,97 tidak mencapai target dengan capaian kinerja



sebesar 89,91%.

3. Indikator Indeks Kualitas Lahan Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 68,98 dan realisasi sebesar 78,13 melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 113,26%.
 4. Indikator Persentase Penanganan Sampah Perkotaan ditetapkan target sebesar 81,08 dan realisasi sebesar 52,68 tidak mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 64,97%.
- Sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan target sebesar 1,45 dan realisasi diperoleh indeks sebesar 1,28 dengan capaian kinerja sebesar 88,28 % dan dirincikan sebagai berikut:
1. Indikator Indeks Profesionalisme ASN ditetapkan target sebesar 78,33 dan realisasi tahun 2025 sebesar 72,92 tidak mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 93,09%.
 2. Indikator Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan target sebesar 0,36 dan realisasi tahun 2025 sebesar 0,32 tidak mencapai target dengan capaian kinerja 88,89%
- Sasaran meningkatnya kualitas kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dengan indikator nilai SAKIP belum dapat dicantumkan dalam table 3.1 diatas dan hal ini disebabkan karena pihak Inspektorat Kabupaten Sikka belum melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun anggaran 2025. Adapun Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka tahun 2024 sebesar 78,20. Dengan asumsi bahwa Nilai SAKIP masih sama dengan tahun 2024 maka target untuk 2025 telah tercapai dan bahkan melebihi. Namun demikian, untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti tentunya menunggu hasil evaluasi resmi yang dikeluarkan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sikka nanti.

Secara keseluruhan, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja belum tercapai atau belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024–2026. Namun demikian capaian kinerja per sasaran berada di atas 85%. Terkhusus untuk sasaran meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian melampaui target, hal ini menandakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka telah cukup berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup.



2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun realisasi tahun 2024 dan 2023

Tabel 3.2
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,70	80,66	72,82	75,44
		Indeks Kualitas Air	52,53	77,50	53,33	60,00
		Indeks Kualitas Udara	94,51	84,97	93,72	93,30
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	68,98	78,13	67,60	68,91
		Persentase Penangan Sampah Perkotaan	81,08	52,68	51,11	55,43
II	Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	1,45	1,28	1,00	1,38
		Indeks Profesionalisme ASN	78,33	72,92	76,25	74,56
		Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	0,36	0,32	0,32	0,34
III	Meningkatnya kualitas kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP	67,92	-	78,82	67,45

Sumber : Olahan Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka (2025)

- Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun target tahun 2025 ditetapkan sebesar 71,70. Hasil pengukuran IKLH menunjukkan adanya perubahan menuju capaian yang lebih baik. Pada tahun 2023, nilai IKLH yang diperoleh sebesar 75,44 kemudian mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 72,82 dan kembali mengalami peningkatan dengan perolehan nilai 80,66 dan masuk dalam kategori sedang. Capaian ini jelas melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Kualitas Air selama tiga tahun berturut-turut secara fluktuatif mengalami perubahan. Tahun 2023 dengan nilai IKA sebesar 60,00, lalu mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 53,33 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 77,50 di tahun 2025.
2. Indikator Indeks Kualitas Udara selama tiga tahun berturut-turut secara fluktuatif mengalami perubahan. Tahun 2023 dengan nilai IKU sebesar 93,30, lalu mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 93,72 dan kembali mengalami penurunan menjadi 84,97 di tahun 2025.



3. Indikator Indeks Kualitas Lahan Tahun 2025 selama tiga tahun berturut-turut secara fluktuktuatif mengalami perubahan. Tahun 2023 dengan nilai IKL sebesar 68,91, lalu mengalami penurunan ditahun 2024 menjadi 67,60 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 78,13 di tahun 2025.
 4. Indikator Persentase Penanganan Sampah Perkotaan selama tiga tahun berturut-turut secara fluktuktuatif mengalami perubahan. Tahun 2023 dengan capaian sebesar 55,43%, lalu mengalami penurunan ditahun 2024 menjadi 51,11% dan kembali mengalami peningkatan menjadi 52,68% di tahun 2025.
- Sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup target tahun 2025 ditetapkan sebesar 67,92. Pada tahun 2023, nilai indeks kualitas pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup yang diperoleh sebesar 1,38 kemudian mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 1,00 dan kembali mengalami peningkatan dengan perolehan nilai 1,28. Capaian ini jelas tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.
1. Indikator Indeks Profesionalisme ASN selama tiga tahun berturut-turut secara fluktuktuatif mengalami perubahan. Tahun 2023 dengan nilai 74,56, lalu mengalami peningkstsn ditahun 2024 menjadi 76,25 dan kembali mengalami penurunan menjadi 72,92 di tahun 2025.
 2. Indikator Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Pada Dinas Lingkungan Hidup selama tiga tahun berturut-turut secara fluktuktuatif mengalami perubahan. Tahun 2023 dengan nilai 0,34, lalu mengalami penurunan ditahun 2024 menjadi 0,32 dan dengan nilai yang tetap sama di tahun 2025.
- Sasaran meningkatnya kualitas kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dengan indikator nilai SAKIP target tahun 2025 ditetapkan sebesar 67,92. Berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nilai SAKIP yang diperoleh mengalami peningkatan dimana pada tahun 2023 nilai SAKIP yang diperoleh yaitu 67,45. Kemudian nilai SAKIP kembali mengalami peningkatan menjadi 78,82 pada tahun 2024. Dari perolehan tersebut jelas bahwa capaian tahun 2024 tentu sudah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025. Adapun untuk nilai SAKIP tahun 2025 belum dapat dicantumkan dalam tabel 3.2 diatas dan hal ini disebabkan karena pihak Inspektorat Kabupaten Sikka belum melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun anggaran 2025.



3. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir yang terdapat dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025
dengan Target Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	%
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
I	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,66	73,81	109,28
		Indeks Kualitas Air	77,50	54,63	141,86
		Indeks Kualitas Udara	84,97	95,74	88,75
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	78,13	71,74	108,91
		Persentase Penangan Sampah Perkotaan	52,68	83,51	63,08
II	Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	1,28	1,51	84,77
		Indeks Profesionalisme ASN	72,92	81,47	89,51
		Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	0,32	0,37	86,49
III	Meningkatnya kualitas kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP	-	70,64	-

Sumber : Olahan Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka (2025)

Berdasarkan data pada tabel 3.3 analisis realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 71,70 sedangkan target akhir periode Renstra untuk Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 73,81 dengan demikian maka capaian kinerja terhadap kondisi akhir Renstra sebesar 109,28% atau telah mencapai target dengan rincian sbb :
 - 1) Sasaran Meningkatkan Kualitas Air dengan Indikator Indeks Kualitas Air pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 77,50 sedangkan target akhir periode Renstra untuk Indikator Indeks Kualitas Air sebesar 54,63 dan capaian kinerja terhadap kondisi akhir Renstra sebesar 141,84%
 - 2) Sasaran Meningkatkan Kualitas Udara dengan dengan Indikator Indeks Kualitas Udara Hidup hasil pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 84,97 sedangkan target akhir periode Renstra untuk Indikator Indeks Kualitas



Udara sebesar 95,74 dengan demikian maka capaian kinerja terhadap kondisi akhir Renstra sebesar 88,75%.

- 3) Sasaran Bertambahnya Tutupan Lahan dengan Indikator Indeks Kualitas Lahan pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 78,13 sedangkan target akhir periode Renstra untuk Indikator Indeks Kualitas Lahan sebesar 71,74 dengan demikian maka capaian kinerja terhadap kondisi akhir Renstra sebesar 108,91%.
 - 4) Sasaran Meningkatnya Layanan Persampahan dengan Indikator Persentase Penanganan Sampah Perkotaan hasil pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 52,68% sedangkan target akhir periode Renstra untuk Indikator Persentase Penanganan Sampah Perkotaan sebesar 83,51% dengan demikian maka capaian kinerja terhadap kondisi akhir Renstra sebesar 63,08%.
- Sasaran meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup dengan Indikator Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup hasil pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 1,28 sedangkan target akhir periode Renstra untuk Indikator Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup sebesar 1,51 dengan demikian maka capaian kinerja terhadap kondisi akhir Renstra sebesar 84,77% dengan rincian sbb:
- 1) Indikator Indeks Profesionalisme ASN hasil pencapaian realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 72,92 dari target akhir periode Renstra sebesar 81,47 dengan demikian maka capaian kinerja terhadap kondisi akhir Renstra sebesar 89,51%.
 - 2) Indikator Indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup hasil pencapaian realisasi kinerja 2025 sebesar 0,32 sedangkan target akhir periode Renstra sebesar 0,37 dengan demikian maka capaian kinerja terhadap kondisi akhir Renstra sebesar 86,49%.
- Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja dengan sasaran nilai SAKIP hasil pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 belum diketahui karena nilai SAKIP hingga saat laporan ini dibuat belum dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sikka sedangkan target akhir periode Renstra sebesar 70,64 dengan demikian maka capaian kinerja terhadap kondisi akhir Renstra dengan nilai SAKIP belum dapat dilampirkan.



4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, dan daerah lain

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Provinsi / Nasional	%
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
I	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,66	80,02	100,79
		Indeks Kualitas Air	77,50	71,10	109,00
		Indeks Kualitas Udara	84,97	89,03	95,44
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	78,13	70,75	110,43
		Persentase Penangan Sampah Perkotaan	52,68	70	75,26
II	Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	1,28	3,66	34,97
		Indeks Profesionalisme ASN	72,92	82,00	88,93
		Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	0,32	3,56	8,99
III	Meningkatnya kualitas kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP	-	65,00	121,26

Sumber : Olahan Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka (2025)

Berdasarkan tabel 3.4 perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target provinsi tidak seluruhnya mencapai target. Adapun capaian kinerja dari masing-masing sasaran dan indikator dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan 5 indikator kinerja memperoleh capaian diatas 75% yaitu :

- 1) Untuk target IKLH sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Nomor: 008/604/DLHK 3.1/2024 Tentang Kesepakatan Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 Dan 2045 Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa nilai IKLH, Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) telah melampaui target, sedangkan capaian kinerja untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) belum mencapai target provinsi namun mendapatkan perolehan yang cukup baik dengan capaian kinerja 95,44%. Adapun capaian nilai IKA, IKU, dan IKL sebagai komponen perhitungan IKLH untuk Kabupaten Sikka dengan indeks sebesar 80,66 menjadikan Kabupaten Sikka sebagai peringkat pertama



seprovinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai IKLH tertinggi dari 222 kabupaten dan kota.

- 2) Selain nilai IKLH, indikator kelima yaitu Persentase Penanganan Sampah Perkotaan dengan target secara nasional ditetapkan sebesar 70%, sedangkan capaian kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup hanya mencapai 52,68% atau sebesar 75,25% dari target nasional yang ditetapkan. Hal ini tentu menunjukkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam hal penanganan sampah belum maksimal. Oleh karena itu, masih memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan sosialisasi, serta dukungan sarana dan prasarana agar kinerja daerah dapat lebih selaras dengan standar nasional dan mencapai kinerja yang optimal.
- Sasaran meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup dengan Indikator Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup hasil pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 1,28. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,66 pada tahun 2025 maka capaian kinerja sebesar 34,97%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup masih sangat jauh dari target, dan belum maksimal.
 - 1) Indikator Indeks Profesionalisme ASN hasil pencapaian realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 72,92 sedangkan target dalam RPJMD Provinsi NTT sebesar 82,00 dengan demikian maka capaian kinerja terhadap target provinsi yaitu sebesar 88,93%.
 - 2) Indikator Indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup hasil pencapaian realisasi kinerja 2025 sebesar 0,32 jika dibandingkan dengan target provinsi menunjukkan bahwa indikator ini belum mencapai target dan akumulasi perbandingan dengan target provinsi sebesar 8,99 %.
- Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja dengan sasaran nilai SAKIP hasil pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 belum diketahui karena nilai SAKIP hingga saat laporan ini dibuat belum dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sikka sedangkan target dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 65,00 dengan demikian maka capaian kinerja terhadap target provinsi dengan nilai SAKIP belum dapat dilampirkan. Untuk saat ini Nilai SAKIP untuk tahun 2024 sebesar 78,82 dapat menggambarkan kondisi SAKIP untuk ementara telah jauh melampaui target provinsi.



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.5

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan / Rencana Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mengalami peningkatan karena capaian nilai IKA, IKU dan IKL kategori sedang		Nilai IKLH ditingkatkan hingga mencapai nilai $85 < x \leq 100$ dan masuk dalam kategori Baik
		Indeks Kualitas Air	Adanya perubahan kriteria IKA		Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha dan/atau kegiatan
		Indeks Kualitas Udara	Adanya tambahan parameter baru yaitu PM2,5 yang merupakan partikel udara yang berukuran lebih kecil(mikrometer) yang diambil dari data remote sensing citra satelit Selama pemaparan tahap I terjadi letusan gunung Lewotobi, mengakibatkan terjadinya hujan abu vulkanik secara keseluruhan di semua lokasi pemasangan sampel		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Penambahan RTH Kegiatan penanaman pohon		
		Persentase Penangan Sampah Perkotaan	Keterbatasan SDM di untuk penanganan sampah dikarenakan optimalisasi PPPK Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait sampah Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sehingga berpengaruh pada laju timbulan volume sampah yang terus bertambah	Dikeluarkannya Surat Perintah Bupati untuk pemanggilan kembali seluruh P3K asal DLH Gerakan Jaga Bersama (Jumat Giat Berantas Sampah) Nian Tana Sosialisasi kepada masyarakat khususnya sekolah dan kelurahan terkait penanganan sampah	Seluruh P3K optimalisasi agar SK penempatannya di DLH Koordinasi lintas sector untuk penyediaan sarpras pengangkutan ke TPA tiap kerja bakti
2	Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik DLH	Indeks Kualitas Pelayanan Publik DLH	Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan Belum adanya kepemilikan situs dan pengelola situs	Optimalisasi informasi pelayanan publik melalui sosial media	Pembentukan tim admin medsos dan pembuatan konten secara rutin



			Belum adanya laporan survey kepuasan masyarakat (SKM)		
		Indeks Profesionalisme ASN	Kurangnya Diklat dan Bimtek Teknis Bagi ASN muda		JFU diupayakan agar segera mengikuti ukom
		Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada DLH	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah belum memadai Bangunan kantor merupakan gedung lama yang belum di renovasi sehingga mengalami kebocoran dimana-mana Halaman kantor yang tidak memadai untuk parkir seluruh kendaraan operasional pengangkutan sampah	Perbaikan kontener dan kendaraan yang rusak Kendaraan operasional pengangkutan sampah di parker di Lapangan Umum – Kota Baru	
3	Meningkatnya kualitas kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran DLH	Nilai SAKIP	Rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP oleh inspektorat ditindaklanjuti Adanya tambahan SDM CPNS baru di sub bagian penyusun program anggaran dan pelaporan	Pendampingan SAKIP dan evaluasi internal.	Penguatan monitoring dan peningkatan kapasitas SDM Nilai SAKIP selanjutnya dapat mencapai nilai >80 dengan interpretasi memuaskan

Sumber : Olahan Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka (2025)

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam menilai kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup. Hingga tahun 2025, pemanfaatan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan teknologi informasi menunjukkan kecenderungan semakin efisien, seiring dengan meningkatnya capaian kinerja pada sebagian besar indikator kinerja utama.

Dari sisi sumber daya manusia, efisiensi tercermin dari optimalisasi peran aparatur dalam pelaksanaan pelayanan. Dengan jumlah pegawai yang relatif terbatas, Disling Kabupaten Sikka mampu meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas layanan melalui pembagian tugas yang lebih proporsional, penerapan standar operasional prosedur, serta peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan.

Pada aspek penggunaan anggaran, efisiensi terlihat dari keterkaitan yang kuat antara alokasi anggaran dengan pencapaian output dan outcome. Efisiensi anggaran yang sangat berpengaruh terhadap seluruh proses pelaksanaan program/kegiatan dan berdampak pada perubahan capaian kinerja setiap program/kegiatan. Pada



tahun 2025, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 total anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka sebesar Rp.9.399.097.790,00 setelah dilakukannya 2 kali efisiensi maka anggaran berkurang sebesar Rp. 1.219.583.684,20 sehingga anggaran tahun 2025 sebesar Rp.8.179.514.105,80. Meskipun adanya efisiensi penggunaan anggaran, pelaksanaan program/kegiatan tetap dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang ada dan capaian hampir sebagian besar program/kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dari sisi sarana dan prasarana, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berupaya mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada, khususnya sarana prasarana operasional pengelolaan taman kota dan pengangkutan sampah. Pemeliharaan sarana dilakukan secara berkala untuk memperpanjang masa pakai dan meminimalkan gangguan pelayanan.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka tercermin dari kemampuan perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan urusan bidang lingkungan hidup dengan sumber daya yang tersedia. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi, khususnya melalui penguatan digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, dan optimalisasi pemanfaatan database lingkungan. Dengan langkah tersebut, diharapkan kinerja pelayanan urusan lingkungan hidup ke depan dapat semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program dan kegiatan untuk pencapaian target kinerja adalah proses evaluasi yang membandingkan realisasi program dan kegiatan dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2025 pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berdasarkan hasil Laporan LKPJ Tahun 2025, target Capaian Kinerja 100% dan realisasi kinerja sebesar 95,82 % dengan predikat Tinggi. Adapun rincian dapat dilihat pada table LKPJ pada *Lampiran 6*.



b. Analisis sesuai indikator kinerja utama tahun 2025 berpedoman pada Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka pada tahun 2025 secara umum menunjukkan kesesuaian antara target yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dengan realisasi kinerja yang dicapai. Hal ini mencerminkan konsistensi perencanaan dan efektivitas pelaksanaan program serta kegiatan urusan bidang lingkungan hidup.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,91	80,66	109,13
a.	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Daya Dukung Daya Tampung	0,5	0	0
b.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,50	-	-

Sumber : Olahan Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yaitu meningkatkan kualitas air, udara, tutupan lahan dan pengelolaan persampahan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun target IKLH yang ditetapkan untuk tahun 2025 yaitu 73,91 dan realisasi tahun 2025 sebesar 80,66 atau sebesar 109,13%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah berhasil mencapai target dan mampu bekerja secara optimal dengan segala sumber daya yang ada.
- Sasaran strategis Meningkatkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dengan indikator kinerja berupa Indeks Daya Dukung Daya Tampung ditetapkan target tahun 2025 sebesar 0,5 dan belum realisasi masih berada pada capaian 0 atau belum mencapai target. Hal ini disebabkan Data perhitungan DDT yang ada, diambil dari data DDT KLHS RPJMD yang rentang waktunya adalah 5 tahun dan bukan berasal dari kegiatan rutin harian/ bulanan perangkat daerah yang dapat



ditentukan capaiannya setiap trimester/tahunnya. KLHS RPJMD pun belum dipantau pelaksanaannya sehingga belum dapat diperoleh nilai capaiannya.

- Sasaran strategis Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah ditetapkan target tahun 2025 sebesar 78,50 dan realisasi tahun 2025 belum dapat dilampirkan. Hal ini disebabkan karena pihak Inspektorat Kabupaten Sikka belum melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun anggaran 2025. Adapun Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka tahun 2024 sebesar 78,20. Dengan asumsi bahwa Nilai SAKIP masih sama dengan tahun 2024 maka target untuk 2025 belum tercapai karena capaian baru sebesar 99,61% tercapai. Namun demikian, untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti tentunya menunggu hasil evaluasi resmi yang dikeluarkan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sikka nanti.

2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun realisasi tahun 2024

Tabel 3.7
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Kinerja 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,91	80,66	72,82
a.	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Daya Dukung Daya Tampung	0,5	0	0
b.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,50	-	78,20

Sumber : Olahan Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:



- Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yaitu meningkatkan kualitas air, udara, tutupan lahan dan pengelolaan persampahan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun target IKLH yang ditetapkan untuk tahun 2025 yaitu 73,91. Hasil pengukuran IKLH menunjukkan adanya perubahan menuju capaian yang lebih baik. Pada tahun 2024 nilai IKLH sebesar 72,82 dan mengalami peningkatan dengan perolehan nilai 80,66 pada tahun 2025 dan masuk dalam kategori sedang. Capaian ini jelas melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Sasaran strategis Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas dengan indikator kinerja berupa Indeks Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) ditetapkan target tahun 2025 sebesar 0,5. Indikator DDDT ini merupakan indikator baru dan untuk realisasi tahun 2024 belum ada perhitungannya sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan. Adapun capaian kinerja untuk Tahun 2025 menunjukkan realisasi 0 atau belum mencapai target. Hal ini disebabkan Data perhitungan DDDT yang ada, diambil dari data DDDT KLHS RPJMD yang rentang waktunya adalah 5 tahun dan bukan berasal dari kegiatan rutin harian/ bulanan perangkat daerah yang dapat ditentukan capaiannya setiap trimester/tahunnya. KLHS RPJMD pun belum dipantau pelaksanaannya sehingga belum dapat diperoleh nilai capaiannya.
- Sasaran strategis meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah ditetapkan target tahun 2025 sebesar 78,50 dan realisasi tahun 2025 belum dapat dilampirkan. Hal ini disebabkan karena pihak Inspektorat Kabupaten Sikka belum melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun anggaran 2025. Adapun Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka tahun 2024 sebesar 78,82.



3. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir yang terdapat dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025
dengan Target Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,66	73,95	109,07
a.	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Daya Dukung Daya Tampung	0	0,9	
b.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	80,50	

Sumber : Olahan Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka (2025)

- Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yaitu meningkatkan kualitas air, udara, tutupan lahan dan pengelolaan persampahan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Realisasi kinerja tahun 2025 yaitu IKLH sebesar 80,66 (kategori sedang) sedangkan target akhir periode Renstra untuk Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 73,95 dengan demikian maka capaian kinerja terhadap kondisi akhir Renstra sebesar 109,07% atau telah mencapai target.
- Sasaran strategis Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas dengan indikator kinerja berupa Indeks Daya Dukung Daya Tampung (DDDT). Realisasi kinerja tahun 2025 yaitu DDDT sebesar 0 sedangkan target akhir periode Renstra 0,9 dengan demikian maka capaian kinerja terhadap kondisi akhir Renstra sebesar 0% atau belum mencapai target
- Sasaran strategis meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah realisasi kinerja tahun 2025 belum diketahui, sedangkan target akhir periode Renstra Nilai SAKIP sebesar 80,50. Realisasi kinerja tahun 2025 belum diketahui karena hingga saat laporan ini dibuat belum dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sikka



4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, dan daerah lain

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Provinsi	%
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,66	80,02	100,78
a.	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Daya Dukung Daya Tampung	0	-	
b.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	65,00	

Sumber : Olahan Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka (2025)

- Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yaitu meningkatkan kualitas air, udara, tutupan lahan dan pengelolaan persampahan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Realisasi kinerja tahun 2025 yaitu IKLH sebesar 80,66 (kategori sedang) sedangkan target target IKLH sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Nomor: 008/604/DLHK 3.1/2024 Tentang Kesepakatan Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 Dan 2045 Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa nilai IKLH telah melampaui target dengan persentase capaian kinerja 100,78%.
- Sasaran strategis Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas dengan indikator kinerja berupa Indeks Daya Dukung Daya Tampung (DDDT). Realisasi kinerja tahun 2025 yaitu DDDT sebesar 0 tidak dapat dibandingkan dengan target provinsi karena tidak ditemukannya data terkait target indeks DDDT.
- Sasaran strategis meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah realisasi kinerja tahun 2025 belum diketahui, sedangkan target provinsi dalam RPJMD Nilai SAKIP sebesar 65,00. Realisasi kinerja tahun 2025 belum diketahui karena hingga saat laporan ini dibuat belum dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup oleh pihak Inspektorat Kabupaten sehingga tidak dapat dilakukan analisis perbandingan.



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.10

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan / Rencana Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mengalami peningkatan karena capaian nilai IKA, IKU dan IKL kategori sedang		Nilai IKLH ditingkatkan hingga mencapai nilai $85 < x \leq 100$ dan masuk dalam kategori Baik
a.	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Daya Dukung Daya Tampung	Data perhitungan DDDT yang ada, diambil dari data DDDT KLHS RPJMD yang rentang waktunya adalah 5 tahun dan bukan berasal dari kegiatan rutin harian/ bulanan perangkat daerah yang dapat ditentukan capaiannya setiap trimester/ tahunnya.	Pehitungan hanya menggunakan daya dukung air	Bidang Tata Lingkungan melakukan perhitungan secara detail untuk Indeks DDDT
b.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP oleh inspektorat ditindaklanjuti Adanya tambahan SDM CPNS baru di sub bagian penyusun program anggaran dan pelaporan	Pendampingan SAKIP dan evaluasi internal.	Penguatan monitoring dan peningkatan kapasitas SDM Nilai SAKIP selanjutnya dapat mencapai nilai >80 dengan interpretasi memuaskan

Sumber : Olahan Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka (2025)

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam menilai kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup. Hingga tahun 2025, pemanfaatan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan teknologi informasi menunjukkan kecenderungan semakin efisien, seiring dengan meningkatnya capaian kinerja pada sebagian besar indikator kinerja utama.

Dari sisi sumber daya manusia, efisiensi tercermin dari optimalisasi peran aparatur dalam pelaksanaan pelayanan. Dengan jumlah pegawai yang relatif terbatas, Disling Kabupaten Sikka mampu meningkatkan cakupan pelayanan dan



kualitas layanan melalui pembagian tugas yang lebih proporsional, penerapan standar operasional prosedur, serta peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan.

Pada aspek penggunaan anggaran, efisiensi terlihat dari keterkaitan yang kuat antara alokasi anggaran dengan pencapaian output dan outcome. Efisiensi anggaran yang sangat berpengaruh terhadap seluruh proses pelaksanaan program/kegiatan dan berdampak pada perubahan capaian kinerja setiap program/kegiatan. Pada tahun 2025, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 total anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka sebesar Rp.9.399.097.790,00 setelah dilakukannya 2 kali efisiensi maka anggaran berkurang sebesar Rp. 1.219.583.684,20 sehingga anggaran tahun 2025 sebesar Rp.8.179.514.105,80. Meskipun adanya efisiensi penggunaan anggaran, pelaksanaan program/kegiatan tetap dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang ada dan capaian hampir sebagian besar program/kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dari sisi sarana dan prasarana, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berupaya mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada, khususnya sarana prasarana operasional pengelolaan taman kota dan pengangkutan sampah. Pemeliharaan sarana dilakukan secara berkala untuk memperpanjang masa pakai dan meminimalkan gangguan pelayanan.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka tercermin dari kemampuan perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan urusan bidang lingkungan hidup dengan sumber daya yang tersedia. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi, khususnya melalui penguatan digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, dan optimalisasi pemanfaatan database lingkungan. Dengan langkah tersebut, diharapkan kinerja pelayanan urusan lingkungan hidup ke depan dapat semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program dan kegiatan untuk pencapaian target kinerja adalah proses evaluasi yang membandingkan realisasi program dan kegiatan dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2025 pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berdasarkan hasil Laporan LKPJ Tahun 2025, target Capaian Kinerja 100% dan realisasi kinerja sebesar 95,82 % dengan predikat Tinggi. Adapun rincian dapat dilihat pada table LKPJ pada *Lampiran 6*.



3.2 Realisasi Anggaran

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup. Urusan wajib bukan pelayanan dasar yang dilaksanakan dalam Tahun 2025 dijabarkan dalam 9 (sembilan) program dan 16 (enam belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan. Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka mengelola pendapatan yaitu Penerimaan Retribusi Sampah dengan Pagu Pendapatan sebesar **Rp1.500.000.000,-** terealisasi sebesar **Rp432.532.500,-** atau sebesar **28,84%**.

b. Belanja

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Lingkungan Hidup yang bersumber dari Dana Alokasi Umum selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. 8.179.514.105,80,-** berupa **Belanja Operasi** dan **Belanja Modal**. Dengan komposisi Belanja Operasi Rp7.891.930.005,80 atau mencapai **96,48%** yaitu terdiri dari **Belanja Pegawai** (Gaji Pokok PNS, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan Pph dan Pembulatan gaji) dan **Belanja Barang dan Jasa**. Sedangkan **Belanja Modal** sebesar **Rp.287.584.100,-** atau mencapai **3,52%**.

Dari Total Anggaran tersebut diatas, Realisasi penyerapan anggaran pada Tahun 2025 sebesar Rp. 7.670.795.965,- tau sebesar 93,78% (Dapat dilihat pada Tabel 3.11)



Tabel 3.11
Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
Tahun 2025

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.179.514.105,80	7.658.856.874	93,63			
A.	Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan						
	<i>Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>				73,91	80,66	100
1.	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas						
	<i>Indikator Sasaran : Indeks Daya Dukung Daya Tampung</i>				0,5	0	0
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	24.826.200,00	24.759.323,00	99,73	100	100	100
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	24.826.200,00	24.759.323,00	99,73	100	100	100
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	24.826.200,00	24.759.323,00	99,73	12	72	100
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	201.811.988,00	191.950.760,00	95,11	100	100	100
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	163.028.088,00	153.168.969,00	93,95	100	100	100
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	163.028.088,00	153.168.969,00	93,95	12	14	100
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	38.783.900,00	38.781.791,00	99,99	100	100	100
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	38.783.900,00	38.781.791,00	99,99	60	61	100
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	677.844.856,00	662.641.264,00	97,76	100	100	100
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	677.844.856,00	662.641.264,00	97,76	100	100	100
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	603.287.456,00	588.562.864,00	97,56	29,47	29,47	100
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	74.557.400,00	74.078.400,00	99,36	4	4	100
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	18.471.900,00	18.430.316,00	99,77	100	100	100
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.471.900,00	18.430.316,00	99,77	100	100	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	18.471.900,00	18.430.316,00	99,77	4	4	100



	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	18.827.900,00	18.272.606,00	97,05	100	100	100
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.827.900,00	18.272.606,00	97,05	100	100	100
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	18.827.900,00	18.272.606,00	97,05	55	86	100
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	122.732.400,00	121.073.378,00	98,65	100	90,91	90,91
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	122.732.400,00	121.073.378,00	98,65	100	90,91	90,91
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	83.742.900,00	82.178.779,00	98,13	11	9	81,81
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	38.989.500,00	38.894.599,00	99,76	6	6	100
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	32.233.800,00	31.579.401,00	97,97	100	100	100
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	32.233.800,00	31.579.401,00	97,97	100	100	100
	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	26.386.800,00	25.979.331,00	98,46	25	22	100
	Penerapan Sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5.847.000,00	5.600.070,00	95,78	15	51	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.910.336.200,00	3.728.285.423,00	95,34	100	71,48	71,48
	Pengelolaan Sampah	3.910.336.200,00	3.728.285.423,00	95,34	100	71,48	71,78
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	15.468.500,00	15.300.430,00	98,91	8	4	50
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	104.905.900,00	103.697.044,00	98,85	2	2	100
	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	3.789.961.800,00	3.609.287.949,00	95,23	15.350,40	9.892,19	66,64
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah						



	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah				78,50	78,20	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.172.428.861,80	2.873.803.494,00	90,59	100	100	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.565.100,00	16.532.570,00	99,80	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.565.100,00	16.532.570,00	99,80	10	10	10
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.728.883.742,20	2.440.825.083,00	89,44	100	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.624.925.742,20	2.336.935.083,00	89,03	490	490	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.958.000,00	103.890.000,00	99,93	12	12	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.283.200,00	55.939.662,00	99,39	100	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.001.300,00	10.939.750,00	99,44	23	23	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.531.900,00	8.294.776,00	97,22	1	1	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.750.000,00	36.705.136,00	99,88	6	6	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.912.600,00	128.656.810,00	99,80	100	100	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.392.200,00	96.253.400,00	99,86	38	38	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.520.400,00	32.403.410,00	99,64	4	4	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.051.519,60	130.415.723,00	95,86	100	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.790.027,60	39.160.631,00	87,43	12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.261.492,00	91.255.092,00	99,99	12	12	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.732.700,00	101.433.646,00	95,93	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.182.700,00	98.883.646,00	95,83	22	22	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00	9	9	100
	JUMLAH	8.179.514.105,80	7.670.795.965	93,78	100	95,82	95,82

Sumber : Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan tabel 3.11 pagu anggaran dan realisasi serta target dan realisasi kinerja setiap program, kegiatan dan subkegiatan dapat rincikan sebagai berikut :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran sebesar Rp.3.172.428.861,80,- realisasi Rp.2.873.803.494,- atau 90,59%, dengan kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.16.565.100,- realisasi Rp.16.532.570,- atau 99,80%, dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp.16.565.100,- realisasi Rp.16.532.570,- atau 99,80%.
Dana ini digunakan untuk Penyusunan Laporan (LPPD, LKPJ, LAKIP, PK, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan, SAKIP, Renja SKPD, Laporan Keuangan), sebanyak 10 dokumen dan uang lembur.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.2.728.883.742,20,- realisasi Rp.2.440.825.083,- atau 89,44%, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, alokasi anggaran sebesar Rp.2.624.925.742,20,- realisasi Rp.2.336.935.083,- atau 89,03%.
Digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN sebanyak 36 orang, selama 14 bulan, namun berkurang 1 orang ASN yang pensiun dan 1 orang ASN mutasi ke Dinas PUPR.
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 103.958.000,- realisasi Rp. 103.890.000,- atau 99,93%.
Digunakan untuk belanja honorarium dan lembur Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan belanja bahan kegiatan Kantor Benda Pos (Materai 10.000).
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.56.283.200,- realisasi Rp.55.939.662,- atau 99,39%, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan, alokasi anggaran sebesar Rp.11.001.300,- realisasi Rp.10.939.750,- atau 99,44%.
Digunakan untuk belanja kantor ATK, kertas dan cover, bahan komputer, dan belanja makan-minum rapat.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, alokasi anggaran sebesar Rp.8.531.900,- realisasi Rp.8.294.776,- atau 97,22%.
Digunakan untuk belanja bahan cetak berupa penggandaan naskah dinas dan penjilidan dokumen dinas.



- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp.36.750.000,- realisasi Rp.36.705.136,- atau 99,88%.
Digunakan untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kupang 2 kali dan 1 kali ke Jakarta serta perjalanan dinas dalam daerah.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah alokasi anggaran sebesar Rp.128.912.600,- realisasi Rp.128.656.810,- atau 99,80%, dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi anggaran sebesar Rp.96.392.200,- realisasi Rp.96.253.400,- atau 99,86%.
Digunakan untuk belanja 33 buah Baju Kerja Lapangan/Rompi, 13 buah Baju Kerja/Catel Pack, 1 unit Mesin Sensor, 4 unit Mesin Potong Rumput dan 6 unit laptop.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi anggaran sebesar Rp.32.520.400,- realisasi Rp.32.403.410,- atau 99,64%.
Digunakan untuk belanja 2 unit AC 1/2 PK dan pembangunan 2 unit toilet.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.136.051.519,60,- realisasi Rp.130.415.723,- atau 95,86%, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, alokasi anggaran sebesar Rp.44.790.027,60,- realisasi Rp.39.160.631 atau 87,43%.
Digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air, listrik dan Internet (Wi-fi) kantor, selama 12 bulan.
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, alokasi anggaran sebesar Rp.91.261.492,- realisasi Rp.91.255.092,- atau 99,99%.
Digunakan untuk membayar jasa tenaga pelayanan umum, iuran jaminan kesehatan bagi non ASN, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN dan iuran jaminan kematian bagi non ASN untuk 5 orang tenaga honor di sekretariat. Selain itu juga digunakan untuk belanja perabot kantor dan alat listrik.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.105.732.700,- realisasi Rp.101.433.646,- atau 95,93%, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi anggaran sebesar Rp.103.182.700,- realisasi Rp.98.883.646,- atau 95,83%.



Digunakan untuk bahan bakar dan pelumas, suku cadang, tunjangan sopir sebanyak 17 orang yang terdiri dari 1 orang operator alat berat, 10 orang sopir dum truck, 4 orang sopir amroll, 1 orang sopir mobil tangki air, 1 orang sopir kendaraan kepala dinas. selain itu juga pajak kendaraan dinas/operasional sebanyak 22 unit terdiri dari kendaraan bermotor roda dua sebanyak 4 unit, kendaraan bermotor roda empat sebanyak 2 unit, pajak kendaraan roda tiga sebanyak 3 unit, serta pajak kendaraan roda enam (dumb truck - amroll) sebanyak 13 unit dan servis kendaraan roda empat sebanyak 5 kali.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi anggaran sebesar Rp.2.550.000,- realisasi Rp.2.550.000,- atau 100%.

Digunakan untuk Belanja Pemeliharaan laptop 3 unit dan printer sebanyak 6 kali.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran sebesar Rp.24.826.200,- realisasi Rp.24.759.323,- atau 99,73%, dengan kegiatan:

- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.24.826.200,- realisasi Rp.24.759.323,- atau 99,73%, dengan sub kegiatan:

- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.24.826.200,- realisasi Rp.24.759.323,- atau 99,73%.

Dana ini digunakan untuk mendapatkan Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota melalui rangkaian kegiatan yang bermuara pada diterbitkannya 65 dokumen lingkungan yang terdiri dari: rekomendasi terhadap 70 Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan 2 dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), 1 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan 27 Dokumen Kajian Lingkungan. Rincian data Inventarisasi Dokumen SPPL, UKL/UPL, DPLH dan Kajian Lingkungan sepanjang tahun 2025 termuat dalam *Lampiran 11*.

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran sebesar Rp.201.811.988,- realisasi Rp.191.950.760,- atau 95,11%, dengan kegiatan:

- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, alokasi anggaran sebesar Rp.163.028.088,- realisasi Rp.153.168.969,- atau 93,95%, dengan sub kegiatan:

- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, alokasi



anggaran sebesar Rp.163.028.088,- realisasi Rp.153.168.969,- atau 93,95%.

Dana ini digunakan untuk melakukan pemantauan kualitas air. Untuk pemantauan kualitas air dilakukan pengambilan sampel air dalam daerah (Sungai Wairita) sebanyak 6 (enam) titik di 1 (satu) lokasi dan dilakukan pengambilan sebanyak 2 (dua) kali pengulangan yaitu pada musim kemarau dan musim hujan agar hasil pengujiannya dapat diambil nilai rata – ratanya untuk menghitung nilai indeks Kualitas Air (IKA). Setelah pengambilan sampel air selanjutnya diantar ke UPT. Laboratorium Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan pengujian kualitas air. Pengujian kualitas air yang dilakukan, menggunakan parameter sesuai standar perhitungan IKLH dalam rangka perhitungan indeks kualitas air (IKA), yang menjadi salah satu indikator dalam penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi dan IKLH Nasional (Berdasarkan Surat Gubernur NTT Nomor BU.660/24/DLHK/2021, tanggal 1 November 2021, perihal Perhitungan IKLH).

Dari hasil kualitas air diperoleh nilainya sebesar 77,50 yang masuk kriteria Sedang ($60 < x \leq 85$). Secara nasional IKA Kabupaten Sikka berada pada urutan ke 103 dari 514 Kabupaten/Kota dan di tingkat Provinsi berada pada urutan ke 4 dari 22 Kabupaten/Kota. Capaian dari kualitas air yang diperoleh mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 yaitu 53,33 yang masuk kriteria sedang. Hal ini disebabkan karena tahun 2025 mengalami perubahan kriteria IKLH, dimana tahun 2024 memiliki kriteria sedang dengan skor $50 \leq x < 70$ sedangkan tahun 2025 memiliki kriteria sedang dengan skor $60 < x \leq 85$. Dari hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pengujian Kualitas Air dengan 8 Parameter

NO	TANGGAL PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	NILAI PEMANTAUAN							
			pH (Potential Hydrogen)	BOD (mg/L) (Biological Oxygen Demand)	COD (mg/L) (Chemical Oxygen Demand)	TSS (mg/L) (Total Suspended Solid)	DO (mg/L) (Dissolved Oxygen)	NO ₃ - N (mg/L) (Nitrat)	TOTAL FOSFAT (mg/L)	FECAL COLIFORM (mg/L)
1	'16 September 2025	2	7.39	6.52	7.61	5	7.58	0.017	0.01	2700
2	'16 September 2025	2	7.65	4.35	5.32	6.6	7.77	0.043	0.016	1300
3	'16 September 2025	2	7.31	2.94	3.24	5.4	8.16	0.065	0.018	1700
4	'13 Mei 2025	1	7.46	2.9	3,537	21	8.37	0.121	0.038	1700
5	'13 Mei 2025	1	7.58	2.72	3.591	29	7.14	0.144	0.031	2300
6	'13 Mei 2025	1	7.42	6.53	10.27	32	7.76	0.153	0.032	930

Sumber : Aplikasi SITALA Tahun 2025

Catatan : Angka yang di BOLD hitam = Tidak memenuhi standar baku mutu



Tabel 3.13
Perhitungan Indeks Kualitas Air

Kabupaten/ Kota	Jumlah Titik				Nilai Indeks Per Mutu				IKA
	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	
Kabupaten Sikka	0	6	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	77,50

Sumber : Aplikasi SITALA Tahun 2025

Pemantauan kualitas udara dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali pada 4 (empat) lokasi/titik dengan 2 (dua) kali pengulangan setelah pemasangan alat dan dipaparkan selama 14 (empat belas) hari, dilanjutkan dengan pengambilan alat yang sudah dipasang dan dikirim ke laboratorium rujukan Kementerian Lingkungan Hidup untuk dianalisis hasilnya dengan nilainya sebesar 84,97 yang masuk Kriteria Sedang ($60 < x \leq 85$). Secara nasional IKU Kabupaten Sikka berada pada urutan ke 160 dari 514 Kabupaten/Kota dan di tingkat Provinsi berada pada urutan ke 4 dari 22 Kabupaten/Kota. Capaian dari kualitas udara yang diperoleh mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yaitu 93,72 yang masuk kriteria Baik. Hal ini disebabkan: - Adanya tambahan parameter baru yaitu PM_{2,5} yang merupakan partikel udara yang berukuran lebih kecil(mikrometer) yang diambil dari data remote sensing citra satelit. - Selama pemaparan tahap I terjadi letusan gunung berapi Lewotobi yang mengakibatkan terjadinya hujan abu vulkanik secara keseluruhan di semua lokasi pemasangan sampel. - Mengalami perubahan kriteria IKLH, dimana tahun 2024 skor $70 \leq x < 90$ memiliki kriteria Baik sedangkan tahun 2025 skor $85 < x \leq 100$ memiliki kriteria Baik. Oleh sebab itu karena hasil di tahun 2025 tidak mencapai Kriteria baik yang baru maka masuk kategori sedang. Hasil analisis pengujian di 4 (empat) titik sebagai berikut :

Tabel 3.14
Pengujian Kualitas Udara dengan 3 Parameter

NO	TANGGAL PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI	NILAI PEMANTAUAN		
					NO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM _{2,5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
					(Nitrogen Dioksida)	(Sulfur Dioksida)	(Partikulat)
1	23 September 2025	2	Perkantoran	Belakang Kantor DPRD Sikka Jl. Eltari	'3.17	'3.58	'11.03
2	23 September 2025	2	Pemukiman	Perumnas Jl. Dahlia	'2.53	'4.72	'11.03
3	23 September 2025	2	Industri	PLTNG 40 MW Maumere Jl. Trans Maumere-Larantuka	'2.16	'7.07	'11.03
4	23 September 2025	2	Transportasi	Jl Ahmad Yani Kantor Dinas Pariwisata (Eks Kantor Bupati)	'3.05	'5.28	'11.03



5	22 Juli 2025	1	Perkantoran	Belakang Kantor DPRD Sikka Jl. Eltari	'3.44	'6.18	'11.03
6	22 Juli 2025	1	Pemukiman	Perumnas Jl. Dahlia	'1.95	'5.73	'11.03
7	22 Juli 2025	1	Industri	PLTNG 40 MW Maumere Jl. Trans Maumere-Larantuka	'2.11	'9.52	'11.03
8	22 Juli 2025	1	Transportasi	Jl Ahmad Yani Kantor Dinas Pariwisata (Eks Kantor Bupati)	'1.99	'7.11	'11.03

Sumber : Aplikasi SITALA Tahun 2025

Tabel 3.15
Perhitungan Indeks Kualitas Udara

Kabupaten / Kota	Perhitungan Indeks							
	Rataan Per Parameter			Indeks Per Parameter			Rataan	IKU INA
	NO2(ug/m3) (Nitrogen Dioksida)	SO2 (ug/m3) (Sulfur Dioksida)	PM2.5 (Aµg/m3) (Partikulat)	NO2(ug/m3) (Nitrogen Dioksida)	SO2 (ug/m3) (Sulfur Dioksida)	PM2.5 (Aµg/m3) (Partikulat)	Indeks	
Kabupaten Sikka	2.55	6.15	11.03	0.05	0.14	0.74	0.31	84.97

Sumber : Aplikasi SITALA Tahun 2025

Dari hasil pemantauan kualitas air dan udara dengan target yang harus diperoleh sebanyak 12 Dokumen dan realisasinya sebanyak 14 Dokumen (terlampir). Hal ini disebabkan kegiatan pemasangan alat uji kualitas udara bersumber dari APBN, di awal tahun 2025 mengalami efisiensi anggaran sehingga kegiatan tersebut ditiadakan untuk di luar Pulau Jawa tetapi di semester II anggaran untuk kegiatan tersebut dimasukkan pada DPPA Kementerian Lingkungan Hidup sehingga bisa dilakukan pengujian kualitas udara tahun 2025.

Perolehan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2025 yaitu sebesar 78,13 dengan kategori sedang. Secara nasional IKL Kabupaten Sikka berada pada urutan ke 122 dari 514 Kabupaten/Kota dan di tingkat Provinsi berada pada urutan ke 5 dari 22 Kabupaten/Kota. Dengan demikian maka nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025 dapat dihitung menggunakan rumus perhitungan IKLH = (0,376 IKA) + (0,405 IKU) + (0,219 IKL) atau IKLH = (0,376 x 77,50) + (0,405 x 84,97) + (0,219 x 78,13) yaitu sebesar 80,66. Adapun rincian perhitungan IKLH pada aplikasi IKLH dapat dilihat pada *Lampiran 12*.

Pada pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka terdapat 3 permasalahan yang dihadapi yaitu :

a) Alat dan bahan penunjang kegiatan pengujian/pemantauan lingkungan



sudah lama tidak dikalibrasi sehingga mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kurangnya daya listrik. Perlu pengadaan peralatan laboratorium baru maupun bahan penunjang kegiatan pemantauan Kualitas Lingkungan yaitu Pemantauan Kualitas Air dan Udara yang memenuhi Spesifikasi Parameter Wajib dan menambah daya listrik.

- b) Belum adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi pengelola laboratorium lingkungan untuk operasional laboratorium. Mengadakan rekrutmen pegawai yang memiliki kualifikasi pengelola laboratorium lingkungan.

- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.38.783.900,- realisasi Rp.38.781.791,- atau 99,99%, dengan sub kegiatan:

- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat, alokasi anggaran sebesar Rp.38.783.900,- realisasi Rp.38.781.791,- atau 99,99%.

Digunakan untuk melakukan monitoring dalam daerah terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan Hidup dengan target sebanyak 60 laporan/kegiatan monitoring dan realisasinya sebanyak 64 laporan/kegiatan yang terdiri dari pencemaran 61 usaha dan/atau kegiatan dan kerusakan 3 usaha dan/atau kegiatan (terlampir).

Tempat usaha dan/atau kegiatan yang di lakukan pemberian informasi adalah tempat usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki dokumen izin lingkungan dan juga tempat usaha yang belum memiliki izin lingkungan. Capaian yang diperoleh tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024 sebanyak 85 laporan/kegiatan yang terdiri dari pencemaran 79 usaha dan/atau kegiatan dan kerusakan 6 usaha dan/atau kegiatan. Hal ini disebabkan karena efisiensi anggaran.

Selain itu ada kegiatan baru yaitu penilaian PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang merupakan evaluasi kinerja lingkungan perusahaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong tanggung jawab lingkungan, dimana Perusahaan diberi peringkat berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan seperti pengelolaan air, udara, limbah B3 serta inovasi sosial dan efisiensi energi. Selama ini kegiatan tersebut dari Kementerian Lingkungan Hidup dilimpahkan ke Provinsi masing – masing untuk melakukan penilaian tetapi karena adanya perubahan peraturan sehingga di Tahun 2025 dari DLH



Provinsi sudah melimpahkan kewenangannya kepada DLH Kabupaten untuk melakukan penilaian PROPER terhadap usaha dan/atau kegiatan yang masuk PROPER. Di Kabupaten Sikka usaha dan/atau kegiatan yang sudah dilakukan penilaian PROPER ada 2 yaitu PLTMG dan PT. Pertamina (Persero).

Pada pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota terdapat 3 permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a) Masih banyak lokasi usaha dan/atau kegiatan yang letaknya jauh (diluar kota) tidak dapat diawasi karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu perlunya alokasi dana agar dapat dilakukan pengawasan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah berizin maupun yang belum berizin yang letaknya jauh dari kota.
- b) Kurang adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara instansi terkait dengan Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan dalam kaitan dengan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu perlunya koordinasi dan komunikasi yang baik antara instansi terkait dengan Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan dalam kaitan dengan pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan.
- c) Terbatasnya sumber daya manusia untuk melakukan pemantauan di setiap usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena itu perlu adanya penambahan sumber daya manusia untuk melakukan pemantauan di setiap usaha dan/atau kegiatan.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Alokasi anggaran sebesar Rp.677.844.856,- realisasi Rp.661.641.264,- atau 97,76%, dengan kegiatan:

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sikka, alokasi anggaran sebesar Rp.677.844.856,- realisasi Rp.661.641.264,- atau 97,76%, dengan sub kegiatan:
 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), alokasi anggaran sebesar Rp.603.287.456,- realisasi Rp.588.562.864,- atau 97,56%.

Beberapa hasil beberapa hasil kegiatan RTH yang dilakukan :

- 1.) Terbentuknya Taman baru Simpang Lima lingkaran luar melalui kegiatan penanaman bibit tanaman di median jalan simpang lima lingkaran luar yang diprakarsai oleh Keuskupan Agung Maumere dan beberapa Sekolah Dasar



- yang berada di Kota Maumere yang berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.
- 2.) Adanya kegiatan bersih – bersih sampah di Taman Tsunami hasil kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam Aksi Peduli Lingkungan.
 - 3.) Melakukan Rehabilitasi atau pemulihan area yang terbengkalai menjadi area penghijauan lainnya.
 - 4.) Adanya penurunan Suhu di beberapa lokasi/lingkungan yang berdekatan dengan Taman kota.
 - 5.) Ada beberapa lokasi Taman yang digunakan masyarakat untuk berolahraga dan berekreasi.
 - 6.) Adanya kolaborasi dari masyarakat dan pihak swasta lainnya bersama DLH Kabupaten Sikka dalam kegiatan penghijauan taman.
 - 7.) Terlaksananya kegiatan penanaman Mangrove di area pesisir pantai untuk penghijauan hasil kolaborasi antara DLH Sikka dan PLN UPT Maumere.

Pemeliharaan di taman - taman RTH dilakukan secara rutin setiap hari kerja. Tanaman – tanaman yang ada bertumbuh semakin besar dan hijau serta sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat rekreasi. Kegiatan pengawasan di seluruh taman RTH dilakukan sekali dalam seminggu. Hasil dari pengawasan ini ditemukan ada beberapa tanaman / vegetasi di setiap taman – taman RTH mengalami kerusakan akibat perubahan iklim dan pengrusakan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa tanaman yang sengaja di potong, dicabut dan dibiarkan begitu saja bahkan sampai dicuri. Kendala atau hambatan lain yang dialami oleh bidang yaitu:

- ✓ Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pekerjaan.
- ✓ Waktu dan lokasi kerja yang masih Fleksibel dimana selalu ada perubahan mendadak ketika berada di lokasi kerja.
- ✓ Kurangnya Dana untuk Pengelolaan Taman.
- ✓ Minimnya pekerja Taman dan pengetahuan dalam pengelolaan RTH Taman.

Adapun sejumlah upaya yang dilakukan oleh Bidang Tata Lingkungan untuk mengatasi kendala / masalah terkait RTH Taman yaitu dengan cara:

- ✓ Berkolaborasi dengan pihak Swasta atau Stakeholder lainnya dalam pengelolaan RTH Taman.
- ✓ Mengajak pihak Swasta atau Stakeholder lainnya untuk membantu dalam pemberian dana CSR.



- ✓ Membuat jadwal kerja untuk pekerja taman.
- ✓ Membentuk tim pengawas lapangan untuk mengontrol pekerjaan para pekerja taman di lapangan.
- ✓ Mengusulkan tambahan dana untuk pengelolaan RTH Taman ketika ada perubahan Anggaran Belanja Dinas.

Solusi kedepan untuk Pengelolaan RTH Taman yakni :

- ✓ Perlu adanya tambahan Dana dalam Pengelolaan RTH Taman.
- ✓ Perlu adanya tambahan Sarana dan Prasarana penunjang pekerjaan.
- ✓ Perlu adanya pelatihan atau studi banding ke Kota lainya dalam hal pengelolaan RTH Taman.
- ✓ Meningkatkan kerja sama dengan pihak Swasta atau Stakeholder lainya dalam pengelolaan RTH Taman.

Pendataan yang dihasilkan dari kegiatan Ruang Terbuka Hijau berupa 16 taman dengan Luas keseluruhan : 73.686 m² sesuai dengan SK Bupati Sikka Nomor 35 / HK / 2025 Tentang Penetapan RTH dan Taman Kota Sebagai Ruang Publik (*Lampiran 13*)

- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp.74.557.400,- realisasi Rp.74.078.400,- atau 99,36%.

Dalam kegiatan ini ada beberapa proses kegiatan yang dilakukan Bidang Tata Lingkungan yaitu :

- ✓ Menentukan titik lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan kegiatan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya.
- ✓ Melakukan survey terhadap lokasi yang telah ditentukan untuk melaksanakan kegiatan.
- ✓ Melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau kelompok KPSA yang sudah terbentuk melalui Desa/Kelurahan tempat lokasi kegiatan dilaksanakan.
- ✓ Berkolaborasi bersama Pemerintah Desa/Kelurahan untuk membentuk kelompok KPSA baru disekitar lokasi kegiatan.
- ✓ Menentukan Bibit Tanaman yang akan ditanam di lokasi kegiatan untuk kelompok KPSA yang mendapatkan MOU untuk melakukan kegiatan ini.
- ✓ Menyiapkan Dana Operasional untuk kelompok KPSA dalam melakukan kegiatan ini.
- ✓ Menentukan jadwal Penanaman Bibit Tanaman di setiap Lokasi yang telah ditentukan.



- ✓ Melakukan proses Penanaman Bibit bersama kelompok KPSA dan Pemerintah Desa/Kelurahan di setiap lokasi.

Yang menjadi sasaran kegiatan Konservasi Mata Air adalah daerah di sekitar sumber mata air dan masyarakat yang dibentuk dalam kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA). Dari hasil kegiatan yang dilakukan Bidang Tata Lingkungan ada 4 KPSA yang berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan ini yaitu :

- ✓ Kelompok KPSA Desa Ilinmedo
- ✓ Kelompok KPSA Desa Tanah Rawa
- ✓ Kelompok KPSA Desa Runut
- ✓ Kelompok KPSA Kelurahan Wuring

Tanaman yang akan di tanam di setiap lokasi kegiatan merupakan tanaman pelindung yang dapat menghasilkan Air dan menambah debit air di Mata Air. Adapun jenis tanaman yang akan ditanam antara lain ; Pohon Beringin, Pala, Trambesi dan Ara.

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam kegiatan ini yaitu :

- ✓ Minimnya Anggaran sehingga tidak bisa menjangkau banyak lokasi Mata Air untuk melaksanakan kegiatan.
- ✓ Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung untuk melaksanakan kegiatan ini.
- ✓ Kurangnya kesadaran masyarakat maupun kelompok KPSA di sekitar Lokasi kegiatan untuk terlibat dalam kegiatan ini.
- ✓ Minimnya tempat Penangkar Bibit Tanaman.
- ✓ Belum ada jadwal berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan ini dikarenakan tidak ada Anggaran untuk perawatan Bibit tanaman dan pengelolaan kegiatan ini.
- ✓ Belum ada program kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya.
- ✓ Masih ditemukan masyarakat atau kelompok KPSA yang belum sadar akan pentingnya kegiatan ini dan hanya mementingkan Uang atau Dana yang dihasilkan dari kegiatan ini.

Upaya – upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini Bidang Tata Lingkungan untuk mengatasi masalah yang dihadapi antara lain :

- ✓ Merencanakan Anggaran untuk kegiatan ini dalam RAK Tahunan Bidang.
- ✓ Mengusulkan tambahan Anggaran untuk kegiatan ini ketika ada Perubahan Anggaran Tahunan Dinas.



- ✓ Melakukan sosialisasi akan pentingnya kegiatan ini kepada masyarakat ataupun kelompok KPSA melalui Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
- ✓ Mencari alternatif lain dalam menutupi kekurangan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan.
- ✓ Membentuk Tim di Bidang dalam pelaksanaan kegiatan.
- ✓ Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi bersama kelompok KPSA dan Pemerintah Desa/Kelurahan di setiap lokasi kegiatan.
- ✓ Mengajak pihak Swasta maupun Stakeholder lainnya untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan ini baik secara Material maupun Imaterial.

Solusi yang dilakukan Bidang Tata Lingkungan dalam menghadapi setiap kendala/masalah yang didapati dari kegiatan ini yaitu :

- ✓ Meminimalisir segala kendala/masalah yang dihadapi di lapangan pada saat melaksanakan kegiatan.
- ✓ Lebih proaktif dalam memberikan Sosialisasi akan pentingnya kegiatan ini.
- ✓ Lebih proaktif dalam berkolaborasi dengan pihak Swasta atau Stakeholder lainnya dalam melaksanakan kegiatan ini.
- ✓ Melakukan pendampingan terhadap kelompok KPSA yang melaksanakan kegiatan ini dalam hal pemahaman terhadap jenis tanaman, cara merawatnya, manfaat tanaman yang ditanam dan pengetahuan tentang kegiatan ini.
- ✓ Mempertahankan Anggaran yang tersedia agar tidak dihilangkan ketika adanya perubahan Anggaran dalam tahun berjalan.

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Alokasi anggaran sebesar Rp.18.471.900,- realisasi Rp.18.430.316,- atau 99,77%, dengan kegiatan:

- Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.18.471.900,- realisasi Rp.18.430.316,- atau 99,77%, dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan, alokasi anggaran Rp. 18.471.900,- realisasi Rp.18.430.316,- atau 99,77%.
- Dana ini digunakan untuk Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Kupang) untuk melakukan koordinasi menyangkut pengelolaan limbah B3 yang bukan kewenangan Kabupaten yaitu dalam pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan tetapi merupakan kewenangan Provinsi sebanyak 1 (satu) kali koordinasi. Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah dalam rangka monitoring



dan evaluasi sumber-sumber penghasil B3 dan limbah B3 seperti bengkel-bengkel mobil/motor, rumah sakit, puskesmas, pltd dll sebanyak 24 kali monitoring

Dalam penyelenggaraan di tahun 2025 Kegiatan Limbah B3 menyelenggarakan monitoring dan pengawasan dengan kelompok sasaran adalah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 seperti Objek Vital Negara, usaha Bengkel, Salon, Pengolahan Ikan, Usaha Tahu Tempe, Rumah Makan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Puskesmas. Fokus kegiatan ini untuk mengedukasi masyarakat dan para pelaku usaha tentang penanganan Limbah B3.

Kegiatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) mempunyai tugas melakukan pendataan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dalam penyelenggaraan di tahun 2025 Kegiatan Limbah B3 menyelenggarakan monitoring dan pengawasan dengan kelompok sasaran adalah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 seperti Objek Vital Negara, usaha Bengkel, Salon, Pengolahan Ikan, Usaha Tahu Tempe, Rumah Makan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Puskesmas. Fokus kegiatan ini untuk mengedukasi masyarakat dan para pelaku usaha tentang penanganan Limbah B3.

Dalam kegiatan monitoring dan pengawasan Limbah B3, masyarakat maupun pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 mengharapkan kegiatan seperti ini perlu dilakukan agar masyarakat ataupun pengusaha dapat memahami tentang pengelolaan limbah B3. Pada kegiatan tersebut mengarahkan kepada masyarakat maupun pelaku usaha untuk mengelolah sampah khususnya sampah limbah B3 untuk diolah atau dilakukan penanganan secara baik sesuai dengan jenis usaha dan/atau kegiatan. Seperti menyediakan TPS Limbah B3, IPAL, Sumur Resapan dan lain-lain.

Dalam penyelenggaraan di tahun 2025 selain melakukan kegiatan kegiatan monitoring dan pengawasan juga memberikan Rekomendasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3. Beberapa rekomendasi yang diberikan berupa Rekomendasi IPAL dan TPS Limbah B3.

Sesuai dengan data yang ada jumlah tempat usaha yang menghasilkan limbah B3 sampai dengan periode 2023 yang sudah diinventarisir sebanyak 119 tempat usaha. Yang sudah mengurus rekomendasi tempat penyimpanan sementara limbah b3 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 15 tempat usaha. Tahun 2019 sebanyak 4 rekomendasi (3,36%), tahun 2020 sebanyak 6 remonedasi (5,04%), tahun 2021 sebanyak 1 rekomendasi (0,84%), tahun 2022 sebanyak 4 rekomendasi (3,36%), tahun 2023 sebanyak 5 rekomendasi (4,20%),



tahun 2024 sebanyak 10 rekomendasi (8,40%), dan tahun 2025 sebanyak 1 rekomendasi (0,84%). Secara akumulatif dari 2019 sampai dengan tahun 2025 sebanyak 31 rekomendasi (26,05%). Dilihat dari persentase pengurusan rekomendasi Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari tahun 2019 sampai dengan 2025 masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 untuk mengurus rekomendasi Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Tahun Anggaran 2025 melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Penanganan Sampah dan Limbah B3. Kegiatan pengurangan sampah melakukan monitoring kaitan dengan pemilahan jenis sampah di kelompok ataupun masyarakat. Sejauh ini masih banyak masyarakat yang belum melakukan pemilihan sampah dari sumber sampah baik itu sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Hal ini dibuktikan masih banyak volume sampah yang sebenarnya bisa didaur ulang masih masuk atau dibuang ke TPA. Kegiatan monitoring yang berkaitan dengan penagihan retribusi sampah, pengangkutan dan penanganan sampah di lokasi TPA. Selama pelaksanaan monitoring masih banyak pelanggan retribusi yang enggan membayar retribusi persampahan dan masih banyak tumpukan-tumpukan sampah yang masih berserakan. Hal ini karena pelayanan pengangkutan sampah belum maksimal dan ketersediaan prasarana penanganan sampah yang masih minim/terbatas. Kegiatan monitoring penanganan Limbah B3 dilakukan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3. Selama kegiatan monitoring masih ada usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah b3 yang belum dikelola dengan baik seperti di bengkel-bengkel mobil dan motor. Untuk saat ini pengangkutan limbah B3 di arahkan untuk di angkut oleh pihak ketiga (vendor) untuk pengolahan limbah B3 tersebut.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Alokasi anggaran sebesar Rp.18.827.900,- realisasi Rp.18.272.606,- atau 97,05%, dengan kegiatan:

- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.18.827.900,- realisasi Rp.18.272.606,- atau 97,05%, dengan sub kegiatan:
 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan



Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, alokasi anggaran sebesar Rp.18.827.900,- realisasi Rp.18.272.606,- atau 97,05%.

Kegiatan ini menyorot pada pemrakarsa yang usaha dan/atau kegiatannya telah memiliki Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan yang Izin Lingkungan Hidup, izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka untuk menilai tingkat kepatuhan pemrakarsa dalam pengelolaan lingkungan sesuai poin – poin yang tertera pada Dokumen Lingkungan. Namun dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan juga dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan untuk diarahkan agar segera mengurus Dokumen Lingkungan sehingga dapat melakukan pengelolaan lingkungan sesuai Dokumen Lingkungan yang dikeluarkan. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang melanggar aturan pada poin – poin yang tertera pada Dokumen Lingkungan maupun ditemukan pengelolaan lingkungan yang kurang baik akan dilakukan pembinaan dan edukasi di lapangan dan upaya penegakan hukum.

Selama periode Januari sampai Desember 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka melalui bidang Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, telah melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebanyak 86 usaha dan/atau kegiatan (*Lampiran 14*) terdiri dari :

- ❖ 33 usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan
- ❖ 53 usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan.

Hasil dari pengawasan usaha dan/atau kegiatan diatas dikategorikan TAAT dan TIDAK TAAT bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan dan kegiatan yang tidak beroperasi maupun belum beroperasi, sedangkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan dikategorikan TIDAK TAAT dalam pengelolaan lingkungan, dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ TAAT : 13 usaha dan/atau kegiatan
- ❖ TIDAK TAAT : 71 usaha dan/atau kegiatan
 - Memiliki Dokumen : 18 usaha dan/atau kegiatan
 - Tidak memiliki Dokumen : 53 usaha dan/atau kegiatan
- ❖ Belum beroperasi : 1 usaha dan/atau kegiatan
- ❖ Tidak beroperasi : 1 usaha dan/atau kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring pengawasan, adanya upaya penegakan hukum terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan



pelanggaran terhadap poin – poin yang tertera dalam Dokumen Lingkungan dan ditemukan pengelolaan lingkungan yang tidak baik bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan dengan dikeluarkannya surat teguran tertulis.

Hambatan/ Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan ini yaitu :

- Ketidaktaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap poin – poin pengelolaan lingkungan yang terdapat pada Dokumen Lingkungan
- Kurangnya kesadaran dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan untuk segera mengurus Dokumen Lingkungan
- Kurang adanya koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Wilayah dan Aparat Penegak Hukum dalam kaitan dengan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan.

Adapun upaya pemecahan solusi yang dilakukan yaitu:

- Dilakukan penegakan hukum berupa sanksi administratif bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
- Tim Pengawasan langsung ke lokasi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan dengan membawa formulir pengurusan Dokumen Lingkungan serta menjelaskan kepada pemrakarsa
- Melakukan rapat koordinasi lintas sektor (Polres Sikka, Polsek setempat, ESDM, Dinas Kesehatan) terkait pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Alokasi anggaran sebesar Rp.122.732.400,- realisasi Rp.121.073.378,- atau 98,65%, dengan kegiatan:

- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.122.732.400,- realisasi Rp.121.073.378,- atau 98,65%, dengan sub kegiatan:

- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, alokasi anggaran sebesar Rp.83.742.900,- realisasi Rp.82.178.779,- atau 98,13%.

Pelaksanaan sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup selama Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut :



- a. Penilaian dan Pemberian Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2025
- b. Penilaian dan Pemberian Penghargaan Lomba Kebersihan Lingkungan antar Kelurahan Tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2025
- c. Penghijauan di daerah sumber air (Bendungan Napungete) pada area Green Belt melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA).

Adapun rincian pelaksanaan sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup antara lain sebagai berikut :

Kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2025

Program Adiwiyata merupakan program kerja yang bertujuan untuk mendorong dan membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan dengan mengarahkan partisipasi komunitas sekolah dalam melaksanakan upaya pelestarian lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Adapun tahapan pelaksanaan penilaian antara lain :

- a. Penentuan calon sekolah adiwiyata
Calon sekolah adiwiyata yang akan dilakukan penilaian sebanyak 10 sekolah yaitu SMP Seminari Bunda Segala Bangsa Maumere, SMPK Frater Maumere, SMAN 1 Maumere, SMASK Bhaktiarsa, SMKSK Yohanes XXIII Maumere, SMPK Virgo Fidelis Maumere, SMPN I Maumere, SMPK Binawirawan Maumere, SMKN I Maumere SMAKS Jhon Paul II.
- b. Persiapan Penilaian Sekolah Adiwiyata
Dalam persiapan penilaian sekolah adiwiyata, tim melakukan rapat pembahasan mengenai format penilaian dan aspek – aspek penilaian. Adapun aspek – aspek penilaian antara lain :
 - ✓ Kebijakan Berwawasan Lingkungan
 - ✓ Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan
 - ✓ Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif
 - ✓ Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan
- c. Pelaksanaan Penilaian Sekolah Adiwiyata
Pengambilan informasi dan data visual lapangan terhadap calon penerima penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten sikka Tahun 2025



dilakukan pada 8 sekolah calon penerima penghargaan adiwiyata yaitu SMPK Frater Maumere, SMAN 1 Maumere, SMASK Bhaktiarsa, SMKSK Yohanes XXIII Maumere, SMPK Virgo Fidelis Maumere, SMPN I Maumere, SMPK Binawirawan Maumere, dan SMKN I Maumere.

d. Evaluasi Penilaian Sekolah Adiwiyata dan Penetapan Juara

Evaluasi penilaian dan penentuan juara penerima penghargaan sekolah adiwiyata Kabupaten Sikka Tahun 2025 dilakukan kepada 8 calon sekolah penerima penghargaan sekolah adiwiyata dari 10 calon sekolah yang ditetapkan karena 2 sekolah menyatakan mengundurkan diri dari penilaian sekolah adiwiyata. Adapun mekanisme penilaian yaitu tim mengisi format penilaian dari hasil pengambilan informasi dan wawancara serta visual lapangan kemudian dihitung skornya. Dari hasil penilaian didapatkan pemenang sekolah adiwiyata yaitu :

- ✓ Juara I : SMPK Frater Maumere
- ✓ Juara II : SMASK Bhaktiarsa Maumere
- ✓ Juara III : SMK Negeri I Maumere

e. Pemberian penghargaan Sekolah Adiwiyata

Pemberian penghargaan sekolah adiwiyata dilakukan saat upacara resmi Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Pemberian penghargaan kepada pemenang Sekolah Adiwiyata berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 363/HK/2025 yaitu :

- ✓ Juara I : SMP Katolik Frater Maumere, mendapatkan piagam penghargaan dan uang tunai sebesar Rp 5.000.000
- ✓ Juara II: SMA Swasta Katolik Bhaktyarsa Maumere, mendapatkan piagam penghargaan dan uang tunai sebesar Rp 4.000.000
- ✓ Juara III : SMK Negeri I Maumere, mendapatkan piagam penghargaan dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000

 Kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Lomba Kebersihan Lingkungan antar Kelurahan Tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2025

Lomba Kebersihan Lingkungan merupakan salah satu bentuk implementasi dari program Adipura di tingkat yang lebih kecil di tingkat kelurahan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan diwilayah masing-masing.

Tujuan Kegiatan :

- ✓ Meningkatkan kesadaran lingkungan



- ✓ Membudayakan hidup sehat
- ✓ Memupuk gotong royong
- ✓ Menciptakan lingkungan asri

a. Persiapan Penilaian

Tim melakukan rapat pembahasan mengenai format penilaian dan aspek – aspek penilaian. Ada 6 konsep yang dinilai yakni :

- ✓ Aspek Kebijakan
- ✓ Mengerakan Partisipasi
- ✓ Sarana dan Prasarana
- ✓ Kerjasama
- ✓ Monitoring dan Evaluasi
- ✓ Tingkat Kesadaran Masyarakat

Kriteria, Indikator dan Skala nilai capaian kinerja di Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau menurut Lampiran II Permen LHK RI Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 : Lokasi : Pemukiman menengah dan sederhana ; area permukiman, drainase, ruang terbuka hijau, pelayanan pengumpulan sampah, pemilahan sampah, kegiatan pengomposan, peran serta masyarakat.

b. Pelaksanaan Penilaian

Pengambilan informasi dan data visual lapangan terhadap calon penerima penghargaan lomba kebersihan lingkungan antar kelurahan tingkat kabupaten dilakukan di 13 Kelurahan kota yaitu Kelurahan Wailiti, Kelurahan Nangameting, Kelurahan Nangalimang, Kelurahan Hewuli, Kelurahan Beru, Kelurahan Kabor, Kelurahan Madawat, Kelurahan Wolomarang, Kelurahan Wuring, Kelurahan Kota Uneng, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Waioti, Kelurahan Wairotang. Adapun mekanisme pengambilan informasi dan data visual lapangan yaitu : - Tim melakukan wawancara dengan Pemerintah Kelurahan - Tim melakukan monitoring pengambilan data visual seluruh wilayah kelurahan

c. Evaluasi Penilaian dan Penetapan Juara

Adapun mekanisme penilaian yaitu tim mengisi format penilaian dari hasil pengambilan informasi dan wawancara serta visual lapangan kemudian dihitung skornya. Dari hasil penilaian didapatkan pemenang lomba kebersihan lingkungan antar kelurahan tingkat kabupaten yaitu : Juara I : Kelurahan Wailiti Juara II : Kelurahan Waioti Juara III : Kelurahan Nangalimang

d. Pemberian penghargaan Lomba Kebersihan Lingkungan



Pemberian penghargaan Lomba Kebersihan Lingkungan antar Kelurahan Tingkat Kabupaten Tahun 2025 dilakukan saat upacara resmi Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Pemberian penghargaan kepada pemenang Lomba Kebersihan Lingkungan antar Kelurahan Tingkat Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 364/HK/2025 yaitu :

- ✓ Juara I : Kelurahan Wailiti, mendapatkan piagam penghargaan dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000
- ✓ Juara II : Kelurahan Waioti, mendapatkan piagam penghargaan dan uang tunai sebesar Rp 2.000.000
- ✓ Juara III : Kelurahan Nangalimang, mendapatkan piagam penghargaan dan uang tunai sebesar Rp 1.500.000

 Kegiatan Penghijauan di daerah sumber air (Bendungan Napungete) pada area Green Belt melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA)

Penghijauan adalah kegiatan atau aktivitas pemulihan, pemeliharaan, serta peningkatan kembali kondisi lahan supaya dapat bermanfaat secara optimal sesuai dengan fungsinya. Peningkatan kondisi lahan tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan menanam pohon. Hal tersebut umum dilakukan sebagai respon terhadap kondisi lingkungan yang memburuk, sehingga perlu dilakukan penanaman guna ‘menghijaukan’ kembali. Penanaman dilakukan di area sekitar Bendungan Napungete. Adapun tujuannya yaitu untuk menjaga fungsi ekologis dan hidrologis area sekitar waduk, mencegah banjir, erosi, dan longsor dengan memperkuat tanah oleh akar tanaman, serta melestarikan kualitas air dan lingkungan, menciptakan zona penyangga (sabuk hijau) yang bermanfaat bagi pengaturan tata air, pencegahan pencemaran, dan peningkatan keasrian lingkungan agar lebih sehat dan nyaman.

a. Tahap Penyediaan Anakan Tahapan kegiatan dari awal yaitu penyiapan anakan oleh KPSA yaitu KPSA Desa Ilin Medo, KPSA Desa Tanarawa dan KPSA Desa Werang. Penyediaan anakan meliputi :

- ✓ KPSA Ilinmedo yaitu Bambu sebanyak 210 anakan dan Enau Hutan sebanyak 100 anakan
- ✓ KPSA Desa Tanarawa yaitu Bambu sebanyak 211 anakan dan Enau Hutan sebanyak 100 anakan
- ✓ KPSA Desa Werang yaitu Bambu sebanyak 211 anakan dan Enau Hutan sebanyak 100 anakan

Selama proses penyiapan anakan, Tim dari Dinas Lingkungan Hidup melakukan monitoring pemantauan perkembangan anakan secara berkala.



b. Pelaksanaan Penanaman Anakan Bambu dan Enau Hutan

Kegiatan penanaman anakan Bambu dan Enau Hutan di area Green Belt Bendungan Napungete diawali dengan kegiatan pembukaan yang bertempat di Pustu Enak Ter. Kegiatan dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan Waiblama, Pemerintah Desa Ilin Medo, Pemerintah Desa Tanarawa dan Pemerintah Desa Werang, Tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan ke - 3 Anggota KPSA. Adapun susunan kegiatan meliputi arahan teknis dari Kepala Bidang Pinaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta sambutan dan sekaligus membuka kegiatan penanaman oleh Camat Waiblama.

KPSA Desa Ilin Medo bersama tim dari DLH melakukan penanaman di lokasi Wairnitun, KPSA Desa Tanarawa bersama tim dari DLH melakukan penanaman di lokasi Wuabahang, KPSA Desa Werang bersama tim dari DLH melakukan penanaman di lokasi Teranghe.

Dalam pelaksanaan kegiatan, realisasi tidak mencapai target karena sebagai berikut :

- ✓ Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penanaman anakan bambu dan enau hutan yang seharusnya mencakup 4 KPSA yang ada di Kecamatan Waiblama, namun hanya 3 KPSA yang terlibat karena KPSA Natarmage tidak bersedia melakukan pembibitan anakan
- ✓ Kegiatan penghijauan yang melibatkan KPSA Desa Iligai (Puho) Kecamatan Lela yang rencananya bersumber dari Pokir Ibu Linda tidak terlaksana karena rasionalisasi anggaran.

- Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup, alokasi anggaran sebesar Rp.38.989.500,- realisasi Rp.38.894.599,- atau 99,75%.

Pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup selama Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup tingkat Sekolah Dasar

Kegiatan penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup tingkat sekolah dasar dengan mengusung tema “Penanganan Sampah Plastik sebagai Solusi terhadap Pencemaran Lingkungan” berkolaborasi dengan Yayasan Flores Children Development (FREN) dan Komunitas Youth Voice Now sebagai narasumber. Kegiatan ini dilaksanakan di 6 sekolah tingkat SD yaitu :

- ✓ SDN Inpres LXXIX Manunai
- ✓ SD Inpres Beru



- ✓ SDI LXXVI Wairklau
- ✓ SDN Wailiti
- ✓ SDI CIII Wolomarang
- ✓ SD Inpres Maumere (Bertingkat)

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 6 hari. Siswa – siswi yang dilibatkan yaitu perwakilan dari masing – masing tingkatan kelas (kelas 3 – 6) dengan total peserta sebanyak 30 orang. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya anak – anak di tingkat Sekolah Dasar untuk memahami mengenai sampah dan pengelolaan sampah khususnya sampah plastik serta mengurangi penggunaan plastik di lingkungan sekolah. Sebagai bentuk penyuluhan tidak langsung, setiap sekolah dipasangkan banner ajakan membudayakan lingkungan sekolah bebas sampah plastik agar setiap siswa dapat menerapkannya

Materi Penyuluhan

- ✓ Pengenalan jenis-jenis sampah (organik dan anorganik)
- ✓ Dampak negatif sampah bagi lingkungan dan Kesehatan
- ✓ Pentingnya memilah sampah
- ✓ Cara mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), dan mendaur ulang (recycle) sampah.

Metode Pelaksanaan

- ✓ Penyampaian materi melalui presentasi
- ✓ Menayangkan video edukatif terkait sampah
- ✓ Evaluasi pemahaman siswa melalui kuis atau permainan interaktif

a. SDN Inpres LXXIX Manunai

- ✓ Kegiatan penyuluhan lingkungan pada SDN Inpres LXXIX Manunai dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025, diawali dengan Sambutan dari Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan penyuluhan lingkungan
- ✓ Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sebanyak 30 orang - Pemberian materi mengenai sampah dan kuis dilakukan oleh fasilitator dari Yayasan FREN dan Komunitas Youth Voice Now

b. SDI CIII Wolomarang

- ✓ Kegiatan sosialisasi pada SDI CIII Wolomarang dilaksanakan pada tanggal



19 September 2025, diawali dengan Sambutan dari Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan sosialisasi

- ✓ Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sebanyak 30 orang
- ✓ Pemberian materi mengenai sampah dan kuis dilakukan oleh fasilitator dari Yayasan FREN dan Komunitas Youth Voice Now

b. SD Inpres LXXVI Wairklau

- ✓ Kegiatan penyuluhan lingkungan pada SD Inpres LXXVI Wairklau dilaksanakan pada tanggal 23 September 2025, diawali dengan Sambutan dari Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan sosialisasi
- ✓ Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sebanyak 30 orang
- ✓ Pemberian materi mengenai sampah dan kuis dilakukan oleh fasilitator dari Yayasan FREN dan Komunitas Youth Voice Now

c. SD Inpres Maumere (Bertingkat)

- ✓ Kegiatan penyuluhan lingkungan pada SD Inpres Maumere (Bertingkat) dilaksanakan pada tanggal 24 September 2025, diawali dengan Sambutan dari Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan sosialisasi
- ✓ Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sebanyak 30 orang
- ✓ Pemberian materi mengenai sampah dan kuis dilakukan oleh fasilitator dari Yayasan FREN dan Komunitas Youth Voice Now

d. SD Inpres Beru

- ✓ Kegiatan penyuluhan lingkungan pada SD Inpres Beru dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025 diawali dengan Sambutan dari Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Sambutan dari Guru yang mewakili Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan sosialisasi
- ✓ Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sebanyak 30 orang
- ✓ Pemberian materi mengenai sampah dan kuis dilakukan oleh fasilitator dari Yayasan FREN dan Komunitas Youth Voice Now



e. SDN Wailiti

- ✓ Kegiatan penyuluhan lingkungan pada SDN Wailiti dilaksanakan pada tanggal 26 September 2025, diawali dengan Sambutan dari Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan sosialisasi
- ✓ Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sebanyak 30 orang
- ✓ Pemberian materi mengenai sampah dan kuis dilakukan oleh fasilitator dari Yayasan FREN dan Komunitas Youth Voice Now

2) Pemasangan Papan Himbauan Informasi Lingkungan Hidup

Pemasangan papan himbauan informasi lingkungan hidup merupakan salahsatu kegiatan penyuluhan tidak langsung yang berguna untuk memberikan edukasi kepada masyarakat maupun himbauan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemasangan papan himbauan informasi lingkungan hidup dilakukan di 12 titik lokasi antara lain :

- ✓ Pemasangan Papan Himbauan terkait perlindungan mangrove di Desa Woda Mude Kecamatan Magepanda
- ✓ Pemasangan Papan Himbauan terkait larangan pembakaran lahan di Desa Kolisia A Kecamatan Magepanda
- ✓ Pemasangan Papan Himbauan terkait larangan pembakaran lahan di Desa Kolisia B Kecamatan Magepanda
- ✓ Pemasangan Papan Himbauan terkait pengambilan mineral batuan di Desa Aibubu Kecamatan Paga
- ✓ Pemasangan Papan Himbauan terkait pengambilan mineral batuan di Desa Wolowiro Kecamatan Paga
- ✓ Pemasangan Papan Himbauan terkait larangan pembuangan sampah di Jalan Lingkar Luar Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok
- ✓ Pemasangan Papan Himbauan terkait larangan pembuangan sampah di Kali Wairklau Kelurahan Madawat Kecamatan Alok
- ✓ Pemasangan Papan Himbauan terkait perlindungan daerah mata air di Desa Tanarawa Kecamatan Waiblama
- ✓ Pemasangan Papan Himbauan terkait larangan pembakaran lahan di Desa Hoder Kecamatan Waigete
- ✓ Pemasangan Papan Himbauan terkait larangan Pengambilan Mineral Batuan Tanpa Izin di Napunseda Desa Namangkewa Kecamatan Kangae
- ✓ Pemasangan Papan Himbauan terkait Perlindungan Mangrove di Kampung Garam RT.005 Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok



- ✓ Pemasangan Papan Himbauan terkait larangan pembuangan sampah di Jalan Rokatenda Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok

Adapaun hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :

- Kurangnya persiapan dari sekolah untuk pelaksanaan penilaian sekolah adiwiyata serta terdapat pergantian kepemimpinan sehingga kurang koordinasi dari pihak sekolah
- Kondisi cuaca dan jarak yang jauh menyebabkan terkendalanya monitoring perkembangan pembibitan anakan di lokasi penangkaran oleh tim DLH
- Kurangnya kesiapan dari KPSA Natarmage sehingga tidak mampu menyiapkan anakan
- Masyarakat merasa terganggu dengan adanya papan informasi lingkungan hidup yang dipasang sehingga papan himbauan yang telah dipasang di Desa Kolisia B, dibakar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab

Upaya Pemecahan/ Solusi :

- ✓ Berkoordinasi kembali dengan sekolah dan menjadwalkan ulang kegiatan penilaian adiwiyata
- ✓ Membuat grup KPSA agar segala perkembangan pembibitan dapat dilaporkan secara berkala

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran sebesar Rp.32.233.800,- realisasi Rp.31.579.401,- atau 97,97%, dengan kegiatan:

- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.32.233.800,- realisasi Rp.31.579.401,- atau 97,97%, dengan sub kegiatan:
 - Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.26.386.800,- realisasi Rp.25.979.331,- atau 98,46%.

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dilakukan dengan :

- ✓ Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- ✓ Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan



- ✓ Rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan
- ✓ Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan

Selama Tahun Anggaran 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka melalui Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, telah menangani 22 kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari 22 kasus pengelolaan pengaduan, dilakukan penyelesaian sengketa lingkungan dengan melakukan dialog/diskusi bersama pihak – pihak yang terkait sehingga dihasilkan sebuah Berita Acara Kesepakatan sebanyak 7 kasus.

- Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.5.847.000,- realisasi Rp.5.600.070,- atau 95,78%.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan maupun pengaduan, jika ditemukan hal – hal yang tidak sesuai dengan proses pengelolaan lingkungan hidup yang baik maka akan diterapkan sanksi administrasi berupa surat teguran tertulis.

Selama Tahun Anggaran 2025, Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan telah mengeluarkan 44 sanksi administrasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan yang baik. Dalam pelaksanaannya juga dilakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi sebanyak 27 kegiatan.

Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :

- ❖ Terbatasnya informasi mengenai tata cara pengaduan terhadap pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga masih banyak kemungkinan adanya pengaduan lain yang tidak diketahui
- ❖ Rendahnya kesadaran masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran PPLH namun tidak melakukan pengaduan

Oleh karena itu upaya pemecahan/ solusi yang dilakukan yaitu:

- ❖ Melakukan sosialisasi tata cara pengaduan
- ❖ Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



9. Program Pengelolaan Persampahan

Alokasi anggaran sebesar Rp.3.910.336.200,- realisasi Rp.3.728.285.423,- atau 95,34%, dengan kegiatan:

- Pengelolaan Sampah, alokasi anggaran sebesar Rp.3.910.336.200,- realisasi Rp.3.728.285.423,- atau 95,34%, dengan sub kegiatan:

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, alokasi anggaran sebesar Rp.15.468.500,- realisasi Rp.15.300.430,- atau 98,91%.

Dana ini digunakan untuk Sosialisasi Pengelolaan Sampah di 4 (empat) Kelurahan, yaitu Kelurahan Madawat, Kelurahan Kota Uneng, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Nangalimang. Kegiatan dilakuka selama 1 (satu) hari pada masing-masing Kelurahan dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka. Kegiatan sosialisasi persampahan pada tingkat kelurahan merupakan upaya penigkatan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan perangkat kelurahan, RT/RW, tokoh Masyarakat, kader lingkungan serta warga setempat. Materi sosialisasi meliputi kebijakan persampahan, pemilahan sampah dari sumber penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pengurangan sampah plastik serta peran aktif Masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. melalui kegiatan ini diharapkan tercipta perubahan perilaku Masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga, meningkatnya partisipasi warga serta terwujudnya lingkungan yang bersih dan lestari.

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.104.905.900,- realisasi Rp.103.697.044,- atau 98,85%.

Dana ini digunakan untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan berupa motor roda tiga sebanyak 2 unit jenis Viar Karya 200 LNH dan digunakan untuk melakukan pelayanan sampah pada Kelurahan Kota Baru dan kelurahan Kabor.

- Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengelolahan Sampah di Instalasi Pengelolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, alokasi anggaran sebesar Rp.3.789.961.800,- realisasi Rp.3.609.287.949,- atau 95,23%.

Dana ini digunakan untuk pemeliharaan kontener sampah, BBM untuk



kendaraan angkut sampah, belanja Alat Pelindung Diri (APD) Petugas Sampah, belanja suku cadang kendaraan sampah, alat pembersih sampah, honorarium 113 orang tenaga kebersihan pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta biaya pemeliharaan motor roda tiga dan mobil sampah.

Indikator sub kegiatan yaitu jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton). Adapun target sampah yang terangkut pada tahun 2025 yaitu sebanyak 15.350,40 ton dan sampai dengan akhir tahun 2025 terealisasi sebesar 9.892,19 ton (realisasi kinerja 64,44%).

Tidak tercapainya target disebabkan karena banyak penumpukan sampah di tempat penampungan yang disediakan, 3 mobil dump truck mengalami kerusakan sehingga pengangkutan sampah menjadi terhambat. Selain itu kondisi kendaraan Excavator dan Dozer mengalami kerusakan ringan. Banyak tenaga kebersihan yang lolos PPPK tahap 2 optimalisasi dan ditempatkan di instansi lain sehingga tidak menjalankan tugas rutin sebagaimana mestinya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berupaya menambah ritasi pengangkutan sampah untuk menangani timbulan sampah, menggabungkan *shift* pagi dan *shift* siang untuk memaksimalkan pengangkutan sampah. Terkait PPPK optimalisasi telah dikeluarkannya Surat Bupati Sikka Nomor: BKDPSDM.800/871/2025 tanggal 17 November 2025 untuk pemanggilan kembali para PPPK tersebut untuk kembali bertugas.

Selain itu, hasil perhitungan nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Tahun 2025 untuk Kabupaten Sikka belum muncul dikarenakan SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) belum divalidasi oleh provinsi dan KLHK. Data yang diinput ke SIPSN berupa Data Dasar Persampahan, Data Fasilitas Pengelolaan Sampah, Data Kinerja & Kebijakan dan Data Pendukung Lainnya terkait regulasi, kelembagaan, dan kegiatan pengelolaan sampah lainnya. SIPSN belum divalidasi karena masih ada catatan perbaikan terkait data TPA yang masih kurang seperti pengujian air lindi, pengujian udara, dsb.



1. Pengurangan Sampah

Gambar 3.1
Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2025

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH		
	KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	50,884.07
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	0.00
	Persentase pengurangan sampah	0.00
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	0.00
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	0.00
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	0.00
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	1,564.03
	Persentase penanganan sampah	3.07
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan*)	0.00
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
f	Pengolahan	1,564.03
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	1,564.03
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0.00
g	Pemrosesan akhir	11,804.10
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	11,804.10
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	1,564.03
	Persentase sampah terkelola	3.07
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	49,320.04
	Persentase sampah tidak terkelola	96.93

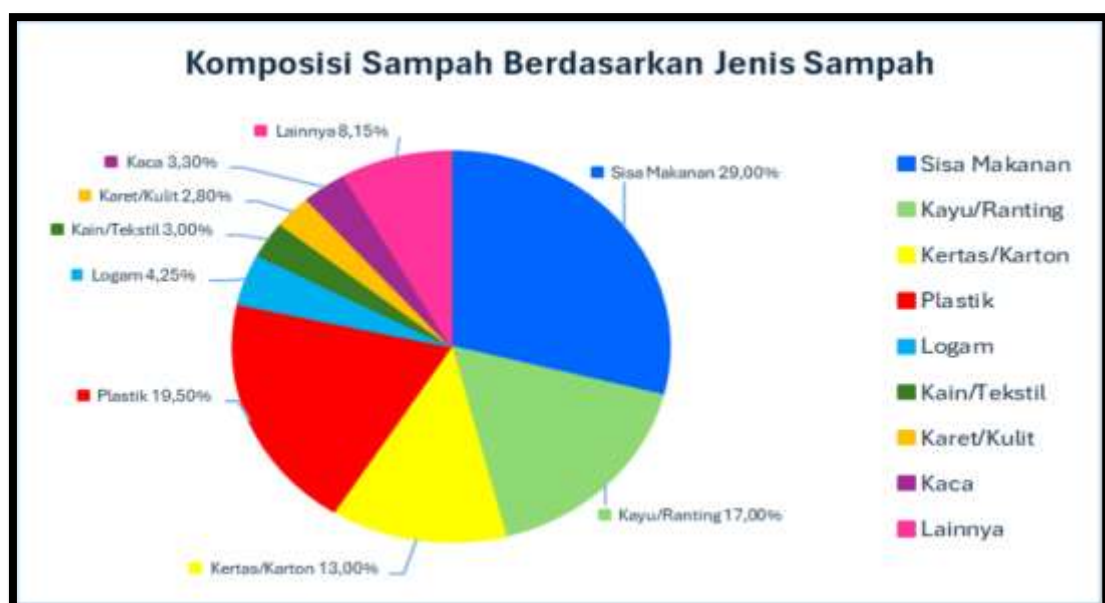
Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/>

Berdasarkan data di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah di Kabupaten Sikka Tahun 2025 mencapai 50.884.07 Ton/Tahun atau 139,40 Ton/Hari yang berasal dari 21 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sikka, dengan trend dari tahun ke tahun semakin meningkat. Upaya pengelolaan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dengan metode pengelolaan yang diterapkan yaitu pengangkutan sampah langsung ke sumber sampah (door to door) ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) serta pengolahan sampah melalui fasilitas sektor informal yang dikelola oleh pihak swasta.

Untuk mengatasi Persoalan sampah dikabupaten Sikka, pendekatan pengelolaan sampah perlu dibangun dengan melibatkan upaya pengurangan sampah oleh produsen, perilaku budaya hidup sadar sampah di Masyarakat dan penanganan sampah oleh pemerintah kabupaten Sikka dengan menitik beratkan pada industrialisasi pengolahan sampah secara professional. Pendekatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah menjadi Langkah kunci untuk membangun pengelolaan sampah berkelanjutan yang memaduserasikan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup serta kesejahteraan sosial Masyarakat.

Selama ini Masyarakat telah terbiasa dengan jargon buang sampah pada tempatnya, padahal hanya dengan membuang sampah pada tempatnya persoalan sampah belum selesai. Undang-undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 12 telah mengamanatkan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi sampah dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. mengingat bahwa hampir 50% jumlah timbulan sampah berasal dari sampah rumah tangga yang mana sangat erat kaitannya dengan gaya hidup dan perilaku Masyarakat sehari-hari, oleh karena itu perlu dibangun literasi baru dalam pengelolaan sampah yakni “Sampahku TanggungJawabku” sebagai filosofi dasar membangun kesadaran dan kepedulian setiap orang dalam urusan sampah.

Gambar 3.2
Komposisi Sampah di Kabupaten Sikka Berdasarkan Jenisnya



Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/>



Berdasarkan diagram komposisi sampah, dapat dijelaskan bahwa komponen terbesar sampah di Kabupaten Sikka adalah sampah organik, yaitu sekitar 36 % dari total timbunan sampah. Sampah organik berasal dari sisa makanan, daun, ranting, serta limbah dapur lainnya yang mudah terurai. Tingginya persentase sampah organik menunjukkan bahwa sebagian besar sampah dapat diolah melalui proses komposting, biokonversi (maggot), Pakan ternak atau biogas.

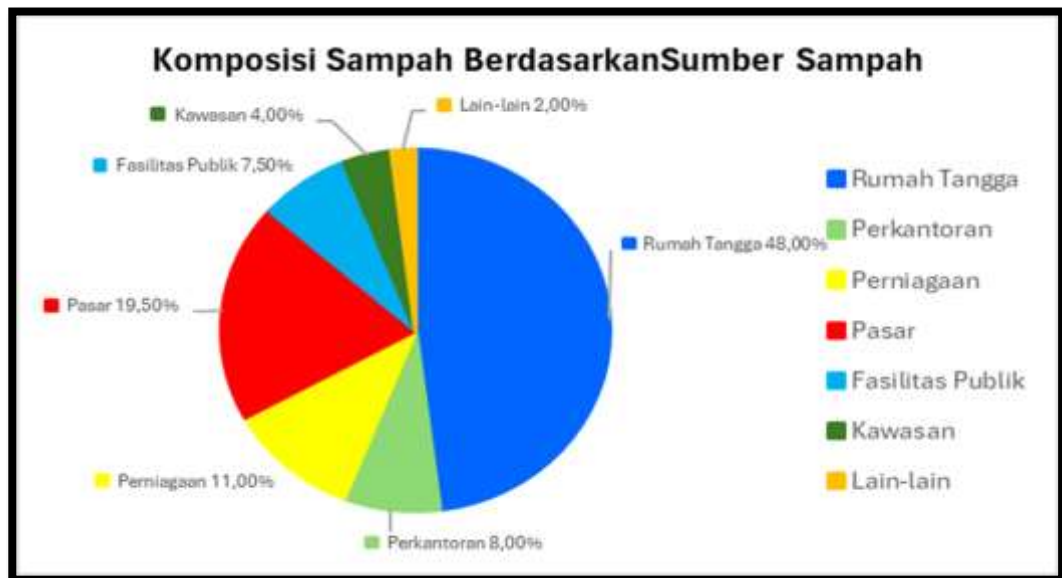
Komponen terbesar kedua adalah sampah plastik dengan proporsi sekitar 19,50%. Sampah plastik didominasi kemasan sekali pakai seperti kantong plastik, botol air minum, dan pembungkus makanan. Karena sifatnya sulit terurai, sampah plastik menjadi penyumbang utama pencemaran lingkungan dan perlu dikelola melalui pemilahan serta proses daur ulang.

Sementara itu, sampah kertas/Karton menyumbang sekitar 13%. Jenis sampah ini relatif mudah didaur ulang menjadi kertas baru atau produk olahan lain, tetapi kualitas daur ulang sangat dipengaruhi oleh kondisi sampah (kering atau terkena air).

Komponen lainnya seperti kaca (3,30%), logam (4,25%), dan kain/tekstil (3%) memiliki persentase yang lebih kecil, namun memiliki nilai ekonomi apabila dipilah dan dijual ke industri daur ulang. Kaca dan logam khususnya memiliki tingkat daur ulang yang tinggi dan dapat digunakan kembali secara berulang. Selain itu, terdapat pula sampah karet dan kulit (2,80%) yang biasanya berasal dari ban bekas, sandal, atau sepatu yang sulit terurai. Terakhir, sampah Lainnya termaksud sampah B3 rumah tangga (<1%) berisi bahan berbahaya seperti baterai bekas, lampu neon, dan obat kedaluwarsa. Meskipun jumlahnya kecil, dampaknya terhadap lingkungan sangat besar sehingga memerlukan penanganan khusus.

Secara keseluruhan, komposisi sampah berdasarkan jenis menunjukkan bahwa lebih dari separuh sampah dapat diolah secara biologis, sementara sisanya dapat didaur ulang atau harus dikelola sebagai residu.

Gambar 3.3
Sumber Sampah di Kabupaten Sikka Berdasarkan Jenisnya



Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/>

Karena lebih dari sekitar 48 % sampah berasal dari rumah tangga ini menunjukkan bahwa aktivitas harian keluarga (memasak, makan, belanja, konsumsi) adalah penyumbang utama sampah. Jadi upaya pengurangan sampah paling efektif seringkali harus dimulai dari rumah tangga seperti memilah sampah, mengurangi kemasan sekali pakai dan kompos sisa makanan.

Sektor perdagangan / perniagaan dan pasar (baik pasar tradisional maupun ritel) bersama-sama menyumbang porsi signifikan (jika digabung 30,50% perdagangan dan pasar). Ini menunjukkan bahwa area komersial/kerja & aktivitas ekonomi juga memproduksi banyak sampah terutama kemasan, sisa jual-beli, bungkus, organik dari makanan dan sebagainya.

Sumbangan dari kantor, fasilitas publik, kawasan umum relatif kecil dibanding rumah tangga dan perdagangan tetapi tetap relevan, sehingga pengelolaan sampah perlu mencakup area publik, bukan hanya rumah tangga.

Sumber lainnya / tak teridentifikasi walaupun kecil secara persentase, tetap menunjukkan ada variasi sampah yang mungkin datang dari aktivitas sporadis, industri kecil, limbah khusus, atau lokasi yang datanya tidak tercatat dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, Bidang Persampahan melakukan berbagai kegiatan pengurangan sampah, antara lain sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi ramah lingkungan, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, serta pemilahan sampah dari sumbernya.



Selain itu, didorong pula pemanfaatan kembali barang yang masih layak pakai dan pengolahan sampah organik menjadi kompos maupun produk bernilai guna lainnya.

Dengan dilaksanakannya program pengurangan sampah secara berkelanjutan, diharapkan tercipta sistem pengelolaan persampahan yang lebih efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Penanganan Sampah

Kegiatan penanganan sampah adalah melakukan koordinasi pengelolaan sampah berupa pembersihan sampah, pengangkutan sampah, penyapu di jalan-jalan protokol dan mengkoordinasi penagihan retribusi pelayanan persampahan. Kegiatan Penanganan Sampah lebih difokuskan pada aktivitas pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA, namun sampai sekarang kegiatan pengangkutan masih melayani pengangkutan sampah dari rumah tangga, hal ini diakibatkan dari kurangnya peran motor sampah roda tiga di masing-masing kelurahan untuk pengangkutan sampah rumah tangga menuju TPS. Kondisi ini mengakibatkan masih belum maksimalnya penanganan sampah.

Penanganan sampah selain sampah rumah tangga, juga sampah pada fasilitas-fasilitas umum dan juga objek vital Negara yang ada di Desa Hoder (PLTMG Wairita), Desa Tana Duen (Pertamina) sampai Kelurahan Wailiti (PLTD Wolomarang) dan juga Pasar Maumere. Selain itu juga pelayanan pengangkutan sampah di Hotel-hotel. Tingginya Volume sampah dan tersebarnya titik-titik timbulan sampah serta terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki berdampak terhadap pelayanan pengangkutan sampah.

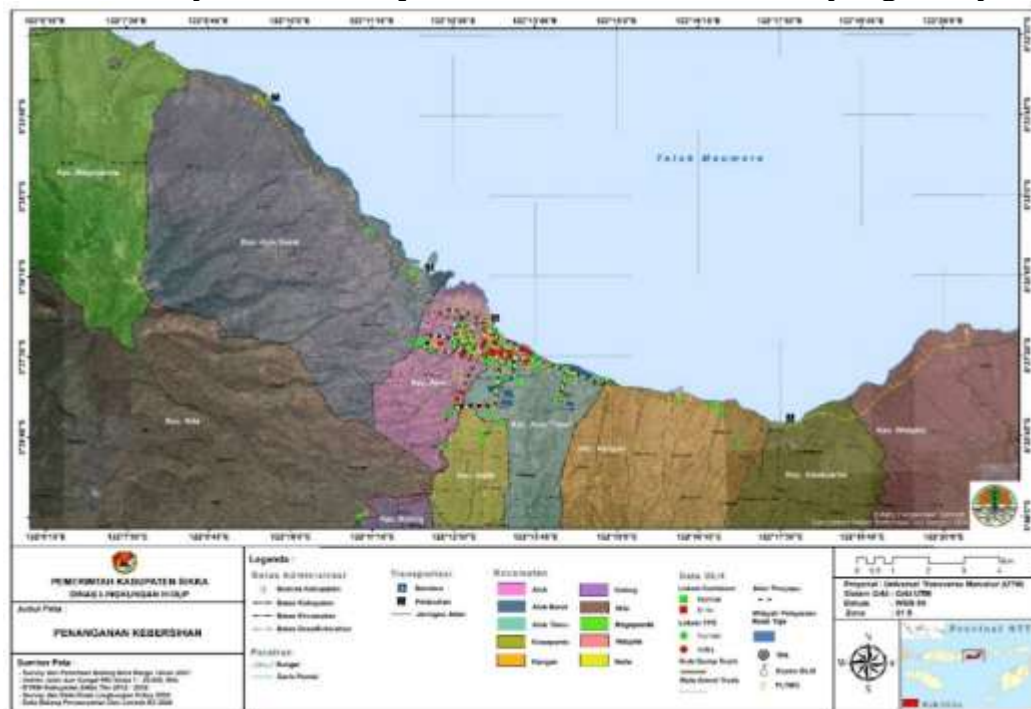
Dalam penanganan sampah petugas kebersihan yaitu penyapu jalan, pengangkut menjadi ujung tombak utama dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain :

a. Petugas Pengangkut Sampah

Untuk kegiatan pengangkutan sampah dilakukan menggunakan mobil sampah dan motor roda tiga sesuai dengan rute yang ditentukan. Wilayah yang mendapat pelayanan pengangkutan sampah yaitu Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Kangae dan Kecamatan Kewapante dan sampah yang ada di fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jumlah personil yang menangani pengangkutan sampah terdiri dari pengemudi/sopir 14 orang dan kru pengangkut 62 orang. Jumlah armada yang digunakan berupa 6 (enam) unit mobil Dum Truck, 2 (dua) unit Mobil Amroll dan 5 (lima) unit Motor roda 3.

Dengan jumlah armada dan personil yang ada pengangkutan sampah diberlakukan 2 shift yaitu shift pagi dan sore. Shift pagi mengangkut sampah sebanyak 2 reit sedangkan ship sore mengangkut sampah 1 reit, sehingga jumlah pengangkutan sampah dalam 1 (satu) hari sebanyak 3 reit. Mobil dum truck mengangkut sampah-sampah dari rumah tangga, TPS dan fasilitas umum lainnya, sedangkan motor roda tiga mengangkut sampah dari rumah tangga yang tidak bisa terjangkau oleh Kendaraan Dum Truck.

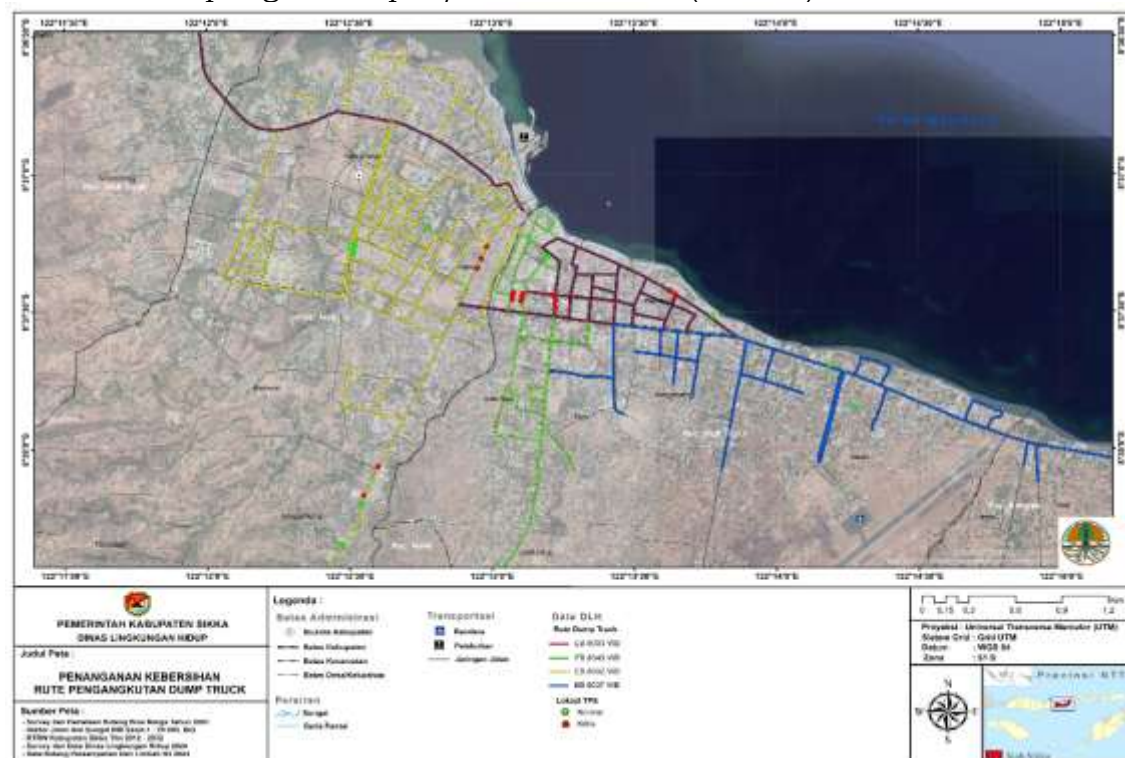
Gambar 3.4
Peta Rute Pelayanan Persampahan Pada Lima Kecamatan yang Terlayani



Keterangan: Selengkapanya Peta Digital Penanganan sampah bisa diakses melalui link <https://dlh-pew3n08su-akhtarreys-projects.vercel.app/>



Gambar 3.5
Peta Rute Pengangkutan sampah Dum Truck (4 Unit) dan Tiktik/Lokasi Tempat Penampungan Sampah/ TPS Permanen (35 Unit) beserta titik kritis



Gambar 3.6
Rute Pengangkutan sampah Dump Truck (4 Unit)

NO	NOMOR POLISI	SHIFT	KECAMATAN	KELURAHAN	JALUR/RUTE PENGANGKUTAN
1.	EB 8037 WB (Dum Truck)	Shift Pagi	Kecamatan Alok Timur	Waioti	- Terminal Lokaria - menyisir sepanjang Jln. Negara ke arah barat sampai di depan Kantor Lurah Waioti (kiri-kanan jalan) - Sepanjang Jln. Adisucipto (kiri-kanan jalan) - Lorong Sinta Pub, Lorong Wairbaka, Lorong Inpres, Lorong Mesjid, Lorong Kemodo, Lorong Angkasa, Lorong Imigrasi & Lorong Karisma - Sepanjang jalan bawah dari sinta Pub sampai Read Bull Café
2.	EB 8037 WB (Dum Truck)		Kecamatan Waigete, Kewapante & Kangae	Desa Hoder, Geliting, Tana Duen. Habi	- PLTMG Wairita, sepanjang Jln. Negara Eks Pasar Geliting, Pertamina, Belok kiri ke Paduwau (Panti Jompo) sampai Kantor Pos, menyisir sepanjang Jln. Negara arah barat (kiri kana jalan) - Hotel Capa - Tana Duen - Pertamina - Wairhubing - Belok kiri masuk Jln. Rabat sebelum Terminal Lokaria - pertigaan Terminal Lokaria belok kiri - lurus sampai kos-kosan.



3.	EB 8814 BX (Dum Truck)	Shift Pagi	Kecamatan Alok Timur	Wairotang	- Sepanjang Jln. Hasanudin, Jln. Yos Sudarso sampai di jembatan wairbubuk - Kantor Lurah Wairotang - TPS Pekuburan Sinameluk - Jln. Kartini depan Kantor Keuangan (kiri kanan jalan) - SMK Negeri 3 - Kuburan Islam - Turap Wairotang - belakang Pengadilan - belok kiri ke Toko Roti Kegi.
4.	EB 8814 BX (Dum Truck)	Shift Siang	Kecamatan Alok Timur	Beru	- Perempatan Kantor Keuangan - sampai perempatan Gereja Kalvari - Kantor Pos - sepanjang Jalan Patirangga/dekat Pol. PP (kiri kanan jalan) - Masuk lorong Hotel Gardena - Jln. Kartini - Sinameluk - Pertigaan SMU PGRI - Jln. Bringin - sampai pertigaan Dealer Ramayana - lurus ke atas samping Gereja Centrum dan sekitarnya - Jln. Cemara - sampai depan SDK Bhaktyarsa - Sabda Trans - keluar di Jln. Perkuburan. - Pintu Masuk Pelabuhan - Kampung Buton - putar sepanjang Jln. Perkuburan Cina - lurus sampai pertigaan Kantor Lurah Kota Uneng. - Lorong Perkuburan Cina - Lorong Susteran FDZ - lurus ke TPS3R Kota Uneng - Lorong Binter - Lorong Haji Kasim - Keluar sampai Kilo 2 Kampung Pemana - Lorong Mathilda - Lorong Ayam. - PLTMG Wairita - Jembata Depan Brimob - menyisir sepanjang Jln. Negara Eks Pasar Geliting - Belok kiri ke Paduwau (Panti Jompo) sampai Kantor Pos - menyisir sepanjang Jln. Negara arah barat (kiri kana jalan) - Hotel Capa - Tana Duen - Pertamina - Wairhubing - Belok kiri masuk Jln. Rabat sebelum Terminal Lokaria - pertigaan Terminal Lokaria belok kiri - lurus sampai kos-kosan. - Lorong SD Inpres Waioti - Lorong Kemodo - Lorong Belakang Sinta Pub - Lurus sampai Café Red Bull -Lorong Mayos - Lorong Angkasa
3	EB 8814 BX (Dum Truck Baru)	SHIFT PAGI	Kel. Nangameting Kec. Alok Timur		- Ka arah Tugu Selamat Datang - lurus sampai perempatan Patung Teka Iku (kiri-kanan jalan) - Tugu Selamat Datang - sampai pertigaan Toko Batu (kiri kanan jalan) - Jln. Kesehatan - Jln. Baru - Jln. Dua Toru/Perkuburan - lurus sampai kontainer di perkuburan. - SMK Negeri 3 - Kuburan Islam - Turap Wairotang - belakang Pengadilan - belok kiri ke Toko Roti Kegi. - Kantor Lurah Wairotang - TPS Pekuburan Sinameluk - Jln. Kartini depan Kantor Keuangan (kiri kanan jalan) - Jln. Kartini - Pertigaan Hotel Senja Wairbubuk - Jln. Kantor Lurah Beru - Jln. Merpati - keluar di Bakso Solo.
4		SHIFT SIANG	Kel. Beru Kec. Alok Timur		- Masuk lorong Hotel Gardena - Jln. Kartini - Sinameluk - Perempatan Kantor Keuangan - sampai perempatan Gereja Kalvari - Kantor Pos - sepanjang Jalan Patirangga/dekat Pol. PP (kiri kanan jalan) - Ke arah pertigaan Kevikepan Maumere - TK Didi Dodo - menyisir ke arah barat sepanjang jalan Negara - sampai Swalayan Pintu Air (kiri - kanan jalan) - Jln. Kimang Beleng - Kompleks Pasar Bongkar (Jln. Gunung Agung) - Jln. Kiamego - Jln. Gunung Mutis - Lorong Analdi - Jln. Kelibera - Jln. Arto Moro. - Kompleks Perumahan Kimang Buleng - Jln. Rokatenda - Sampai Jln. Eltari (eks kontainer) - Bak SMPK Frater - Bak SMAK Frater.
			Kel. Kota Baru Kec. Alok Timur		
			Kel. Beru Kec. Alok Timur		
			Kel. Wairotang Kec. Alok Timur		
			Kel. Wairotang Kec. Alok Timur		
			Kel. Beru Kec. Alok Timur		
			Kel. Beru Kec. Alok Timur		
			Kel. Kota Uneng Kec. Alok		
			Kel. Kota Uneng, Kel. Kabor Kec. Alok		
			Kel. Kota Uneng Kec. Alok		



5	EB 8043 WB	SHIFT PAGI	Kel. Kota Baru Kec. Alok Timur		- Ke arah Tugu Teka Iku - Lurus sampai ke jembatan Polres Sikka (kiri - kanan jalan)
			Kel. Kota Baru Kec. Alok Timur		- Bak Depan Koramil Kota - Depan Roxy - sampai SDK Maumere 1 - Bak SDK Maumere III - Jln. Moa Toda - lurus sampai Perempatan Polres Sikka (kiri - kanan jalan).
			Kel. Kota Baru Kec. Alok Timur		- Pertigaan Toko Mekar Jaya - sampai Perempatan Rosy Swalayan.
			Kel. Kota Baru Kec. Alok Timur		- Jln. Raja Centis - sampai Toko Mustika - Jln. Bandeng - TPI
			Kel. Kota Baru Kec. Alok Timur		- Jln. Cakalang/Toko Nita - lurus sampai Toko Aneka - belok kanan ke Toko Terang sampai Toko Agung (Jln. Sugiyo Pranoto).
			Kel. Kota Baru Kec. Alok Timur		- Lorong Belakang Bogadharma/Beronjong.
			Kel. Kota Baru Kec. Alok Timur		- Jln. Pramuka.
			Kel. Kota Baru Kec. Alok Timur, Desa Lepolima		- Depan Rujab Wakil Bupati - sepanjang Jln. Soekarno Hatta - sampai Desa Lepolima di SDK Nara (kiri - kanan jalan).
			Kel. Kota Baru Kec. Alok Timur		- Lembaga Pemasarakatan/Rutan - sampai belakang BK3D dan sekitarnya kiri - kanan jalan.
			Kel. Kota Baru Kec. Alok Timur		- Lorong BK3D.
			Kel. Kota Baru Kec. Alok Timur		- Kompleks Perumahan Kodim.
			Kel. Kota Baru Kec. Alok Timur		- Lorong depan Dispenduk (Batarang) - sampai kompleks belakang Lembaga Pemasarakatan/Rutan kiri kanan jalan.
			Kel. Kota Baru Kec. Alok Timur		- 3 Bak di Pasar Tingkat sebelah Barat
6	EB 8043 WB	SHIFT SIANG	Kel. Kabor Kec. Alok		- Jln. Heet Wolokoli
			Kel. Kabor Kec. Alok		- Jln. Kondiboer
			Kel. Madawat Kec. Alok		- Jln. Banteng Misir
			Kel. Madawat Kec. Alok		- Jln. Mawar sampai Transito - Kompleks Perumnas (Jln. Anyelir, Jln. Dahlia) kiri - kanan jalan
			Kel. Kota Uneng Kec. Alok		- Kompleks Litbang (Bpk. Ansar Rera) - sekitar Kompleks Belakang RSUD dr. T.C Hillers Maumere kiri kanan jalan - Gudang Rejeki.
			Kel. Kota Uneng Kec. Alok		- SMK St. Thomas Maumere.
			Kel. Kota Baru Kec. Alok Timur		- 3 Bak di Pasar Tingkat sebelah Timur
7	EB 8002 WB	SHIFT PAGI	Kel. Madawat, Kel. Kota Uneng Kec. Alok		- Ke arah pertigaan Gelora - belok kiri Jln. Anggrek (Samping Dealer Raja Jaya Motor) - lurus sampai Perempatan Apotik Tiara Farma (kiri kanan jalan).
			Kel. Kabor Kec. Alok		- Kembali ke Jln. Nong Meak - sampai Pelabuhan L. Say (kiri kanan jalan) - Jln. Tugu Timur (samping Kristus Raja).
			Kel. Madawat Kec. Alok		- Lepo Bispu menyisir ke arah timur sepanjang kiri kanan jalan - belok kiri ke Jln. Eltari Tugu Mof - putar balik ke Jln. Wairklau ke arah timur - sampai pertigaan PLN.
			Kel. Madawat, Kel. Nangalimang Kec. Alok		- Belok kanan ke arah Jln. Kolombeke/Wolonbetan - menyisir sepanjang Jln. Gajah Mada.
			Kel. Madawat Kec. Alok		- Jln. Gotong Royong (belakang PU)
			Kel. Kota Baru Kec. Alok Timur		- Jln. Veteran.



8	EB 8002 WB	SHIFT PAGI	Kel. Kota Uneng Kec. Alok, Kel. Wolomarang Kec. Alok Barat.	- Jembatan Pura - menyisir ke arah barat - sampai pertigaan Wuring - belok kanan menyisir sepanjang Jln. Bangkumis - sampai Masjid Terapung - putar sampai di Wuring Leko.
	(Dum Truck)		Kel. Wolomarang Kec. Alok Barat	- Komplekas Pasar Wuring - sampai Bebung (Perusahaan Pembekuan Ikan)
			Kel. Wailiti Kec. Alok Barat	- Triple Seven - PLN - Perusahaan Ewiti.
			Kel. Wuring Kec. Alok Barat	- Kembali ke Jalan Negara - menyisir sepanjang Jalan Mauhere - Nangahure kiri kanan jalan - Nangahure Bukit - Nangahure Lembah.

Gambar 3.7

Tiktik/Lokasi Tempat Penampungan Sampah/ TPS Permanen (35 Unit) dan
Beserta Titik Kritis





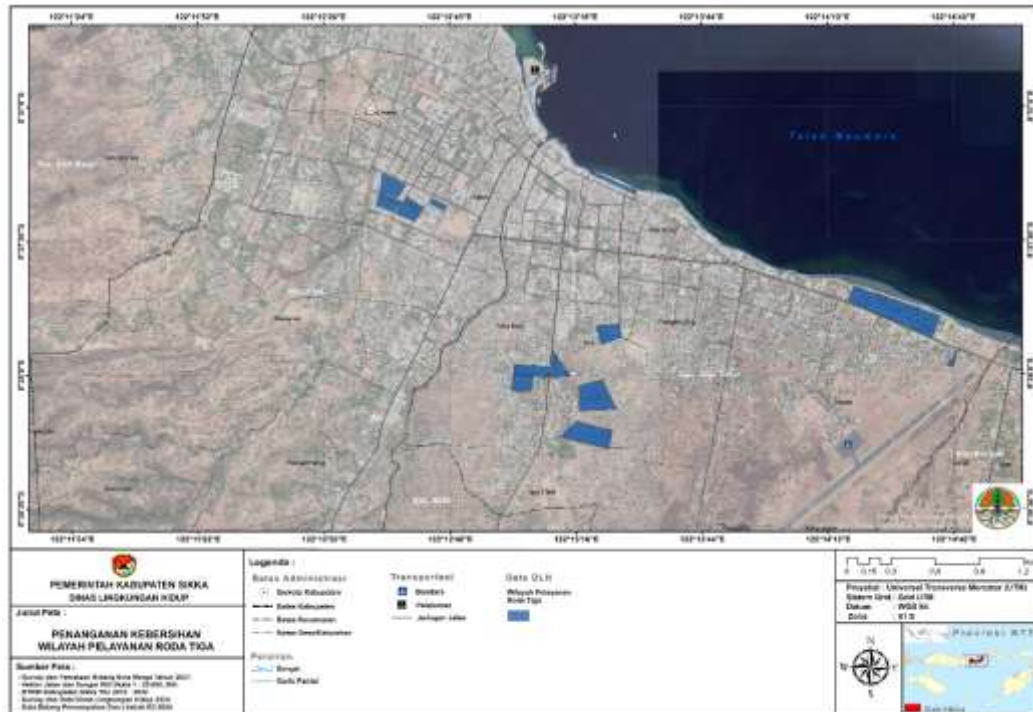
Gambar 3.8
Peta Rute pengangkutan sampah Truck Arm Roll (2 Unit) dan 37 titik penempatan Kontainer beserta titik kritis



Gambar 3.9
Lokasi 37 titik penempatan Kontainer

NO	LOKASI	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
I	KECAMATAN ALOK			
1	Kelurahan Madawat	4	unit	Baik
2	Kelurahan Nangameting	1	unit	Baik
3	Kelurahan Kota Uneng	8	unit	Baik
4	Kelurahan Kabor	2	unit	Baik
	Jumlah	15	unit	
II	KECAMATAN ALOK BARAT			
1	Kelurahan Wolomarang	2	unit	Baik
2	Kelurahan Wailiti			
3	Kelurahan Hewuli			
4	Kelurahan Wuring	1	unit	Baik
	Jumlah	3	unit	
III	KECAMATAN ALOK TIMUR			
1	Kelurahan Kota Baru	3	unit	Baik
2	Kelurahan Beru	5	unit	Baik
3	Kelurahan Wairotang	2	unit	Baik
4	Kelurahan Nangameting	3	unit	Baik
5	Kelurahan Waioti	1	unit	Baik
	Jumlah	14	unit	
IV	KECAMATAN KANGAE			
1	Desa Habi	1	unit	Baik
	Jumlah	1	unit	
V	KECAMATAN KEWAPANTE			
1	Desa Namangkewa	1	unit	Baik
2	Desa Waiara	1	unit	Baik
	Jumlah	2	unit	
VI	KECAMATAN NITA			
1	Desa Nita	2	unit	Baik
	Jumlah	2	unit	
	Total Kontainer	37	unit	

Gambar 3.10
Peta Rute pengangkutan sampah motor roda tiga (4 Unit) Wilayah Waioti, BK3D, Lorong Karya Murni, Lorong Garuda, Beru & Perumnas



LOKASI KERJA	RUTE PENGANGKUTAN
Kelurahan Madawat	- Kompleks Perumnas (Gg. Anyelir, Gg Cempaka)
	- Kompleks Misir (Jl. Banteng, Misir bawah ujung aspal)
Kelurahan Madawat	- Kompleks Perumnas (Gg. Dahlia, Gg Melati)
Kelurahan Beru	- Lorong Karya Murni - Rumah-rumah di Lorong/Gang sekitarnya
Kelurahan Beru	- Turap Pinggir Pantai
Kelurahan Kota Baru	- Lorong Iligetang - Lorong Garuda

b. Petugas Penyapu Jalan

Untuk kegiatan penyapuan jalan, lokasi/sasarannya adalah jalan-jalan utama dan beberapa ruas jalan yang tersebar di wilayah Kota Maumere sesuai dengan rute yang sudah ditentukan dengan jumlah petugas penyapu sebanyak 31 orang. Setiap hari menyapu dalam 2 (dua) Shift yaitu mulai dari pagi hari pukul 05.00 s/d 07.00 wita dan sore hari mulai pukul 16.00 s/d 18.00 wita. Selain melaksanakan rutinitas menyapu juga ada kerja bakti bersama disesuaikan situasi dan waktu khusus ketika ada tumpukan-tumpukan sampah dilokasi tertentu.



Gambar 3.11
Peta Rute Penyapu Jalan



c. Penjaga TPA

Dalam melaksanakan tugas sebagai penjaga TPA, perlu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Menerima tugas/obyek pekerjaan dari pejabat yang berwenang.
- Mendata kondisi eksisting lokasi pekerjaan
- Menjaga keamanan di lokasi TPA
- Mengatur waktu pembuangan sampah
- Bekerja sama dengan rekan kerja dan saling mendukung dalam penyelesaian pekerjaan.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

d. Operator Alat Berat

Dalam melaksanakan tugas sebagai Operator Alat Berat, perlu menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

- Menerima tugas/objek pekerjaan sebagai operator alat berat
- Mendata kondisi eksisting lokasi pekerjaan
- Melaporkan kebutuhan peralatan kerja
- Menerima, menggunakan dan merawat peralatan kerja
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.



Di Kabupaten Sikka terdapat sektor pengumpul informal yaitu pemulung dan pengepul yang bentuk aktifitasnya mengumpulkan bahan-bahan bekas yang masih bisa dimanfaatkan (daur ulang) Kontribusi sektor informal terhadap pengelolaan sampah mereka membantu “mereduksi” volume sampah yang masuk ke sistem formal / TPA dengan mengambil dan memilah material bernilai sebelum dibuang. Itu berarti beban pengolahan di TPA bisa berkurang Mereka menyuplai bahan baku untuk industri daur ulang misalnya plastik, kertas, logam sehingga mendukung ekonomi sirkular dan memberi nilai ekonomi untuk sampah.

Tabel 3.13

Data Jumlah dan Jenis Sampah yang Dipilah dari sektor Informal

No	Jenis Sampah	Volume Sampah (Kg)			
		Per/Hari	Per/Minggu	Per/Bulan	Per/Tahun
1	Plastik	450	2.700	10.800	129.600
2	Besi	1050	6.300	25.200	302.400
3	Kardus	1025	6.150	24.600	295.200
4	Alumunium	230	1.380	5.200	66.240
5	Kertas	470	2.820	11.280	135.360
6	Jumlah Botol	600	3.600	14.400	172.800
7	Kuningan	63	378	1.512	18.144
	Jumlah	3888	23.328	93.312	1.119.744

Sumber : Sektor Informal yang tersebar di Kabupaten Sikka Tahun 2025

Fasilitas Pengelolaan Sampah lainya di Kabupaten Sikka terdiri dari Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) yang berfungsi untuk mengelola dan memproses sampah sesuai dengan skala dan jenisnya. Sedangkan fasilitas pengelolaan sampah lainnya seperti Bank Sampah Unit (BSU), Bank Sampah Induk (BSI), Pusat Daur Ulang (PDU) belum ada, sedangkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Madawat pernah dibangun tahun 2008 tetapi tidak aktif namun saat ini sdh dilakukan upaya revitalisasi bangunan untuk diaktifkan kembali.

Sedangkan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) sebagai fasilitas utama dalam menampung sisa sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali, semakin terbebani akibat volume sampah yang terus meningkat. Oleh karena itu, strategi pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah di Kabupaten Sikka dalam waktu dekat akan difokuskan pada Pembangunan TPS3R sebagai pilot project untuk memperkuat pengelolaan



sampah berbasis komunitas. Dengan Langkah ini diharapkan jumlah sampah yang berakhir di TPA dapat dikurangi secara signifikan, sekaligus mendukung pencapaian target pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2025 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (Open Dumping) pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Wairii Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka di Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Diktum KETIGA yaitu menghentikan pengolahan sampah sistem pembuangan terbuka (Open Dumping) paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari pada TPA Wairii, sejak diterimanya keputusan sampai dengan tanggal 15 Desember 2025. Untuk memenuhi hal tersebut, telah dilaksanakan beberapa upaya diantaranya:

1. Penyusunan dokumen rencana penghentian pengelolaan sampah sistem pembuangan terbuka (Open Dumping) pada TPA Wairii Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka.
2. Melakukan persiapan penghentian aktifitas pembuangan sistem terbuka (Open Dumping) di TPA Wairii meliputi:
 - a. Pembentukan tim penghentian Open Dumping TPA Wairii.
 - b. Survey identifikasi pada TPA Wairii.
 - c. Melakukan sosialisasi terhadap Masyarakat dan pemulung di TPA Wairii.
 - d. Melakukan rapat koordinasi dengan para pihak.
3. Melakukan penyusunan Dokumen Rencana Penghentian dan Pelaksanaan Penutupan Sistem Pembuangan Terbuka (Open Dumping).
4. Memasang portal pada pintu masuk TPA Wairii
5. Melakukan Penataan Zona 1 dan Zona 2 TPA Wairii sebagai berikut:
 - a. Penataan zona 1 dari sistem pembuangan terbuka (Open Dumping) menjadi sistem Control Landfill.
 - b. Menutup sistem pembuangan terbuka pada zona 2.
6. Menganggarkan perencanaan pembangunan TPST pada zona 2 TPA Wairii.
7. Menganggarkan penyusunan Dokumen Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan.
8. Melakukan program pembatasan sampah plastik dengan Surat



Edaran Bupati Sikka Nomor Disling 660.2/180.a/VI/2025 tentang Pengurangan Sampah Plastik.

9. Mencanangkan Program Jaga Bersama Nian Tanah dengan Kegiatan Jumat Giat Berantas Sampah yang dilaksanakan setiap hari jumat di seluruh wilayah Kota Maumere.
10. Melakukan pengujian kualitas air dan udara secara berkala pada TPA Wairii.
11. Merencanakan pembangunan dan revitalisasi TPST dan TPS3R.
12. Menyusun Peta Jalan (Roadmap) Pengelolaan Sampah.
13. Melakukan evaluasi secara berkala.

Jumlah timbulan sampah sepanjang tahun 2025 di 5 wilayah pelayanan yaitu sebanyak 18.714 ton. Adapun volume sampah yang ditargetkan untuk diangkut tahun 2025 yaitu sebanyak 15.350,40 ton dan dan pengangkutan sampah yang dilayani selama tahun 2025 tersebar di 5 wilayah sebanyak 9.892,19 ton atau dapat dihitung bahwa tingkat pelayanan penanganan sampah di wilayah Kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur, Kangae dan Kewapante sebesar 64,44% dan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.14

Data Volume Sampah dan Jumlah Pengangkutan Sampah Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)	Jumlah Timbulan Sampah (ton/tahun)
1	Alok	33.163	13,27	4.841,80
2	Alok Barat	24.793	9,92	3.619,78
3	Alok Timur	34.788	13,92	5.079,05
4	Kewapante	15.746	6,30	2.298,92
5	Kangae	19.688	7,88	2.874,45
Total			51,29	18.714,00

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Tahun 2025



BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

A. Kesimpulan

Hasil Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persentase Penyerapan Anggaran dan Realisasi Kinerja untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 93,78% dan 81,68%.
2. Realisasi Pendapatan Retribusi Sampah Tahun 2025 dari target Pendapatan sebesar Rp1.500.000.000,- tercapai Rp432.532.500,- atau sebesar 28,84%.
3. Berdasarkan Renstra 2024-2026, dari analisis 3 sasaran, yaitu yang pertama sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian IKLH sebesar 112,50%, yang kedua sasaran Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup dengan capaian Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup sebesar 88,28%, dan yang ketiga sasaran Meningkatnya kualitas kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup belum dapat dilakukan perhitungan karena belum dilakukan evaluasi.
4. Berdasarkan Renstra 2025-2029, dari analisis tujuan dan 2 sasaran, yaitu yang pertama tujuan Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan dengan capaian IKLH sebesar 109,13%, yang kedua sasaran Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas dengan capaian Indeks Daya Dukung Daya Tampung sebesar 0%, dan yang ketiga sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah belum dapat dilakukan perhitungan karena belum dilakukan evaluasi.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diajukan adalah :

1. Perlu upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
3. Perlu upaya penegakan hukum yang lebih tegas bagi usaha dan/atau kegiatan yang melanggar poin – poin pada Dokumen Lingkungan.
4. Perlu peningkatan komunikasi dan koordinasi yang baik antara instansi terkait (DLH, ESDM dll) dengan pemerintah wilayah terkait pengawasan usaha dan /atau kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan.
5. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi terkait berbagai peraturan perundang-undangan terkait mekanisme dan syarat-syarat pengurusan rekomendasi lingkungan, tata cara pengaduan, pengurangan sampah, penanganan limbah B3 dan pennebangan pohon kepada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
6. Pembentukan tim teknis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) yang berkompeten untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas pelaku usaha yang berdampak pada pencemaran lingkungan.
7. Perlu pelibatan masyarakat dan komunitas peduli lingkungan pada aksi bersih dan kegiatan perlindungan lingkungan terus secara rutin.
8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penanganan sampah dan Limbah B3.
9. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah.
10. Tugas pemungutan retribusi persampahan oleh pihak Kelurahan dikembalikan ke Dinas Lingkungan Hidup.
11. Mengembangkan kanal-kanal pembayaran non tunai dan pemberdayaan pemungut retribusi di wilayah untuk bisa menjadi agen pembayaran.



Demikianlah Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tahun 2025 yang dapat kami sampaikan dan diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan. Laporan ini menjadi bahan evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama satu tahun serta menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja yang akuntabel bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka sebagai landasan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis pada periode mendatang.

Maumere, 20 Januari 2026
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

Johanes B. C. Putu Botha, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19741115 200012 1 005



LAMPIRAN

POHON KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 (RENSTRA 2024 - 2026)

ISU / MASALAH POKOK	Masih rendahnya layanan persampahan			Lemahnya perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup		Masih adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan			Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap PPLH				Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik DLH		Masih rendahnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran DLH		
MASALAH	Rendahnya pengelolaan sampah	Kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan	Menyediakan Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang Penanganan Limbah B3	Belum adanya dokumen RPPLH	Belum maksimalnya upaya konservasi dan Pengelolaan RTH	Belum maksimalnya upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan kerusakan	Belum maksimalnya upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan kerusakan	Masalah Kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan	Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan maupun terhadap yang belum memiliki ijin lingkungan	Belum maksimalnya upaya penegakan hukum terhadap PPPLH	Belum adanya penyusunan kebijakan keberadaan MHA terkait PPPLH	Rendahnya peran masyarakat terhadap PPPLH	Masih rendahnya Profesionalitas ASN	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Masih rendahnya kualitas manajemen kinerja		
AKAR MASALAH	Terbatasnya sarpras persampahan, Kurangnya kualitas dan kuantitas, SDM Bidang Lingkungan Hidup, Belum adanya kebijakan strategis pengelolaan sampah, Masih	Kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait pengelolaan persampahan, Lemahnya peran kelurahan dan	Masih rendahnya Peraturan Pemerintah Daerah terkait pengendalian dan penanganan limbah B3, Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat	Belum disusunnya dokumen RPPLH, Belum adanya pengendalian pelaksanaan RPPLH	Minimnya SDM dan Sarana dan Prasarana penunjang penataan RTH, Belum adanya PERDA Taman Pemakaman	Tidak adanya dokumen uji kualitas lingkungan hidup, Belum tersedia dokumen standart baku mutu lingkungan	Kurangnya informasi kepada masyarakat tentang peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan, Belum berfungsinya	Kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait penanggulangan pencemaran lingkungan, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan	Terbatasnya Pejabat Pengawas Lingkungan (PPLH) yang bersertifikat, Luasnya wilayah cakupan pelayanan pembinaan, Belum diikutinya diklat pengawasan lingkungan hidup	Kurangnya koordinasi lintas sektor, Belum maksimalnya penerapan sanksi	Belum adanya data dan informasi profil MHA, Belum maksimalnya peran serta MHA terhadap PPPLH	Kurangnya informasi/edukasi terkait PPPLH	Masih rendahnya kompetensi aparatur di bidang lingkungan hidup	Belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana kerja DLH	Masih rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja		
MISI	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup												Mewujudkan Reformasi Birokrasi		Mewujudkan Reformasi Birokrasi		
TUJUAN	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup												Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik pada DLH		Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran DLH		
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)												Indeks kualitas pelayanan publik DLH		Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		
SASARAN	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup												Meningkatnya profesionalitas ASN	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup		
INDIKATOR KINERJA SASARAN	Indeks Kualitas Air			Indeks Kualitas Udara			Indeks Kualitas Lahan		Persentase Penanganan sampah perkotaan		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik	Nilai SAKIP				
↓																	
PROGRAM	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah B3		Program Pengelolaan Persampahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
PENANGGUNG JAWAB	Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan		Bidang Tata Lingkungan			Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup			Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3			Sekretariat		Sekretariat			

Maumere, 3 November 2025


Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,
Drs. ADE DATUS BUANG DA CUNHA

POHON KINERJA PERUBAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 (RENSTRA 2025 - 2029)

ISU / MASALAH POKOK	Kualitas Lingkungan Hidup yang Masih Rendah										
MASALAH	Pengendalian Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Masih Rendah	Rendahnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masih Rendah	Masih rendahnya tata Kelola persampahan	Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP masih rendah	Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang masih tinggi	Kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH masih rendah	Kapasitas SDM bidang lingkungan hidup masih rendah	Penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup masih rendah	Kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati masih rendah	Belum optimalnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
AKAR MASALAH	Belum maksimalnya pengumpulan Limbah B3 dalam satu daerah kabupaten	Belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	Masih kurangnya penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten	Belum maksimalnya pengelolaan sampah	Belum maksimalnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten	Belum optimalnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten Belum optimalnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten	Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang masih rendah Kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang masih rendah	Belum optimalnya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masih tingginya pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kabupaten/kota	Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD 2. Administrasi Keuangan PD 3. Administrasi Umum PD 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
MISI	Meningkatkan Kualitas Lingkungan HidupMeningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan, dan Berkelanjutan										Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN, dan Kolaboratif
TUJUAN	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan										
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)										
SASARAN	Meningkatnya lingkungan hidup yang berkualitas										Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah
INDIKATOR KINERJA SASARAN	Indeks Daya Dukung Daya Tampung										Nilai SAKIP Perangkat Daerah
PROGRAM	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah B3	Program Pengelolaan Persampahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
PENANGGUNG JAWAB	Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan		Bidang P enaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup			Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		Sekretariat		

Maumere, 3 November 2025


 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Sikka,
Drs. ADEOBATUS BUANG DA CUNHA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660516 199903 1 006

CASCADING DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025
(RENSTRA TAHUN 2024-2026)

KEPALA DAERAH

RPJMD KABUPATEN SIKKA

VISI

Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Menuju Sikka Bahagia 2023

MISI I

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas

MISI II

Mewujudkan Reformasi Birokrasi

TUJUAN

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

INDIKATOR TUJUAN

Derajat kesehatan masyarakat

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya layanan persampahan

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Persentase Penanganan Sampah Perkotaan

TARGET / SATUAN

71,70

81,08%

TUJUAN

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel

INDIKATOR TUJUAN

Indeks reformasi birokrasi

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemda

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi birokrasi

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Nilai LPPD

Opini BPK

Nilai SAKIP

Indeks Kepuasan Masyarakat

TARGET / SATUAN

30.845

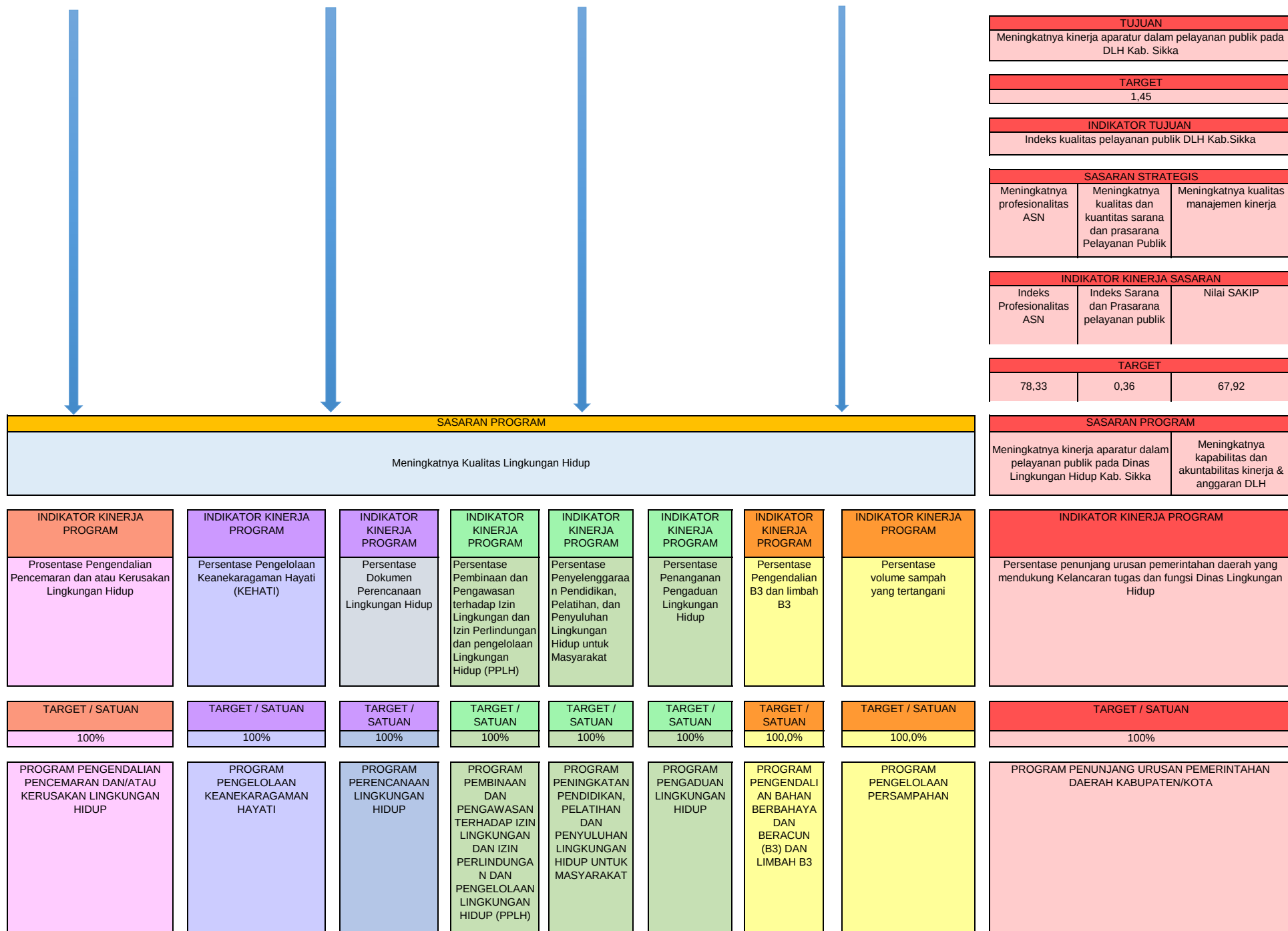
WTP

B

2,60

ESELON II	RENSTRA			
	TUJUAN			
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			
	TARGET			
	71,70			
	INDIKATOR TUJUAN			
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			
	SASARAN STRATEGIS			
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Meningkatnya layanan persampahan	
	INDIKATOR KINERJA SASARAN			
Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Persentase penanganan sampah perkotaan	
TARGET				
52,53	94,51	68,98	81,08%	

ESELON III	BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	BIDANG TATA LINGKUNGAN	BIDANG PENAAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	BIDANG PENGELOLAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	SEKRETARIS
------------	---	------------------------	--	---	------------



PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraa n Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Sikka	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Sampah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD 2. Administrasi Keuangan PD 3. Administrasi Umum PD 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	ANGGARAN	201.811.988	677.844.856	24.826.200	18.827.900	122.732.400	32.233.800	18.471.900	3.910.336.200	3.172.428.861

Maumere, 3 November 2025

Drs. ADEODATUS BUANG DA CUNHA

CASCADING PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025
(RENSTRA TAHUN 2025 - 2029)

**KEPALA
DAERAH**

RPJMD KABUPATEN SIKKA

VISI

Terwujudnya Masyarakat Sikka yang Produktif, Kreatif, Unggul dan Mandiri Menuju Maumere Baru

MISI 4

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan, dan Berkelanjutan

MISI 5

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN, dan Kolaboratif

TUJUAN

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan

INDIKATOR TUJUAN

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

TARGET / SATUAN

73,91

TUJUAN

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Efisien serta Bebas KKN

INDIKATOR TUJUAN

Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

TARGET / SATUAN

B

ESELON II

RENSTRA

TUJUAN

Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan

TARGET

73,91

INDIKATOR TUJUAN

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya lingkungan hidup yang berkualitas

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

TARGET

0,50

78,50

ESELON III

BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

BIDANG TATA LINGKUNGAN

BIDANG PENAAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PENGELOLAN SAMPAH DAN LIMBAH
B3

SEKRETARIS

PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	Persentase RTH	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota(%)	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Limbah B3 yang terkelola	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	TARGET / SATUAN	TARGET / SATUAN	TARGET / SATUAN	TARGET / SATUAN	TARGET / SATUAN	TARGET / SATUAN	TARGET / SATUAN	TARGET / SATUAN	TARGET / SATUAN
	62,48 93,73	9,40	85,00	69%	50,00%	100%	100%	70	100%
PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraa n Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Sikka	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Sampah
ANGGARAN	201.811.988	677.844.856	24.826.200	18.827.900	122.732.400	32.233.800	18.471.900	3.910.336.200	3.172.428.861

Maumere, 3 November 2025



 Dinas Lingkungan Hidup

 Kabupaten Sikka,

Drs. ADIPRATIS BUANG DA CUNHA

 Pembina Utama Muda

 NIP. 19660516 199903 1 006

PERUBAHAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA (RENSTRA TAHUN 2024-2026)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
I							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		16%	23%	28%	33%	2.083.907.760,00	2.197.041.252,00	1.783.647.205,00	2.113.917.888,80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP - Drs. Adeodatus Buang da Cunha
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik DLH	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	1,45	1,45	1,45	1,45	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DLH	28%	21%	12%	39%	975.216.345	843.787.844	754.988.018	597.436.655	Sekretaris - Gaudensius Nong Pio, ST., MT.
	Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja DLH	Nilai SAKIP	-	-	-	67,92	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60%	20%	0%	20%	4.865.500	2.330.499	2.700.000	6.669.101	Maria Eti
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	2		2	4.865.500,00	2.330.499	2.700.000	6.669.101	
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	78,33	78,33	78,33	78,33	Kegiatan Administrsai Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27%	27%	23%	23%	871.152.986	734.624.305	697.038.482	426.067.969	Maria Eti
							Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4	4	3	3	845.603.586	715.799.305	671.901.682	391.621.169	-
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3	3	3	3	25.549.400	18.825.000	25.136.800	34.446.800	
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umun Perangkat Daerah yang Disediakan	37%	20%	13%	30%	18.832.700	6.482.602	10.336.900	19.630.998	Maria Eti
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	5	2	7	3.702.700	2.182.602	716.900	4.399.098	
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	2.500.000	1.300.000	2.500.000	2.231.900	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	1	2	1	12.630.000	3.000.000	7.120.000	13.000.000	
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik	0,36	0,36	0,36	0,36	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5%	10%	0%	86%	17.919.900	42.124.500	-	68.868.200	Albina Bura
							Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	0	34	-	42.124.500	-	54.267.700	
							Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	0	0	2	17.919.900	-	-	14.600.500	
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25%	25%	25%	25%	39.616.706	38.210.938	27.888.436	30.335.440	Maria Eti
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	3	3	10.710.318	9.212.622	12.433.242	12.433.846	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	3	3	28.906.388	28.998.316	15.455.194	17.901.594	
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16%	23%	13%	48%	22.828.553,00	20.015.000,00	17.024.200,00	45.864.947,00	Maria Eti
							Sub Kegaiaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operaional/Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Proses Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5	4	4	9	22.828.553,00	19.365.000,00	17.024.200,00	43.964.947,00	
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	3	0	6	-	650.000,00	-	1.900.000,00	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	-	-	71,7	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	25%	25%	25%	25%	7.953.998,00	14.640.000,00	1.750.000,00	482.202,00	Donatus Salvaritus
		Indeks Kualitas Air (IKA)				52,53	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang Tersedia	25%	25%	25%	25%	7.953.998,00	14.640.000,00	1.750.000,00	482.202,00	Donatus Salvaritus

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Indeks Kualitas Udara (IKU)				94,51	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	3	3	3	7.953.998,00	14640000	1.750.000,00	482.202,00	Agustinus N. Hamonangan Purba, ST
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.	Persentase Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	25%	25%	25%	25%	13.322.597,00	131.605.397,00	17.733.597,00	39.150.397,00		
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota				Persentase Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut yang Dilakukan	25%	25%	25%	25%	8.892.597,00	113.647.397,00	9.917.597,00	30.570.497,00	Hilarius Hila Keytimu, SP		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan (Dokumen)	3	3	3	3	8.892.597,00	113.647.397,00	9.917.597,00	30.570.497,00			
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	25%	25%	25%	25%	4.430.000,00	17.958.000,00	7.816.000,00	8.579.900,00	Maria Ludgardiana Bora, SH		
		Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	15	15	15	15	4.430.000	17.958.000	7.816.000	8.579.900			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	9%	9%	9%	72%	117416164	141340664	125049864	294038164	Donatus Salfaritus, ST		
		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	9%	9%	9%	72%	117416164	141340664	125049864	294038164	Florentina Oro, S.Si		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	0,6108	0,6108	0,6108	0,6108	113.416.164,00	137.340.664,00	125.049.864,00	227.480.764,00	Yos Heribertus Ledung Lamury, S.Kom		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	0	0	0	4	4.000.000,00	4.000.000,00	-	66.557.400,00			
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				Persentase Limbah B3 yang Terkelola	0%	50%	50%	0%	-	7.752.000,00	5168000	5551900	Pius Markus Temaluru, S.Si		
		Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Persentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0%	50%	50%	0%	-	7.752.000,00	5.168.000,00	5.551.900,00	Yuliana Nona Nelvin, SKM		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yg Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kab/Kota serta Pelaksanaan	0	2	2	0	-	7.752.000,00	5.168.000,00	5.551.900,00	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	18%	36%	27%	18%	5.880.000,00	6.340.000,00	1.830.000,00	4.777.900,00	Vinsenzo Ferry Hariyanto, S.Si
							Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18%	36%	27%	18%	5.880.000,00	6.340.000,00	1.830.000,00	4.777.900,00	Maria Antonia Peni Demoor, ST dan Yuliana Elivin Bunga Dey, ST
							Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	10	20	15	10	5.880.000,00	6.340.000,00	1.830.000,00	4.777.900,00	
							PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0%	0%	59%	41%	0	11.725.900,00	54.263.000,00	56.743.500,00	Vinsenzo Ferry Hariyanto, S.Si

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingk.hidup untk lembaga kemasyr. Tingkt daerah kab/kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0%	0%	59%	41%	-	11.725.900,00	54.263.000,00	56.743.500,00	Maria Antonia Peni Demoor, ST dan Yuliana Elivin Bunga Dey, ST
							Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	0	7	4	0	11.725.900,00	35.605.800,00	36.411.200,00	
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	0	0	3	3	0	0	18.657.200,00	20.332.300,00	
							PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup	23%	25%	18%	35%	4.284.000,00	10.100.000,00	8.061.000,00	9.788.800,00	Vinsenzo Ferry Hariyanto, S.Si
							Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota	23%	25%	18%	35%	4.284.000,00	10.100.000,00	8.061.000,00	9.788.800,00	Maria Anggelina Odje Lalu, SH
							Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	5	5	5	10	2.904.000,00	8.100.000,00	7.086.000,00	8.296.800,00	
							Sub Kegiatan Penerapan Sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/ kota (Sanksi)	4	5	2	4	1.380.000,00	2.000.000,00	975.000,00	1.492.000,00	
		Persentase penanganan sampah perkotaan	20,51	20,51	20,51	20,51	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang tertangani	15%	15%	31%	39%	959.834.656	1.029.749.447	814.803.726	1.105.948.371	Pius Markus Temaluru, S.Si
							Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	15%	15%	31%	39%	959.834.656	1.029.749.447	814.803.726	1.105.948.371	Pius Markus Temaluru, S.Si
							Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	0	0	4	4	481.310	592.831	3.901.130	10.493.229	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	0	0	0	2	192.000,00	-	583.002,00	104.130.898	
							Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	3.837,60	#####	3.837,6	3.837,6	959.161.346,00	1.029.156.616,00	810.319.594,00	991.324.244,00	



Pt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

Drs. ADEODATUS BUANG DA CUNHA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 199903 1 006

PERUBAHAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA (RENSTRA TAHUN 2025-2029)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
I							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		17%	25%	28%	29%	2.083.907.760,00	2.197.041.252,00	1.783.647.205,00	2.113.917.888,80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP - Drs. Adeodatus Buang da Cunha
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				78,50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DLH	30%	27%	19%	28%	975.216.345,00	843.787.844,00	754.988.018,00	597.436.654,80	Sekretaris - Gaudensius Nong Pio, ST., MT.
							Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75%	25%	0%	25%	4.865.500,00	2.330.499,00	2.700.000,00	6.669.101,00	Maria Eti
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	2		2	4.865.500,00	2.330.499,00	2.700.000,00	6.669.101,00	
							Kegiatan Adminstrsai Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27%	27%	23%	23%	871.152.986,00	734.624.305,00	697.038.482,00	426.067.969,20	Maria Eti
							Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4	4	3	3	845.603.586,00	715.799.305,00	671.901.682,00	391.621.169,20	-
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3	3	3	3	25.549.400,00	18.825.000,00	25.136.800,00	34.446.800,00	
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	24%	24%	26%	29%	18.832.700,00	6.482.602,00	10.336.900,00	19.630.998,00	Maria Eti
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	9	9	10	3.702.700,00	2.182.602,00	716.900,00	4.399.098,00	
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	2.500.000,00	1.300.000,00	2.500.000,00	2.231.900,00	
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	1	2	1	12.630.000,00	3.000.000,00	7.120.000,00	13.000.000,00	
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25%	25%	25%	25%	17.919.900,00	42.124.500,00	-	68.868.200,00	Maria Eti
							Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	0	34	-	42.124.500,00	-	54.267.700,00	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	0	0	2	17.919.900,00	-	-	14.600.500,00	
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25%	25%	25%	25%	39.616.706,00	38.210.938,00	27.888.436,00	30.335.439,60	Maria Eti
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	3	3	10.710.318,00	9.212.622,00	12.433.242,00	12.433.845,60	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	3	3	28.906.388,00	28.998.316,00	15.455.194,00	17.901.594,00	
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6%	39%	17%	39%	22.828.553,00	20.015.000,00	17.024.200,00	45.864.947,00	Maria Eti
							Sub Kegaiaian Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operaional/Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Proses Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0	6	2	10	22.828.553,00	19.365.000,00	17.024.200,00	43.964.947,00	
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3		6	-	650.000,00	-	1.900.000,00	
2	Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	-	-	73,91	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	25%	25%	25%	25%	7.953.998,00	14.640.000,00	1.750.000,00	482.202,00	Donatus Salvaritus
3	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Daya Dukung Daya Daampung				0,50	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang Tersedia	25%	25%	25%	25%	7.953.998,00	14.640.000,00	1.750.000,00	482.202,00	Donatus Salvaritus
							Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	3	3	3	7.953.998,00	14.640.000,00	1.750.000,00	482.202,00	
							PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.	Persentase Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	25%	25%	25%	25%	13.322.597,00	131.605.397,00	17.733.597,00	39.150.397,00	Agustinus N. Hamonangan Purb, ST
								Indeks Kualitas Air (IKA)				62,48					
								Indeks Kualitas Udara (IKU)				93,73					
							Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Persentase Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut yang Dilakukan	25%	25%	25%	25%	8.892.597,00	113.647.397,00	9.917.597,00	30.570.497,00	Hilarius Hila Keytimu, SP
							Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan (Dokumen)	3	3	3	3	8.892.597,00	113.647.397,00	9.917.597,00	30.570.497,00	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	25%	25%	25%	25%	4.430.000,00	17.958.000,00	7.816.000,00	8.579.900,00	Maria Ludgardiana Bora, SH
							Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	15	15	15	15	4.430.000,00	17.958.000,00	7.816.000,00	8.579.900,00	
							PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	9%	9%	9%	72%	117.416.164,00	141.340.664,00	125.049.864,00	294.038.164,00	Donatus Salfaritus, ST
								Persentase RTH				9,40%					
							Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	9%	9%	9%	72%	117.416.164,00	141.340.664,00	125.049.864,00	294.038.164,00	Florentina Oro, S.Si
							Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	0,6108	0,6108	0,6108	0,6108	113.416.164,00	137.340.664,00	125.049.864,00	227.480.764,00	Yos Heribertus Ledung Lamury, S.Kom
							Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	0	0	0	4	4.000.000,00	4.000.000,00	-	66.557.400,00	
							PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	0%	50%	50%	0%	-	7.752.000,00	5.168.000,00	5.551.900,00	Pius Markus Temaluru, S.Si
							Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0%	50%	50%	0%	-	7.752.000,00	5.168.000,00	5.551.900,00	Yuliana Nona Nelvin, SKM
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yg Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kab/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yg Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	0	2	2	0	-	7.752.000,00	5.168.000,00	5.551.900,00	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	18%	36%	27%	18%	5.880.000,00	6.340.000,00	1.830.000,00	4.777.900,00	Vinzenzo Ferry Hariyanto, S.Si

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
								Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)				69%					
							Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18%	36%	27%	18%	5.880.000,00	6.340.000,00	1.830.000,00	4.777.900,00	Maria Antonia Peni Demoor, ST dan Yuliana Elivin Bunga Dey, ST
							Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	10	20	15	10	5.880.000,00	6.340.000,00	1.830.000,00	4.777.900,00	
							PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0%	0%	59%	41%	-	11.725.900,00	54.263.000,00	56.743.500,00	Vinsenzo Ferry Hariyanto, S.Si
								Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya				50%					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingk.hidup untk lembaga kemasyr. Tingkt daerah kab/kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0%	0%	59%	41%	-	11.725.900,00	54.263.000,00	56.743.500,00	Maria Antonia Peni Demoor, ST dan Yuliana Elivin Bunga Dey, ST
							Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	0	7	4	-	11.725.900,00	35.605.800,00	36.411.200,00	
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	0	0	3	3	-	-	18.657.200,00	20.332.300,00	
							PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pengaduan Lingkungan Hidup	27%	27%	16%	27%	4.284.000,00	10.100.000,00	8.061.000,00	9.788.800,00	Vinsenzo Ferry Hariyanto, S.Si
							Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota	27%	27%	16%	27%	4.284.000,00	10.100.000,00	8.061.000,00	9.788.800,00	Maria Anggelina Odje Lalu, SH
							Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	5	5	5	10	2.904.000,00	8.100.000,00	7.086.000,00	8.296.800,00	
							Sub Kegiatan Penerapan Sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/ kota (Sanksi)	5	5	1	0	1.380.000,00	2.000.000,00	975.000,00	1.492.000,00	
							PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang tertangani	22%	22%	22%	22%	959.834.656,00	1.029.749.447,00	814.803.726,00	1.105.948.371,00	Pius Markus Temaluru, S.Si
								Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)				70					
							Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	22%	22%	22%	22%	959.834.656,00	1.029.749.447,00	814.803.726,00	1.105.948.371,00	Pius Markus Temaluru, S.Si
							Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	0	0	4	4	481.310,00	592.831,00	3.901.130,00	10.493.229,00	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	0	0	0	2	192.000,00	-	583.002,00	104.130.898,00	
							Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	3.838	3.838	3.838	3.838	959.161.346,00	1.029.156.616,00	810.319.594,00	991.324.244,00	

Pt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

Drs. ADEODATUS BUANG DA CUNHA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 199903 1 006

MONITORING REALISASI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA (RENSTRA TAHUN 2024-2026)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAREGT KINERJA	REALISASI TARGET KINERJA TRIULAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET	HASIL YANG DICAPAI				JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
				TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4		TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1								URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			23%	40%	70%	33%	7.284.577.049,80	1.738.689.589,00	1.560.691.276,00	1.515.214.049,00	2.856.201.051,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP - Drs. Adeodatus Buang da Cunha
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																			
	Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik DLH	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	1,45	1,28	1,28	1,28	1,28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DLH	100%	30%	18%	16%	36%	3.172.428.861,80	711.969.367	493.055.567	525.800.917	1.142.977.643	Sekretaris - Gaudensius Nong Pio, ST., MT.
	Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja DLH	Nilai SAKIP	67,92	-	-	-	78,82	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	60,0%	20,0%	0,0%	20,0%	16.565.100,00	6.329.400	-	-	10.203.170	Maria Eti
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	6	2		2	16.565.100,00	6.329.400,00	-		10.203.170	
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	78,33	72,92	72,92	72,92	72,92	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	27%	27%	23%	23%	2.728.883.742,20	633.575.689	465.645.179	455.688.644	885.915.571	Maria Eti
								Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	4	4	3	3	2.624.925.742,20	616.550.689	458.295.179	455.088.644	807.000.571	- 287.990.659,20
								Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	3	3	3	3	103.958.000,00	17.025.000	7.350.000	600.000	78.915.000	
								Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	100%	60%	0%	23%	17%	56.283.200,00	33.366.730	-	6.854.626	15.718.306	Maria Eti
								Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	23	15	0	5	3	11.001.300,00	7.801.700	0	1.100.760	2.037.290	
								Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	0	0	0	1	8.531.900,00	2.500.000	0	133.866	5.660.910	
								Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	3	0	2	1	36.750.000,00	23.065.030	0	5.620.000	8.020.106	
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik	0,36	0,32	0,32	0,32	0,32	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0%	0%	10%	90%	128.912.600,00	155.400	-	42.124.500	86.376.910	Maria Eti
								Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	38	0	0	4	34	96.392.200,00	-	-	42.124.500	54.128.900	
								Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	0	0	0	4	32.520.400,00	155.400	-	-	32.248.010	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAREGT KINERJA	REALISASI TARGET KINERJA TRIULAN				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET	HASIL YANG DICAPAI				JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
				TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4		TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25%	25%	25%	25%	136.051.519,60	35.892.148	27.410.388	14.839.594	52.273.593	Maria Eti
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	3	3	3	3	44.790.027,60	5.981.760	-	1.135.000	32.043.871	
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	3	3	3	3	91.261.492,00	29.910.388	27.410.388	13.704.594	20.229.722	
								Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6%	39%	17%	39%	105.732.700,00	2.650.000,00	-	6.293.553,00	92.490.093,00	Maria Eti
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional/Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Proses Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	22	0	6	2	10	103.182.700,00	1.500.000		6.293.553	91.090.093	
								Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	4	3		6	2.550.000,00	1.150.000	-	-	1.400.000	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,70	-	-	-	80,66	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	75%	100%	325%	100%		3.010.500,00	5.160.000,00	1.113.498,00	15.475.325,00	Donatus Salvaritus
		Indeks Kualitas Air (IKA)	52,53				77,50	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%	75%	100%	325%	100%		3.010.500,00	5.160.000,00	1.113.498,00	15.475.325,00	Donatus Salvaritus
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	94,51				84,97	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	9	12	39	12	24.826.200,00	3.010.500,00	5.160.000	1.113.498	15.475.325	
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	68,98				78,13	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.	Persentase Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	9%	26%	55%	19%	201.811.988,00	14.750.197,00	27.933.417,00	111.734.727,00	37.532.419,00	Agustinus N. Hamonangan Purba, ST
								Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Persentase Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut yang Dilakukan	100%	0%	25%	58%	33%	163.028.088,00	9.029.197,00	18.503.417,00	100.043.027,00	25.593.328,00	Hilarius Hila Keyitmu, SP
								Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan (Dokumen)	12	0	3	7	4	163.028.088,00	9.029.197	18.503.417	100.043.027	25.593.328	
								Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	18%	27%	52%	5%	38.783.900,00	5.721.000,00	9.430.000,00	11.691.700,00	11.939.091,00	Maria Ludgardiana Bora, SH
								Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	60	11	16	31	3	38.783.900,00	5.721.000	9.430.000	11.691.700	11.939.091	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAREGT KINERJA	REALISASI TARGET KINERJA TRIULAN				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET	HASIL YANG DICAPAI				JUMLAH ANGGRAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
				TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4		TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1,00	21%	21%	21%	36%		101992364	126637464	97756176	336255260	Donatus Salfaritus, ST
								Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100%	21%	21%	21%	36%		101992364	126637464	97756176	336255260	Florentina Oro, S.Si
								Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	24,43	6,108	6,108	6,108	6,108	603.287.456,00	101.992.364	126.637.464	90.926.176	269.006.860	Yos Heribertus Ledung Lamury, S.Kom
								Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	4	0	0	0	4	74.557.400,00	0	-	6.830.000	67.248.400	
								PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100%	0%	50%	50%	0%		-	7.290.000,00	5000000	6140316	Pius Markus Temaluru, S.Si
								Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	0%	50%	50%	0%		-	7.290.000,00	5.000.000,00	6.140.316,00	Yuliana Nona Nelvin, SKM
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yg Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kab/Kota serta Pelaksanaan Berupa...	4	0	2	2	0	18.471.900,00	-	7.290.000	5.000.000	6.140.316	
								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	35%	45%	71%	5%		-	8.280.000,00	7.250.000,00	2.742.606,00	Vinsenzo Ferry Hariyanto, S.Si
								Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	35%	45%	71%	5%		-	8.280.000,00	7.250.000,00	2.742.606,00	Maria Antonia Peni Demoor, ST dan Yuliana Elivin Bunga Dey, ST
								Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	55	19	25	39	3	18.827.900,00	-	8.280.000	7.250.000	2.742.606	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAREGET KINERJA	REALISASI TARGET KINERJA TRIULAN				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET	HASIL YANG DICAPAI				JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
				TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4		TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	0%	0%	71%	18%		-	2.390.000,00	29.975.900,00	88.707.478,00	Vinsenzo Ferry Hariyanto, S.Si
								Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingk.hidup untk lembaga kemasyr. Tingkt daerah kab/kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	0%	0%	71%	18%		-	2.390.000,00	29.975.900,00	88.707.478,00	Maria Antonia Peni Demoor, ST dan Yuliana Elivin Bunga Dey, ST
								Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	11	0	0	6	3	0		2.390.000	26.392.200	53.396.579	
								Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	6	0	0	6	0	0		-	3.583.700	35.310.899	
								PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	35%	98%	18%	33%		-	10.890.000,00	4.004.000,00	16.685.401,00	Vinsenzo Ferry Hariyanto, S.Si
								Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota	100%	35%	98%	18%	33%		-	10.890.000,00	4.004.000,00	16.685.401,00	Maria Anggellina Odje Lalu, SH
								Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Pemasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	25	6	5	5	6	26.386.800,00	-	8.390.000	2.704.000	14.885.331	
								Sub Kegiatan Penerapan Sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/ kota (Sanksi)	15	8	34	2	7	5.847.000,00	-	2.500.000	1.300.000	1.800.070	
		Persentase penanganan sampah perkotaan	82,03	11,93	11,14	14,36	15,43	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang tertangani	100%	5%	5%	5%	55%	3.910.336.200,00	906.967.161	879.054.828	732.578.831	1.209.684.603	Pius Markus Temaluru, S.Si
								Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	100%	5%	5%	5%	55%	3.910.336.200,00	906.967.161	879.054.828	732.578.831	1.209.684.603	Pius Markus Temaluru, S.Si
								Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	8	0	0	0	4	15.468.500,00	-	-	1.330.867	13.969.563	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAREGT KINERJA	REALISASI TARGET KINERJA TRIULAN				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET	HASIL YANG DICAPAI				JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
				TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4		TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2	0	0	0	2	104.905.900,00	-	-	250.002,00	103.447.042	
								Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	15.350,40	2.232	2.085	2.687	2.887	3.789.961.800,00	906.967.161	879.054.828	730.997.962	1.092.267.998	


 Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Sikka,
Drs. ADEBATUS BUANG DA CUNHA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660516 199903 1 006

MONITORING REALISASI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA (RENSTRA TAHUN 2025-2029)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAREGT KINERJA	REALISASI TARGET KINERJA TRIULAN				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	TARGET	HASIL YANG DICAPAI				JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB	
				TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4		TW1	TW2	TW3	TW4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1								URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			23%	40%	70%	33%		1.738.689.589,00	1.560.691.276,00	1.515.214.049,00	2.856.201.051,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP - Drs. Adeodatus Buang da Cunha	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																				
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,50					78,82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DLH	100%	30%	18%	16%	36%	3.172.428.861,80	711.969.367,00	493.055.567,00	525.800.917,00	1.142.977.643,00	Sekretaris - Gaudensius Nong Plo, ST., MT.
									Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	100%	60,0%	20,0%	0,0%	20,0%	16.565.100,00	6.329.400,00	-	-	10.203.170,00	Maria Eti
									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	6	2		2	16.565.100,00	6.329.400,00	-		10.203.170,00	
									Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	27%	27%	23%	23%	2.728.883.742,20	633.575.689,00	465.645.179,00	455.688.644,00	885.915.571,00	Maria Eti
									Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	4	4	3	3	2.624.925.742,20	616.550.689,00	458.295.179,00	455.088.644,00	807.000.571,00	
									Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	3	3	3	3	103.958.000,00	17.025.000,00	7.350.000,00	600.000,00	78.915.000,00	
									Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umun Perangkat Daerah yang Disediakan	100%	60%	0%	23%	17%	56.283.200,00	33.366.730,00	-	6.854.626,00	15.718.306,00	Maria Eti
									Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	23	15	0	5	3	11.001.300,00	7.801.700,00	-	1.100.760,00	2.037.290,00	
									Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	0	0	0	1	8.531.900,00	2.500.000,00	-	133.866,00	5.660.910,00	
									Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	3	0	2	1	36.750.000,00	23.065.030,00	-	5.620.000,00	8.020.106,00	
									Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0%	0%	10%	90%	128.912.600,00	155.400,00	-	42.124.500,00	86.376.910,00	Maria Eti
									Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	38	0	0	4	34	96.392.200,00	-	-	42.124.500,00	54.128.900,00	
									Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	0	0	0	4	32.520.400,00	155.400,00	-	-	32.248.010,00	
									Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25%	25%	25%	25%	136.051.519,60	35.892.148,00	27.410.388,00	14.839.594,00	52.273.593,00	Maria Eti
									Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	3	3	3	3	44.790.027,60	5.981.760,00	-	1.135.000,00	32.043.871,00	
									Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	3	3	3	3	91.261.492,00	29.910.388,00	27.410.388,00	13.704.594,00	20.229.722,00	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAREGT KINERJA	REALISASI TARGET KINERJA TRIULAN				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET	HASIL YANG DICAPAI				JUMLAH ANGRAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB	
				TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4		TW1	TW2	TW3	TW4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
								Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6%	39%	17%	39%	105.732.700,00	2.650.000,00	-	6.293.553,00	92.490.093,00	Maria Eti	
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Proses Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	22	0	6	2	10	103.182.700,00	1.500.000,00			6.293.553,00	91.090.093,00	
								Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	4	3		6	2.550.000,00	1.150.000,00	-		-	1.400.000,00	
2	Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,91	-	-	-	80,66	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	75%	100%	325%	100%		3.010.500,00	5.160.000,00	1.113.498,00	15.475.325,00	Donatus Salvaritus	
3	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Daya Dukung Daya Daampung	0,50				0,00	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%	75%	100%	325%	100%		3.010.500,00	5.160.000,00	1.113.498,00	15.475.325,00	Donatus Salvaritus	
								Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	9	12	39	12	24.826.200,00	3.010.500,00	5.160.000,00	1.113.498,00	15.475.325,00		
								PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.	Persentase Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	9%	26%	55%	19%	201.811.988,00	14.750.197,00	27.933.417,00	111.734.727,00	37.532.419,00	Agustinus N. Hamonangan Purb, ST	
									Indeks Kualitas Air (IKA)	62,48				77,50							
									Indeks Kualitas Udara (IKU)	93,73				84,97							
								Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Persentase Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut yang Dilakukan	100%	0%	25%	58%	33%	163.028.088,00	9.029.197,00	18.503.417,00	100.043.027,00	25.593.328,00	Hilarius Hila Keyitmu, SP	
								Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan (Dokumen)	12	0	3	7	4	163.028.088,00	9.029.197,00	18.503.417,00	100.043.027,00	25.593.328,00		
								Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	18%	27%	52%	5%	38.783.900,00	5.721.000,00	9.430.000,00	11.691.700,00	11.939.091,00	Maria Ludgardiana Bora, SH	
								Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	60	11	16	31	3	38.783.900,00	5.721.000,00	9.430.000,00	11.691.700,00	11.939.091,00		
								PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100%	21%	21%	21%	36%		101.992.364,00	126.637.464,00	97.756.176,00	336.255.260,00	Donatus Salfaritus, ST	
									Persentase RTH	9,40%				9,31%							
								Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100%	21%	21%	21%	36%		101.992.364,00	126.637.464,00	97.756.176,00	336.255.260,00	Florentina Oro, S.Si	
								Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	24,43	6,108	6,108	6,108	6,108	603.287.456,00	101.992.364,00	126.637.464,00	90.926.176,00	269.006.860,00	Yos Heribertus Ledung Lamury, S.Kom	
								Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	4	0	0	0	4	74.557.400,00	-	-	6.830.000,00	67.248.400,00		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAREGET KINERJA	REALISASI TARGET KINERJA TRIULAN				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET	HASIL YANG DICAPAI				JUMLAH ANGRAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
				TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4		TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100%	0%	50%	50%	0%		-	7.290.000,00	5.000.000,00	6.140.316,00	Pius Markus Temakuru, S.Si
								Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	0%	50%	50%	0%		-	7.290.000,00	5.000.000,00	6.140.316,00	Yuliana Nona Nelvin, SKM
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yg Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kab/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yg Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	4	0	2	2	0	18.471.900,00	-	7.290.000,00	5.000.000,00	6.140.316,00	
								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	35%	45%	71%	5%		-	8.280.000,00	7.250.000,00	2.742.606,00	Vinsenzo Ferry Hariyanto, S.Si
									Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	69%				13%						
								Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	35%	45%	71%	5%		-	8.280.000,00	7.250.000,00	2.742.606,00	Maria Antonia Peni Demoor, ST dan Yuliana Elivin Bunga Dey, ST
								Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	55	19	25	39	3	18.827.900,00	-	8.280.000,00	7.250.000,00	2.742.606,00	
								PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	0%	0%	71%	18%		-	2.390.000,00	29.975.900,00	88.707.478,00	Vinsenzo Ferry Hariyanto, S.Si
									Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	50%				50%						
								Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan ling.khidup untk lembaga kemasyr. Tingkt daerah kab/kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	0%	0%	71%	18%		-	2.390.000,00	29.975.900,00	88.707.478,00	Maria Antonia Peni Demoor, ST dan Yuliana Elivin Bunga Dey, ST
								Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	11	0	0	6	3	0		2.390.000,00	26.392.200,00	53.396.579,00	
								Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	6	0	0	6	0	0		-	3.583.700,00	35.310.899,00	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAREGET KINERJA	REALISASI TARGET KINERJA TRIULAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET	HASIL YANG DICAPAI				JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB	
				TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4		TW1	TW2	TW3	TW4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
								PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	35%	98%	18%	33%		-	10.890.000,00	4.004.000,00	16.685.401,00	Vinsenzo Ferry Hariyanto, S.Si	
								Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota	100%	35%	98%	18%	33%		-	10.890.000,00	4.004.000,00	16.685.401,00	Maria Angelina Odje Lalu, SH	
								Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	25	6	5	5	6	26.386.800,00	-	8.390.000,00	2.704.000,00	14.885.331,00		
								Sub Kegiatan Penerapan Sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/ kota (Sanksi)	15	8	34	2	7	5.847.000,00	-	2.500.000,00	1.300.000,00	1.800.070,00		
								PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang tertangani	100%	5%	5%	5%	55%	3.910.336.200,00	906.967.161,00	879.054.828,00	732.578.831,00	1.209.684.603,00	Pius Markus Temaluru, S.Si	
									Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (KPS) (poin)	70											
								Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	100%	5%	5%	5%	55%	3.910.336.200,00	906.967.161,00	879.054.828,00	732.578.831,00	1.209.684.603,00	Pius Markus Temaluru, S.Si	
								Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	8	0	0	0	4	15.468.500,00	-	-	1.330.867,00	13.969.563,00		
								Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2	0	0	0	2	104.905.900,00	-	-	250.002,00	103.447.042,00		
								Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengelolaan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biogester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biogester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	15.350,40	2.232	2.085	2.687	2.887	3.789.961.800,00	906.967.161,00	879.054.828,00	730.997.962,00	1.092.267.998,00		


 Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Sikka,
DRS. ADEODATUS BUANG DA CUNHA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660516 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PANITIA HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80, KABUPATEN SIKKA

Piagam Penghargaan

diberikan kepada

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA

sebagai

Juara 1 Kreasi Busana Kategori Umum

dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80
tingkat Kabupaten Sikka

80

**Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju**



Maumere, 24 Agustus 2025

Bupati Sikka

Juventus Prima Yoris Kago



Tabel Capaian Kinerja Program dan Kegiatan dan Target Realisasi Anggaran Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama/Program dan Kegiatan	Tahun 2025				Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPR
					Satuan	Target	Realisasi Kinerja				
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,91	80,66				
				Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung	Indeks	0,5	0		Data perhitungan DDT yang ada, diambil dari data DDT KLHS RPJMD yang rentang waktunya adalah 5 tahun dan bukan berasal dari kegiatan rutin harian/ bulanan perangkat daerah yang dapat ditentukan capaiannya setiap trisemester/tahunnya. KLHS RPJMD pun belum dipantau pelaksanaannya sehingga belum dapat diperoleh nilai capaiannya.		
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,5	78,20		Nilai SAKIP masih menggunakan nilai hasil evaluasi tahun 2024, untuk tahun 2025 belum dilakukan evaluasi oleh Inspektora. Target 2025 ditetapkan lebih besar dari capaian 2024 sehingga perhitungan kinerja tidak sampai 100% atau belum mencapai target nilai 78,50	DLH berupaya meningkatkan nilai SAKIP tahun 2025 dengan melaksanakan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh Inspektoral.	
1	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran serta Kinerja dalam pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100	100,00				
				Indikator Program : Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)							
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	10				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100,00				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	490	490		Terdapat 1 orang pegawai DLH yang pensiun dan 1 orang mutasi ke Dinas PUPR		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0	0				
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	23	23				
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1	1				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	6				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	38	38				
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	4	4				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	22	22				
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	9	9				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama/Program dan Kegiatan	Tahun 2025			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPR
					Satuan	Target	Realisasi			
			Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	%	100	100			
				<i>Indikator Program : Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Dilindakanjuti</i>	%	85	100			
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	%	100	100			
				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	12	72	Penetapan Target terlalu rendah, tidak berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Keterangan : Target 2025 12 rekomendasi, realisasi 72 rekomendasi.	Penetapan Target Tahunan minimal menyesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya	
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	%	100	100			
				<i>Indikator Program : Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara</i>	Indeks	62,48 93,73	77,50 84,97	Penurunan Indeks Kualitas Udara dikarenakan adanya penambahan parameter barudan terjadinya pemaparan tahap I akibat letusan gunung berapi Lewotobi		
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	%	100	100			
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen	12	14	Pengujian masih dikirim ke UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi NTT. DLH Kab hanya melakukan pengambilan sampel di lapangan		
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	%	100	100			
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Laporan	60	61			
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	%	100,00	100,00			
				<i>Indikator Program : Persentase RTH</i>	%	9,40	9,31	Realisasi 9,31% RTH merupakan lusan kawasan RTH perkotaan berbanding dengan luas perkotaan Maumere. Belum 100% mencapai target 9,40% dikarenakan fasilitas dan ketersediaan SDM untuk mendukung pengelolaan RTH belum memadai. Idealnya disetiap titik RTH terdapat 1 sumber air untuk kebutuhan penyiraman. Adapun perhitungan baik target maupun realisasi meliputi RTH publik yang dikelola Pemda Sikka dan tidak termasuk RTH privat.		
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	%	100	100			
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ha	29,47	29,4744			
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit	4	4	Terdiri dari : Konservasi mata air di mata air Ilinmedo, mata air Wuring, mata air Runut, mata air Tanarawa (penanaman anakan pohon ara, beringin, pala dan rambesi)		
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	%	100	100			
				<i>Indikator Program : Persentase Limbah B3 yang dikelola</i>	%	100	100			
				Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Dokumen	4	4			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama/Program dan Kegiatan	Tahun 2025				Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPR
					Satuan	Target	Realisasi				
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	%	100	100				
				<i>Indikator Program :</i> <i>Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota(%)</i>	%	69	18,84		Terhadap indikator program yaitu ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Adapun kegiatan pengawasan dilakukan terhadap 86 usaha dan/atau kegiatan. Dari jumlah 86 tersebut, terdapat 33 usaha dan/atau kegiatan yang memiliki ijin dan 53 usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki ijin. Dari 33 pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki ijin tersebut, 13 diantaranya setelah dilakukan pemeriksaan diketahui taat dan sisanya sejumlah 18 masuk kategori tidak taat, 1 tidak beroperasi, dan 1 belum beroperasi. Ketaatan yang rendah dikarenakan badan usaha belum memiliki ijin usaha		1) Pemerintah Kabupaten Sikka melakukan penghentian dan penutupan aktivitas penambangan secara permanen di beberapa titik di Daerah Aliran Sungai (DAS) Nanglimang sejak bulan Desember tahun 2024. Penutupan ini telah sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang RTRW yang melarang segala bentuk aktivitas penambangan didalam 3 wilayah kecamatan kota (Alok, Alok Barat dan Alok Timur) - Terhadap rekomendasi DPRD untuk wilayah Kecamatan Waigete terdapat 2 pengusaha penambang yaitu PT. Nusa Tenggara Jaya (PT. NTJ) yang masa laku ijin Usaha Penambangan (IUP) sampai dengan tahun 2029 dan untuk pengusaha penambang lainnya yaitu CV. Kompak Indah yang masa berlaku IUP selesai pada bulan Oktober 2025 dan saat ini sedang melakukan proses permohonan pengajuan perpanjangan IUP. Terhadap kedua pengusaha penambangan di Waigete yang sudah mengantongi IUP sebelumnya maka aktivitas pengawasan penambangannya langsung diawasi oleh Inspektur Tambang (Dirjen Minerba Kementerian ESDM) - Pemerintah Kabupaten Sikka telah mengeluarkan surat penghentian sementara aktivitas penambangan di Desa Watu Omok - Kecamatan Talibura oleh 2 penambang yaitu CV. Putera Telaga Wangi dan CV. Lembah Talenta dan diarahkan untuk segera menyelesaikan proses pengurusan ijin Usaha Penambangan (IUP). - Terhadap catatan DPRD terkait aktivitas penambangan di Desa Nello Lorang Kecamatan Nello, Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi NTT dan Inspektur Tambang untuk melakukan pengawasan terhadap 2 pelaku penambangan tersebut, karena kedua pelaku usaha tersebut telah mengantongi ijin WIUP dan IUP eksplorasi dan sementara berproses menuju IUP operasi produksi (IUP op) sehingga berdasarkan regulasi, kewenangan pengawasan dan penghentian aktivitas tambang menjadi kewenangan Inspektur Tambang (Dirjen Minerba Kementerian ESDM) 2) Pemerintah Kabupaten Sikka melalui terus melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sehubungan dengan kajian dan rekomendasi layak lingkungan terkait dasar untuk penerbitan IUP operasi produksi (IUP op) terhadap pemohon yang berasal dari Kabupaten Sikka sesuai dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan regulasi.
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100				
				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Badan Usaha	55	86				
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	%	100,00	90,91				
				<i>Indikator Program :</i> <i>Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya</i>	%	50,00	50,00		Penetapan target program berupa Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya, dengan target sampai akhir periode renstra sebesar 100% dengan jumlah 12 Kelompok Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya. Untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 50% dari 12 kelompok tersebut yaitu sebanyak 6 kelompok		
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	90,91	90,91			
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dokumen	11	9	81,82	Pendampingan terhadap 1 KPSA di Pulo-Desa Iligai- Kecamatan Lela yang merupakan Pokir dai Ibu Linda tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi. Selain itu juga terdapat 1 KPSA Desa Natamage yang setelah mengikuti kegiatan sosialisasi bahkan telah memiliki SK Tim namun ditengah jalan mengundurkan diri dikarenakan tidak siap akibat pembibitan yang terlambat dilakukan	DLH melalui Bidang Peneatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup telah berupaya untuk berkomunikasi dengan KPSA Desa Natamage namun KPSA yang bersangkutan secara tegas menyatakan tidak siap. Oleh karena itu, alokasi anggaran yang telah disiapkan untuk KPSA tersebut dialihkan ke 3 KPSA lainnya yang terlibat dalam kegiatan ini.	
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kelompok	6	6	100	Masing-masing kelompok terdiri dari 40 orang (6*40=240 orang)		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama/Program dan Kegiatan	Tahun 2025				Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPR
					Satuan	Target	Realisasi				
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	%	100	100				
				Indikator Program : Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	100	100		Terselesaikannya 22 pengaduan		
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	%	100	100				
				Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Pengaduan	25	22				
				Penerapan Sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Sanksi	15	51				
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	%	100	71,48				
				Indikator Program : Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	70	0		Hasil perhitungan nilai IKPS Tahun 2025 untuk Kabupaten Sikka belum muncul dalam aplikasi SIPSN karena belum divalidasi	DLH berupaya melengkapi sejumlah data dan dokumen yang menjadi catatan dari pihak provinsi dan kementerian dalam SIPSN sehingga dapat divalidasi dan nilai IKPS dapat segera diperoleh	3) Terhadap saran DPRD akan menjadi perhatian pemerintah untuk mendesain teknis pelaksanaannya mengingat tidak semua warga/pelanggan PDAM yang mendapatkan layanan penanganan sampah begitupun sebaliknya.
				Pengelolaan Sampah	%	100	71,48	71,48			
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok	8	4	50			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Unit	2	2	100			
				Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengelolaan Sampah di Instalasi Pengelolaan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	15.350,40	9.892,19	64,44	Banyak penumpukan sampah di tempat penampungan yang disediakan 3 mobil dump truck mengalami kerusakan sehingga pengangkutan sampah menjadi terhambat Banyak tenaga kebersihan yang lolos PPPK tahap 2 optimalisasi dan ditempatkan di instansi lain sehingga tidak menjalankan tugas rutin sebagaimana mestinya	DLH berupaya menambah ritasi pengangkutan sampah untuk menangani timbulan sampah DLH menggabungkan shift pagi dan shift siang untuk memaksimalkan pengangkutan sampah Adanya Surat Bupati Sikka Nomor: BKDPSDM.800/871/2025 tanggal 17 November 2025 untuk pemanggilan kembali para PPPK tersebut untuk kembali bertugas di DLH	
						100,00	95,82				

Mauwere, 21 Januari 2026

 Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

IGIHANES B. KRISTOFORUS PUTU BOTHA, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19741115 200012 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jend. Sudirman No. 94 Maumere, 86111 Telp. (0382)2400428
Pos Elektronik: dinaslingkunganhidupsikka@gmail.com

DATA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) - PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2025

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Drs. Adeodatus Buang da Cunha NIP. 19660516 199903 1 006	Pembina Utama Muda, IV/c	Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
2	Gaudensius Nong Pio, ST., MT. NIP. 19810711 200501 1 008	Pembina Tingkat I, IV/b	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
3	Donatus Salfaritus, ST NIP. 19690702 200012 1 003	Pembina, IV/a	Kabid. Tata Lingkungan	
4	Pius Markus Temaluru, S.Si NIP. 19730711 200212 1 005	Pembina, IV/a	Kabid. Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	
5	Vinsenzo Ferry Hariyanto, S.Si NIP. 19750612 200604 1 006	Pembina, IV/a	Kabid. Penaatan & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
6	Agustinus N. H. Purba, ST NIP. 19740809 200604 1 006	Pembina, IV/a	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
7	Maria Ludgardiana Bora, SH NIP. 19711001 200003 2 004	Penata Tingkat I, III/d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	
8	Maria Antonia Peni Demoor, ST NIP. 19790220 200501 2 009	Penata Tingkat I, III/d	Pengawas Lingkungan Ahli Muda	
9	Hilarius Hila Keytimu, SP NIP. 19780119 200604 1 010	Penata Tingkat I, III/d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	
10	Maria Eti NIP. 19680508 199003 2 006	Penata Tingkat I, III/d	Kasubag. Keuangan dan Aset	
11	Yos H. Ledung Lamury, S.Kom NIP. 19750507 200804 1 002	Penata Tingkat I, III/d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	
12	Maria Anggelina Odje Lalu, SH NIP.19780626 200903 2 003	Penata Tingkat I, III/d	Analisis Hukum Ahli Muda	
13	Yuliana Elivin Bunga Dey, ST NIP. 19830711 201001 2 028	Penata Tingkat I, III/d	Pengawas Lingkungan Ahli Muda	
14	Yuliana Nona Nelvin, SKM NIP. 19860718 201001 2 038	Penata Tingkat I, III/d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	
15	Florentina Oro, S.Si NIP. 19830626 201101 2 005	Penata Tingkat I, III/d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	
16	Sebastianus Nong Joni NIP. 19750919 199903 1 005	Penata Muda Tingkat I, III/b	Penelaah Teknis Kebijakan/ Bendahara Penerimaan	

17	Maria E. Moo Gama Puteri, ST NIP. 19850531 201903 2 004	Penata Muda Tingkat I, III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	
18	Christofora M. W. Nong Goa, S.Si NIP. 19880411 201903 2 005	Penata Muda Tingkat I, III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	
19	Aprianus Clause Marton Gajo, ST NIP. 19900424 202203 1 001	Penata Muda, III/a	Penelaah Teknis Kebijakan	
20	Edelbertha Dolores da Cunha, ST NIP. 19950320 202203 2 002	Penata Muda, III/a	Penelaah Teknis Kebijakan	
21	Mariana Stevania Ina Sabon, S.Ak NIP. 19970619 202203 2 004	Penata Muda, III/a	Penelaah Teknis Kebijakan	
22	Maria Trince Yesi Almuth NIP. 19810513 200801 2 019	Penata Muda, III/a	Penelaah Teknis Kebijakan / Bendahara Pengeluaran	
23	Chantica S. Putri Bunganaen, ST NIP.20001003 202506 2 012	Penata Muda, III/a	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	
24	Maria Dua Djia, S.Sos NIP. 19980310 202506 2 009	Penata Muda, III/a	Analisis Aparatur SDM Ahli Pertama	
25	Maximilianus M. Kolbe Kung, S.Ak NIP.19970814 202506 1 008	Penata Muda, III/a	Perencana Ahli Pertama	
26	Monika Trisna, S.Ak NIP. 19991025 202506 2 005	Penata Muda, III/a	Perencana Ahli Pertama	
27	Aloysius Yulius Angga Deddy A NIP. 19730717 201212 1 001	Pengatur Tingkat I, II/d	Pengadministrasi Perkantoran / Pembantu Bendahara	
28	Reinardus P. Bereok Namang, Amd 19861205 202203 1 001	Pengatur, II/c	Pengelola Layanan Operasional	
29	Antonius Yulianus NIP. 19800701 200801 1 018	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	Operator Layanan Operasional	
30	Pati Maramba Nau NIP. 19850507 200801 1 008	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	Operator Layanan Operasional	
31	Arfinus Marianus Ratu NIP. 19831124 200901 1 006	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	Operator Layanan Operasional	
32	Fransiskus Borgias NIP. 19681010 200701 1 056	Pengatur Muda Tingkat, II/b	Operator Layanan Operasional	
33	Melkior Suwanto NIP. 19730412 200901 1 002	Pengatur Muda, II/a	Operator Layanan Operasional	
34	Hironimus Mia Mawe NIP. 19790808 200801 1 012	Pengatur Muda, II/a	Operator Layanan Operasional	
35	Mikael Nong Erdis Moa NIP. 19820601 200801 1 010	Juru Tingkat I, I/d	Operator Layanan Operasional	

Data Pegawai Pensiun dan Mutasi :

1	Marselus Lado NIP. 19670928 199401 1 001	Penata , III/c	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Pensiun per 1 Oktober 2025
2	Marinus Marianto Kasang NIP. 19730108 200801 1 009	Pengatur, II/c	Pranata Taman	Mutasi ke Dinas PUPR per 14 Juli 2025

Maumere, 31 Desember 2025

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,



Drs. Adeodatus Bang da Cunha

Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jend. Sudirman No. 94 Maumere, 86111 Telp. (0382)2400428
Pos Elektronik: dinaslingkunganhidupsikka@gmail.com

DATA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2025

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN SEKARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Agustinus Basman Yance Key NIP. 19830829 202521 1 021	Juru Muda / I	Pengelola Umum Operasional	
2.	Anyani Chrislina Tonungtupal NIP. 19970408 202521 2 026	Pengatur Muda / V	Pengadministrasi Perkantoran	
3.	Antonius Silviske NIP. 19830219 202521 1 017	Pengatur Muda / V	Pengadministrasi Perkantoran	
4.	Bernardus Tony Gajo, S.M NIP. 19951011 202521 1 015	Pengatur Muda / V	Pengadministrasi Perkantoran	
5.	Bernadus Afrianto NIP. 19890404 202521 1 039	Juru Muda / I	Pengelola Umum Operasional	
6.	Claudia Paulatrix Casandra NIP. 19960126 202521 2 027	Pengatur Muda / V	Pengadministrasi Perkantoran	
7.	Didakus No Diego NIP. 19951113 202521 1 019	Pengatur Muda / V	Operator Layanan Operasional	
8.	Georgerius R. J. Dwimulyono Date NIP. 19811028 202521 1 028	Pengatur Muda / V	Operator Layanan Operasional	
9.	Ignasius Sega NIP. 19770406 202521 1 019	Juru Muda / I	Pengelola Umum Operasional	
10.	Januarius Pitang Da Gomes NIP. 19920101 202521 1 058	Pengatur Muda / V	Pengadministrasi Perkantoran	
11.	Marianus Paulus NIP.19880620 202521 1 034	Pengatur Muda / V	Pengadministrasi Perkantoran	
12.	Maria Ursulinde Yohana Santikara NIP. 19771129 202521 2 012	Pengatur Muda / V	Operator Layanan Operasional	
13.	Marianus Kristo Pio NIP. 19940512 202521 1 029	Pengatur Muda / V	Operator Layanan Operasional	
14.	Maria Emerensiana Helena Yoseph NIP. 19780508 202521 2 008	Pengatur Muda / V	Operator Layanan Operasional	

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN SEKARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	Novensius Elbeth Parera NIP. 19791124 202521 1 013	Pengatur Muda / V	Operator Layanan Operasional	
16.	Peterus Vermandus Lera NIP. 19820424 202521 1 043	Pengatur Muda / V	Pengadministrasi Perkantoran	
17.	Petrus Hilarius Roni NIP. 19860416 202521 1 028	Pengatur Muda / V	Pengadministrasi Perkantoran	
18.	Samu Allung NIP. 19870802 202521 2 036	Pengatur Muda / V	Pengadministrasi Perkantoran	
19.	Theodatus Bapa NIP. 19760125 202521 1 016	Juru Muda / I	Pengelola Umum Operasional	
20.	Theresia Nona Gilda Dua Paseng NIP. 19740323 202521 2 012	Pengatur Muda / V	Pengadministrasi Perkantoran	
21.	Venda Veronika Sare NIP. 19960310 202521 2 023	Pengatur Muda / V	Pengadministrasi Perkantoran	
22.	Wilfridus Woda NIP. 19750912 202521 1 013	Pengatur Muda / V	Operator Layanan Operasional	
23.	Yanuaris Aquino NIP. 19830128 202521 1 024	Pengatur Muda / V	Pengadministrasi Perkantoran	
24.	Yemy Charles Kamengmau NIP. 19811224 202521 1 014	Pengatur Muda / V	Operator Layanan Operasional	
25.	Yohanes Roso NIP. 19861215 202521 1 027	Pengatur Muda / V	Pengadministrasi Perkantoran	
26.	Yohanes Edison NIP. 19800531 202521 1 013	Pengatur Muda / V	Pengadministrasi Perkantoran	
27.	Yulius Lewar NIP. 19940620 202521 1 029	Pengatur Muda / V	Pengadministrasi Perkantoran	

Maumere, 31 Desember 2025

Pt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,



Drs. Adeodatus Buang da Cunha

Pembina Utama Muda

NIP. 19660516 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jend. Sudirman No. 94 Maumere, 86111 Telp. (0382)2400428
Pos Elektronik: dinaslingkunganhidupsikka@gmail.com

DATA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Yoseph Nerius	Pengemudi Mobil Sampah Amroll	SD/Sederajat	
2	Tomas Tuang	Pengemudi Mobil Sampah Amroll	SD/Sederajat	
3	Hendrikus Wangge	Pengemudi Mobil Sampah Dum Truk	SD/Sederajat	
4	Kristanto Woko	Operator Alat Berat	SD/Sederajat	
5	Nikodemus Meo	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/Sederajat	
6	Nobertus Meo	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/Sederajat	
7	Hieronimus Herianto Suban	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/Sederajat	
8	Yoservus Moan Mitak	Penjaga Malam	SLTA/SMA Sederajat	
9	Gaudensia Agnetis	Tenaga Penyapu Jalan	SLTA/SMA Sederajat	
10	Fransiskus Xaverius	Pengemudi Mobil Sampah Dum Truk	SD/Sederajat	
11	Paskalis Valerianus Tali	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/Sederajat	
12	Andreas Angelus Kakun	Tenaga Pengangkut Sampah	SLTA/SMA Sederajat	
13	Yosef Sumanto	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/ Sederajat	
14	Alfonsus Qzandriano	Tenaga Pengangkut Sampah	SLTA/SMA Sederajat	
15	Dionisius Isidorus Soda	Tenaga Pengangkut Sampah	SLTA/SMA Sederajat	
16	Martinus Jino, S.Pd	Tenaga Pengangkut Sampah	S-1 Semua Jurusan	
17	Ambrosius	Petugas Taman	SD/ Sederajat	
18	Yulianus Irman Ariyanto	Petugas Taman	SD/ Sederajat	
19	Vinsensius Heribertus, S.P	Petugas Taman	S-1 Semua Jurusan	
20	Polikarpus Mangu	Petugas Taman	SLTA/SMA Sederajat	
21	Yohanes Gabriel Kenedy	Petugas Taman	SD/ Sederajat	
22	Yoseph Herman Ngaji	Petugas Taman	SD/ Sederajat	
23	Fransiskus Wilson	Petugas Pemakaman	SLTA/SMA Sederajat	
24	Yosef Hure	Tenaga Penagih Retribusi Sampah	SLTA/SMA Sederajat	
25	Yuyuh Liman Hege	Tenaga Penagih Retribusi Sampah	SLTA/SMA Sederajat	
26	Paulus Nong Once	Pengemudi Mobil Sampah Amroll	SD/ Sederajat	
27	Lubomus Siga	Pengemudi Mobil Sampah Dum Truk	SD/Sederajat	
28	Yoseph Pajo	Pengemudi Mobil Sampah Dum Truk	SD/Sederajat	
29	Anyelo Sero	Pengemudi Mobil Sampah Dum Truk	SD/Sederajat	
30	Gregorius Joris	Pengemudi Mobil Sampah Dum Truk	SD/Sederajat	
31	Yakub Liufeto	Pengemudi Mobil Operasional Dinas	SLTA/SMA Sederajat	
32	Kletus	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/Sederajat	
33	Fransiskus Xaverius Nong	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/Sederajat	

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	Damasus Nagung	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/Sederajat	
35	Yohanes Andriano Sareng	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/Sederajat	
36	Yoseph Maryanto Riba	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/Sederajat	
37	Marianus Oktavianus	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/Sederajat	
38	Yoseph Elvidius Lodan	Tenaga Pengangkut Sampah	SLTA/SMA SEDERAJAT	
39	Wilfridus Alfonares	Tenaga Pengangkut Sampah	SLTA/SMA Sederajat	
40	Dominikus Da Cunha	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/Sederajat	
41	Dolvianus Adrian Onko	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/Sederajat	
42	Yosep Erwin Saputra	Tenaga Pengangkut Sampah	SLTA/SMA Sederajat	
43	Kanisius Jivan Jendi	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/Sederajat	
44	Stefanus Lodang	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/Sederajat	
45	Robertus Mbasa	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/Sederajat	
46	Markus Amon	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/Sederajat	
47	Yulianus Teka	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/Sederajat	
48	Henderikus Nong Jemi	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/Sederajat	
49	Yohanes Aprianus	Tenaga Pengangkut Sampah	SLTA/SMA Sederajat	
50	Agustinus Moat Nai	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/ Sederajat	
51	Siprianus Tiwa Toda	Tenaga Pengangkut Sampah	SLTA/SMA Sederajat	
52	Stefanus Kei	Tenaga Penyapu Jalan	SD/Sederajat	
53	Marselus Eliseus	Tenaga Penyapu Jalan	SD/Sederajat	
54	Yohana Fransiska	Tenaga Penyapu Jalan	SLTA/SMA Sederajat	
55	Yohanes Subang Sogen	Tenaga Penyapu Jalan	SD/ Sederajat	
56	Antonius Taso Ngole	Tenaga Penyapu Jalan	SD/ Sederajat	
57	Hancelinus Hermanto	Tenaga Penyapu Jalan	SD/ Sederajat	
58	Stevenabisier Daryani Namah	Tenaga Penyapu Jalan	SLTA/SMA Sederajat	
59	Ana Maria Tekla, S.E	Tenaga Penyapu Jalan	S-1 Semua Jurusan	
60	Lusia Ere	Tenaga Penyapu Jalan	SLTA/SMA Sederajat	
61	Elisabeth Nona Sandri	Tenaga Penyapu Jalan	SLTA/SMA Sederajat	
62	Ludgardis Elvida Nona Erti	Tenaga Penyapu Jalan	SLTA/SMA Sederajat	
63	Theresia Maria Falvia Robertha	Tenaga Penyapu Jalan	SLTA/SMA Sederajat	
64	Agustina Paulina Avila	Tenaga Penyapu Jalan	SLTA/SMA Sederajat	
65	Maximus Kowan	Tenaga Penyapu Jalan	SLTA/SMA Sederajat	
66	Eminolda Da Penda	Tenaga Penyapu Jalan	SLTA/SMA Sederajat	
67	Alowysius Edelbertus Gagi	Petugas Taman	SLTA/SMA Sederajat	
68	Elidius Due	Petugas Taman	SD/ Sederajat	
69	Yulianus Rewot	Penjaga Tpa	SD/ Sederajat	
70	Sarifudin	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/ Sederajat	
71	Klemens Qwintus	Tenaga Pengangkut Sampah	SLTA/SMA Sederajat	
72	Avelinus Paskalis	Tenaga Pengangkut Sampah	SD/ Sederajat	
73	Aloysia Yahya Oktavia Sedo	Tenaga Penyapu Jalan	SLTA/SMA Sederajat	
74	Alfonsus G. Diaz Viera, SM	Tenaga Penyapu Jalan	S-1 Semua Jurusan	Lulus Di BPKAD
75	Yoseph Yansen	Tenaga Pengangkut Sampah		Pensiun
76	Katarina Aderince	Tenaga Penyapu Jalan		Pensiun

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
77	Maria Fatima	Tenaga Penyapu Jalan		Pensiun
78	Anselmus Harno Dhae	Tenaga Penyapu Jalan		Pensiun
79	Maria Mensiana Merlinda	Tenaga Penyapu Jalan	SLTA/SMA Sederajat	Meninggal Dunia

Maumere, 31 Desember 2025

Ht. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,



Drs. Adeodatus Buang da Cunha

Pembina Utama Muda

NIP. 19660516 199903 1 006

INVENTARISASI DOKUMEN RPPLH
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
TAHUN 2025

1. JANUARI

No	Nama Perusahaan / Penanggung Jawab	Jenis Usaha dan /atau kegiatan	Tanggal dan Nomor Rekomendasi	Penanggung Jawab/No.HP	Luas Area	Alamat Usaha dan/atau Kegiatan		
						Dusun/RT/RW	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1	PT. Indomarco Prismatama / Indomaret	Minimarket	8 Januari 2025/ Disling.660.4/ 03/ I/2025	Williandi / (0341) 752000 / 085335715235	439,53 m2	Jalan Hasanudin, RT.002/RW.001	Kelurahan Beru	Kecamatan Alok Timur
2	Klinik Pratama Kasih Irma	Klinik Pratama	15 Januari 2025/ Disling.660.4/28/I/2025	Meliana Konsita/ 085256595522	76 m2	Jalan Don Juang, RT 001/RW 004	Kelurahan Kota Uneng	Kecamatan Alok
3	PT. Pesona Teluk Maumere	Wisata Selam	20 Januari 2025/ Disling.660.4/ 31/ I/2025	Fredrik Horipun/ 0853 3920 4246	600 m2	Jalan Wairhang (Jalan Lingkungan)	Desa Nangatobong	Kecamatan Waigete
4	PT. Indomarco Prismatama / Indomaret	Minimarket	20 Januari 2025/ Disling.660.4/ 45/ I/2025	Williandi / (0341) 752000 / 085335715235	411,42 m2	Jalan Raya Trans Maumere - Larantuka,Nangahale RT.005/RW.003,	Desa Talibura,	Kecamatan Talibura

TOTAL DI JANUARI : 4 DOKUMEN SPPL

2. FEBRUARI

No	Nama Perusahaan / Penanggung Jawab	Jenis Usaha dan /atau kegiatan	Tanggal dan Nomor Rekomendasi	Penanggung Jawab/No.HP	Luas Area	Alamat Usaha dan/atau Kegiatan		
						Dusun/RT/RW	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1	Klinik Utama Flores Medika	Klinik Utama	4 Februari 2024/ Disling.660.4/48/II/2025	dr. Ekarini Katharina Yuniarti Nabu, Sp.Pk / 081274212010	400 m2	Jalan Wairklau, RT 001/RW.009	Kelurahan Madawat	Kecamatan Alok

INVENTARISASI DOKUMEN RPPLH
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
TAHUN 2025

2	Apotek Flores Medika	Apotek	4 Februari 2024/ Disling.660.4/50/II/2025	dr. Ekarini Katharina Yuniarti Nabu, Sp.Pk / 081274212010	42 m2	Jalan Wairklau, RT 001/RW.010	Kelurahan Madawat	Kecamatan Alok
---	----------------------	--------	--	---	-------	----------------------------------	----------------------	-------------------

TOTAL HINGGA FEBRUARI : 6 DOKUMEN SPPL

3. MARET

No	Nama Perusahaan / Penanggung Jawab	Jenis Usaha dan /atau kegiatan	Tanggal dan Nomor Rekomendasi	Penanggung Jawab/No.HP	Luas Area	Alamat Usaha dan/atau Kegiatan		
						Dusun/RT/RW	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1	PUSKESMAS Wualadu	PUSKESMAS	12 Maret 2025 / Disling. 660.4/ 102/ III/2025	Petrus Herlemus, S.Si, Apt, MH / 0811383881	1.504 m ²	Jln. Simpang Tiga Wualadu, RT/RW:06/05, Dusun Wualadu	Desa Kloangpopot	Kecamatan Doreng
2	Budidaya Sarang Burung Walet	Budidaya Sarang Burung Walet	20 Maret 2025 / Disling.660.4/115 /III/2025	Tobias Joni Temu, SE, MM / 081338081323	450 m2	RT.02/RW.01, Dusun Enak,	Desa Nelle Urung,	Kecamatan Nelle
3	PERUMDA Wair Puan	Pemakaian Air Permukaan Wairterang	21 Maret 2025 / Disling.660.4/ 116.aa /III/2025	Fransiskus Laka, ST., MT / 081339159015			Desa Bola	Kecamatan Bola
4	PERUMDA Wair Puan	Pemakaian Air Permukaan Wair Bekor	21 Maret 2025 / Disling.660.4/ 116.bb /III/2025	Fransiskus Laka, ST., MT / 081339159015			Desa Talibura	Kecamatan Talibura
5	PERUMDA Wair Puan	Pemakaian Air Permukaan Nirangkliung	21 Maret 2025 / Disling.660.4/ 116.cc /III/2025	Fransiskus Laka, ST., MT / 081339159015			Desa Nirangkliung	Kecamatan Nita
6	PERUMDA Wair Puan	Pemakaian Air Permukaan Wair Puan	21 Maret 2025 / Disling.660.4/ 116.dd /III/2025	Fransiskus Laka, ST., MT / 081339159015			Desa Lado Gahar	Kecamatan Nita

INVENTARISASI DOKUMEN RPPLH
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
TAHUN 2025

7	PERUMDA Wair Puan	Pemakaian Air Permukaan Batik Wair	21 Maret 2025 / Disling.660.4/ 116.ee /III/2025	Fransiskus Laka, ST., MT / 081339159015			Desa Koting C	Kecamatan Koting
---	-------------------	---------------------------------------	---	--	--	--	---------------	---------------------

TOTAL DI MARET : 13 DOKUMEN SPPL

Maumere, 31 Maret 2025

Kepala Bidang Tata Lingkungan

Donatus Salfaritus, ST
Pembina
NIP 19690702 200012 1 003

INVENTARISASI DOKUMEN RPPLH
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
TAHUN 2025

4. APRIL

No	Nama Perusahaan / Penanggung Jawab	Jenis Usaha dan /atau kegiatan	Tanggal dan Nomor Rekomendasi	Penanggung Jawab/No.HP	Luas Area	Alamat Usaha dan/atau Kegiatan		
						Dusun/RT/RW	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1	Klinik dan Apotek Fajar	Klinik dan Apotek	8 April 2025 /Disling.660.4/127/IV/2025	Horimidas Lomi, SE / 085237963888	593 m2	Jalan Raya Trans Maumere - Larantuka, RT.01/ RW 01 Dusun Namangjawa	Desa Namangkewa	Kecamatan Kewapante
2	Industri Air Minum dalam Kemasan “MOF” / CV. SAPUTRA JAYA	Industri Air Minum dalam Kemasan	11 April 2025 Disling.660.4/133/IV/2025	Heriyanto Trio / 082144941947	200 m2	Jalan Litbang, RT.001/RW.009	Kelurahan Kota Uneng	Kecamatan Alok

TOTAL DI APRIL : 2 DOKUMEN SPPL

5. MEI

1	PT. Indomarco Prismatama / Indomaret	Minimarket	9 Mei 2025 Disling.660.4/150/V/2025	Williandi / (0341) 752000 / 085335715235	405 m2	Jalan Raya Nita, RT.07/RW.06	Desa Nita	Kecamatan Nita
2	Sumur Bor AMDK Nusra/ CV. INTI BUMI	Pembuatan Sumur Bor untuk Komersil	9 Mei 2025 Disling.660.4/152/V/2025	Andreas Rudi Lae / 081353959999	600 m2	Jalan Don Slipi	Kelurahan Wailiti	Kecamatan Alok Barat

TOTAL DI MEI : 4 DOKUMEN SPPL

6. JUNI

1	Tower Komunikasi/ PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk. Mitratel	Tower Komunikasi	3 Juni 2025/ Disling.660.4/177 /VI/2025	Pande Ketut Mega Adiputra / (021)27933363	103,19 m ²	Dusun Utanwair, RT.001/RW.001	Desa Nangahale	Kecamatan Talibura
2	PT. Indomarco Prismatama / Indomaret	Minimarket	4 Juni 2025/ Disling.660.4/179 / VI /2025	Williandi / (0341) 752000 / 085335715235	439,53 m2	Jalan Jenderal Sudirman, RT.027/RW.008	Kelurahan Waioti	Kecamatan Alok Timur

INVENTARISASI DOKUMEN RPPLH
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
TAHUN 2025

3	PUSKESMAS Kojagete	PUSKESMAS	10 Juni 2025/ Disling.660.4/ 182.b /VI/2025	Petrus Herlemus, S.Si, Apt, MH / 0811383881	6.400 m2	RT 010/RW.005, Dusun Nebura	Desa Kojagete	Kecamatan Alok Timur
4	Klinik Yaspem	Klinik	19 Juni 2025/ DLH.660.4/ 192 /VI/2025	Ir. Agustinus Romualdus Heny / 081239243678	3.895 m2	Jl. Gaja Mada No. 71, RT 004/ RW 006	Kelurahan Madawat	Kecamatan Alok
TOTAL DI JUNI : 8 DOKUMEN SPPL								

Maumere, 2 Juli 2025

Kepala Bidang Tata Lingkungan

Donatus Salfaritus, ST
Pembina
NIP 19690702 200012 1 003

INVENTARISASI DOKUMEN RPPLH
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
TAHUN 2025

7. JULI

No	Nama Perusahaan / Penanggung Jawab	Jenis Usaha dan /atau kegiatan	Tanggal dan Nomor Rekomendasi	Penanggung Jawab/No.HP	Luas Area	Alamat Usaha dan/atau Kegiatan		
						Dusun/RT/RW	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1	PT. Tower Bersama /Mitratel	Menara telekomunikasi	2 Juli 2025 /Disling.660.4/200/VII/2025	Pande Ketut Mega Adiputra / (021)27933363	146,16 m2	Dusun Gentang, RT.002/RW.001	Desa Umagera	Kecamatan Kewapante
2	Rumah Singgah dan Aula Alma	Konstruksi Bangunan gedung	18 Juli 2025 Disling.660.4/222/VII/2025	Sr.Paulina Bule, Alma /081375174441	Aula : 288 m2 ; Rumah Singgah: 570,5 m2	Jalan Wairklau, RT.004/RW.012,	Kelurahan Madawat,	Kecamatan Alok
3	Pemasangan Pipa Distribusi /PERUMDA Wair Pu'an	Instalasi perpipaan	22 Juli 2025 Disling.660.4/227, 229,...283/VII/2025	Fransiskus Laka, ST. MT/081339159915				Kab. Sikka
4	UTD PMI Kab. Sikka	Unit Transfusi Darah	24 Juli 2025 Disling.660.4/227/VII/2025	dr. Pricilia Donna Esperansa Sea /081238173686	784 m2	Jalan Ahmad Yani No.9, RT 006/RW.002	Kelurahan Kota Baru	Kecamatan Alok Timur

TOTAL DI JULI : 32 DOKUMEN SPPL

8. AGUSTUS

1	Warung Bakso King / Gunawan	Rumah Makan	20 Agustus 2025 Disling.660.4/249/VIII/2025	Gunawan / 082153795655	48 m2	Jalan Ahmad Yani,	Kelurahan Wairotang,	Kecamatan Alok Timur
2	Warung Bakso King / Gunawan	Rumah Makan	20 Agustus 2025 Disling.660.4/251/VIII/2025	Gunawan / 082153795655	72 m2	Jalan Sultan Hasanudin, RT.002/RW.001	Kelurahan Beru	Kecamatan Alok Timur

TOTAL DI AGUSTUS : 34 DOKUMEN SPPL

9. SEPTEMBER

1	Bengkel Heaven Motor	Bengkel Motor	10 September 2025/ Disling.660.4/ 262 /IX/2025	Hongdy Santonio / 085299992345	42 m ²	Jl. Don Juang RT 006/ RW 003,	Kelurahan Kota Uneng,	Kecamatan Alok
2	Ruko Sarli	Ruko	12 September 2025/ Disling.660.4/ 268 /IX/2025	Sarli Elisabeth Lomi, SE/ 081338188546	2.940 m ²	Jalan Jenderal Sudirman, RT.027/RW.008	Kelurahan Waioti	Kecamatan Alok Timur
3	Ruko Sinar Makmur	Ruko	12 September 2025/ Disling.660.4/ 270 /IX/2025	Hamzah Susanto / 082230906890	119 m ²	RT.009/RW.004, Koliaduk,	Kelurahan Kota Uneng	Kecamatan Alok Barat
4	Warung Bakso Solo Pak Min	Rumah Makan	15 September 2025/ Disling.660.4/ 274 /IX/2025	Edi Sutopo / 0853 2754 6567	25 m ²	Jl. Anggrek, RT 001/RW.005	Kelurahan Kota Uneng	Kecamatan Alok
5	PT. Tower Bersama /Mitratel	Menara telekomunikasi	16 September 2025/ Disling.660.4/ 278 /IX/2025	Budianto Purwahjo / 02129248900	146,16 m ²	Nitakloang, RT.001/RW.001	Desa Kopong	Kecamatan Kewapante

TOTAL DI SEPTEMBER : 39 DOKUMEN SPPL

Maumere, 30 September 2025

Kepala Bidang Tata Lingkungan

Donatus Salfaritus, ST
Pembina
NIP 19690702 200012 1 003

INVENTARISASI DOKUMEN RPPLH
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
TAHUN 2025

10. OKTOBER

No	Nama Perusahaan / Penanggung Jawab	Jenis Usaha dan /atau kegiatan	Tanggal dan Nomor Rekomendasi	Penanggung Jawab/No.HP	Luas Area	Alamat Usaha dan/atau Kegiatan		
						Dusun/RT/RW	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1	Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Uneng 02 oleh Yayasan Makmur Sejahtera	Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)	6 Oktober 2025 /Disling.660.4/ 292/X/2025	Drs. Sabinus Nabu / 081399301300	960 m2	Jalan Litbang, RT. 004/RW.009,	Kelurahan Kota Uneng,	Kecamatan Alok
2	Indekos FORJI (4G)	Rumah Kos/Penyediaan Akomodasi Lainnya	8 Oktober 2025 Disling.660.4/296/X/2025	Gabriela Epiphania, /008113813989	5.290 m2	Jalan Adisucipto, RT. 021/RW.006,	Kelurahan Waioti,	Kecamatan Alok Timur
3	Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wailiti oleh Yayasan Peduli Nian Tanah Flores	Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)	10 Oktober 2025 /Disling.660.4/ 297/X/2025	Eveline Blandina Andriyani Seran / 085230599234	11.000 m2	Jl. Don Slipi, RT.07/RW.08,	Kelurahan Wailiti,	Kecamatan Alok Barat
4	Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Waioti oleh Yayasan Kangae Mangun Puan	Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)	20 Oktober 2025 /Disling.660.4/ 311/X/2025	Maria Theresia Dua Tei / 085231785141	600 m2	Jalan Jenderal Sudirman, RT. 026/RW.008,	Kelurahan Waioti,	Kecamatan Alok Timur

5	Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Waiklau oleh Yayasan Kangae Mangun Puan	Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)	23 Oktober 2025 /Disling.660.4/ 318/X/2025	Maria Theresia Dua Tei / 085231785141	348 m2	Jalan Litbang, RT.002/RW.009,	Kelurahan Kota Uneng,	Kecamatan Alok
6	Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kangae oleh Yayasan Garuda Bakti Flores	Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)	23 Oktober 2025 /Disling.660.4/ 321/X/2025	Maria Maristanti Dua Ota /0813 3854 3107	1.000 m2	Jalan Wairhubing - Hubin, RT. 015/RW.005, Dusun Wairhubing,	Desa Watuliwung,	Kecamatan Kangae
7	Ruko Robert Tunggal	Ruko	29 Oktober 2025 /Disling.660.4/ 330/X/2025	Robert Tunggal/ 0812 4678 702	484 m2	Jl. Gajah Mada, RT.02 / RW.05,	Kelurahan Kabor,	Kecamatan Alok
8	Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Koting A oleh Yayasan Makmur Sejahtera	Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)	29 Oktober 2025 /Disling.660.4/ 332/X/2025	Drs. Sabinus Nabu / 081399301300	800 m2	Jalan Koting-Nelle, RT. 08/RW.02, Dusun Natar Gete,	Desa Koting A,	Kecamatan Koting
9	Ruko Sinar Agung	Ruko	29 Oktober 2025 /Disling.660.4/ 334/X/2025	Ignasius Istanto/ 082133585558	439 m2	Jl. Bandeng No. 3, RT.03 / RW.01,	Kelurahan Kota Baru,	Kecamatan Alok Timur

TOTAL DI OKTOBER : 9 DOKUMEN SPPL

11. NOVEMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--

12. DESEMBER

1	Indomaret oleh PT. Indomarco Prismatama	Minimarket	23 Desember 2025/ Disling.660.4/ 382 /XII/2025	Andika Artha Pawitrasukma / Suprayogi 082139663975	655 m2	Jalan Gajah Mada, RT.002/RW.007,	Kelurahan Madawat,	Kecamatan Alok
---	---	------------	--	--	--------	----------------------------------	--------------------	----------------

TOTAL HINGGA DESEMBER : 10 DOKUMEN SPPL

Maumere, 31 Desember 2025

Kepala Bidang Tata Lingkungan

Donatus Salfaritus, ST

Pembina

NIP 19690702 200012 1 003

No	Nama Perusahaan / Penanggung Jawab	Jenis Usaha dan /atau kegiatan	Tanggal dan Nomor Rekomendasi	Penanggung Jawab/No.HP	Luas Area	Alamat Usaha dan/atau Kegiatan			KET.
						Dusun/RT/RW	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	
1	SPBU Kota Uneng	SPBU	12 Maret 2025/ Disling.660.4/104/III/2025	Ferdinandus Tommy Chandra/ 08113829800	2.900 m2	Jl. Don Djuang, RT 06/RW 01,	Kelurahan Kota Uneng,	Kecamatan Alok	UKL-UPL
TOTAL : 1 UKL-UPL									

No	Nama Perusahaan / Penanggung Jawab	Jenis Usaha dan /atau kegiatan	Tanggal dan Nomor Rekomendasi	Penanggung Jawab/No.HP	Luas Area	Alamat Usaha dan/atau Kegiatan			KET.
						Dusun/RT/RW	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	
2	PUSKESMAS KOJAGETE	PUSKESMAS	10 Juni 2025 Disling.660.4/182 /VI/2025	Petrus Herlemus, S.Si, Apt.MH / 08113838891	6400 m2	RT 010/RW.005, Dusun Nebura,	Desa Kojagete,	Kecamatan Alok Timur	UKL-UPL
TOTAL : 1 UKL-UPL									

No	Nama Perusahaan / Penanggung Jawab	Jenis Usaha dan /atau kegiatan	Tanggal dan Nomor Rekomendasi	Penanggung Jawab/No.HP	Luas Area	Alamat Usaha dan/atau Kegiatan			KET.
						Dusun/RT/RW	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	

INVENTARISASI DOKUMEN RPPLH
UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL/UPL)
TAHUN 2025

3	Paris Beach Hotel	Hotel/Penginapan	17 Juli 2025 Disling.660.4/218/VII/2025	Stevanus Lengkong / 0822 2953 2698	2.459 m2	Jalan Nairoa, Dusun Wair Habi RT.011/RW.004,	Desa Habi	Kecamatan Kangae	DPLH
TOTAL : 1 DPLH									

Maumere, 30 September 2025

Kepala Bidang Tata Lingkungan

Donatus Salfaritus, ST
Pembina
NIP 19690702 200012 1 003

JUMLAH REKOMENDASI LINGKUNGAN YG DITERBITKAN TAHUN 2025

	JAN-MAR	APRIL-JUNI	JULI-SEPT	OKT-DES	TOTAL
SPPL	13	8	39	10	70
UKL-UPL	1	1			2
DPLH			1		1
Kajian Lingkungan	6	8	4	9	27
JUMLAH	14	9	40	10	73



Kepala Daerah : Juventus Prima Yoris Kago

Luas Wilayah : 1675.36 Km²

Populasi : 324252 Jiwa

Kepala DPRD : Stefanus Sumandi, S.Fil

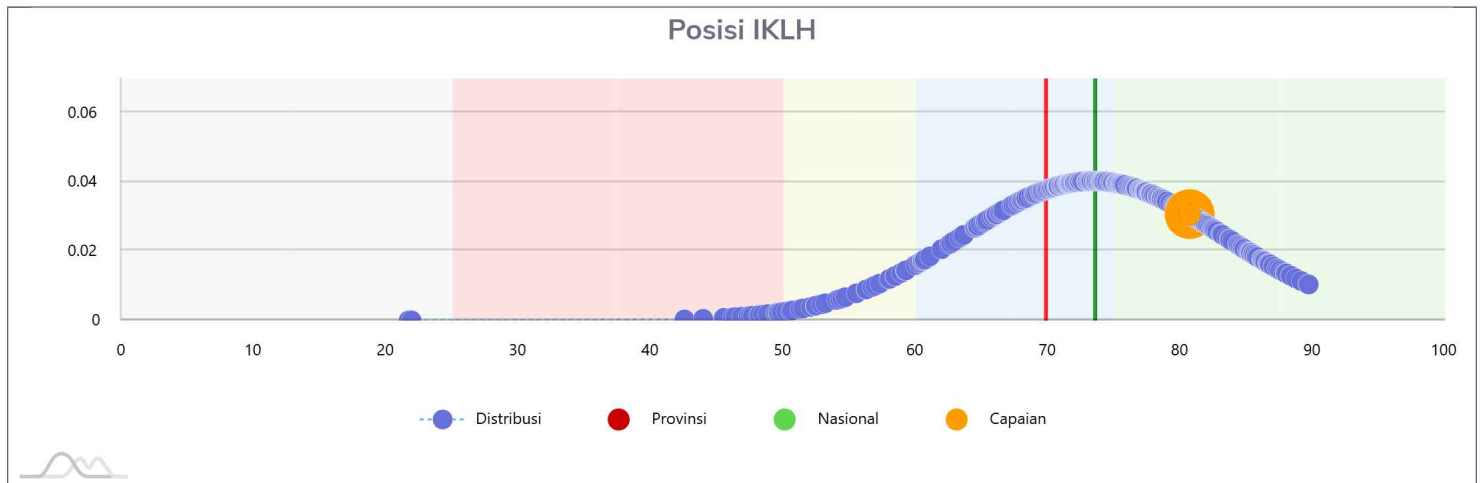
Kategori Daerah : -

Pendapatan Per Kapita : 19850000

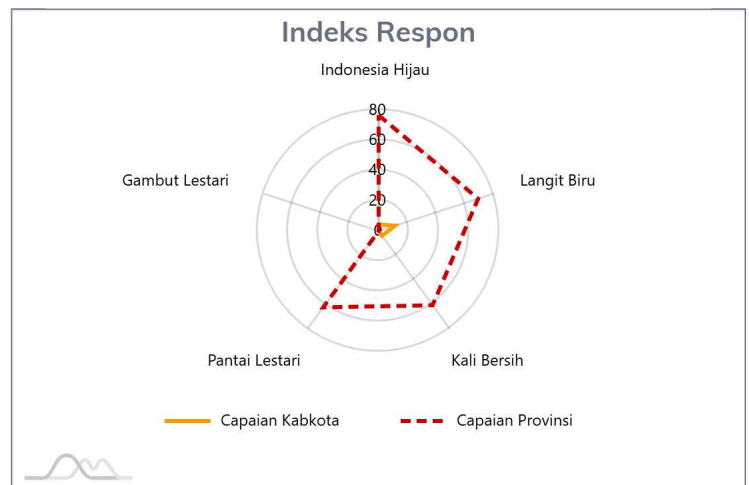
IKLH
80.66
SEDANG

Indeks Respon
5.06

Peringkat
Nasional : 105 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 1 dari 22 Kabupaten/Kota



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
UDARA	4	8	8
AIR	3	6	6
LAHAN	0	1	1
TOTAL	7	15	15



Sebaran Titik Pemantauan

IKA
77.50

SEDANG

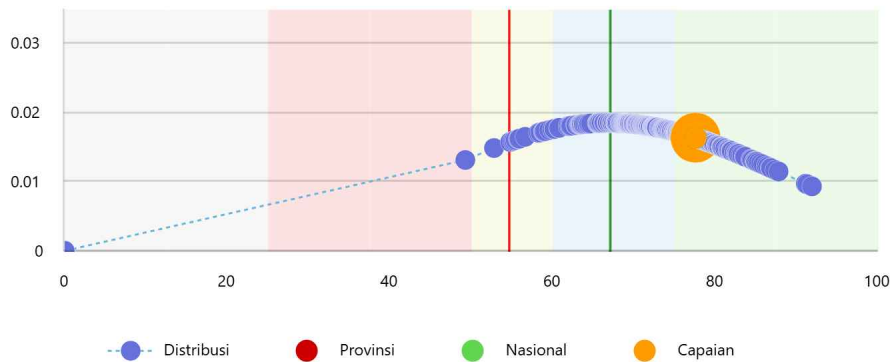
Indeks Respon IKA
3.80

Peringkat

Nasional : 103 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 4 dari 22 Kabupaten/Kota

Posisi IKA



Tren IKA



Data Pemantauan

	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	0	0	0
P3E	0	0	0
PROVINSI	0	0	0
KAB/KOTA	3	6	6
TOTAL	3	6	6

Indeks Respon Air



Sebaran Titik Pemantauan

Rekomendasi

IKU
84.97

SEDANG

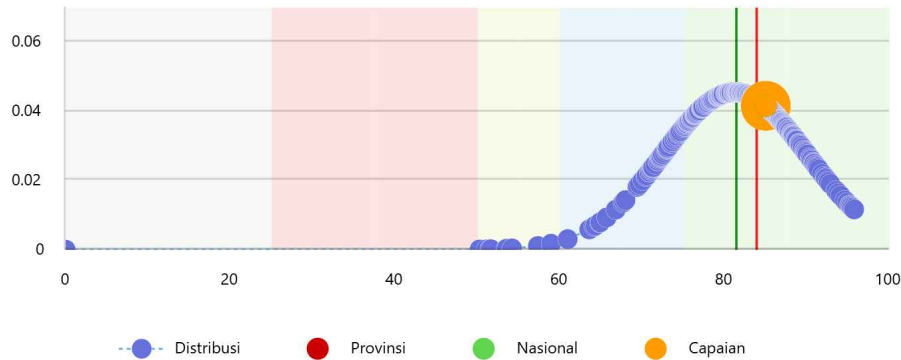
Indeks Respon IKU
11.33

Peringkat

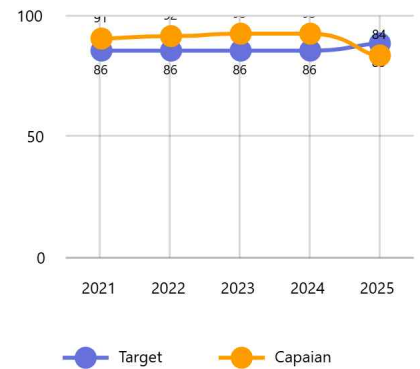
Nasional : 160 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 4 dari 22 Kabupaten/Kota

Posisi IKU



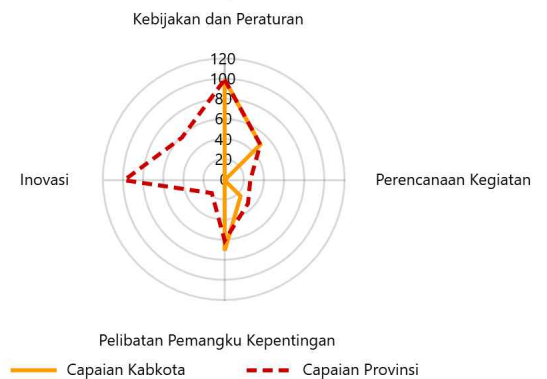
Tren IKU



Data Pemantauan

	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	4	8	8
P3E	0	0	0
PROVINSI	0	0	0
KAB/KOTA	0	0	0
TOTAL	4	8	8

Indeks Respon Udara



Sebaran Titik Pemantauan



Rekomendasi

IKL
78.13

SEDANG

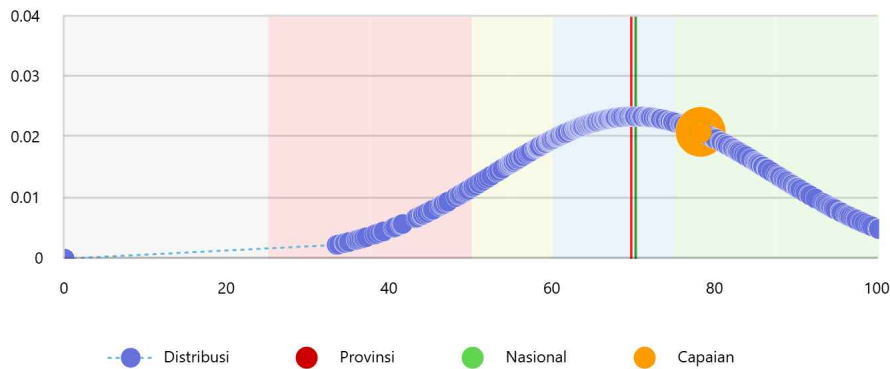
Indeks Respon IKL
4.31

Peringkat

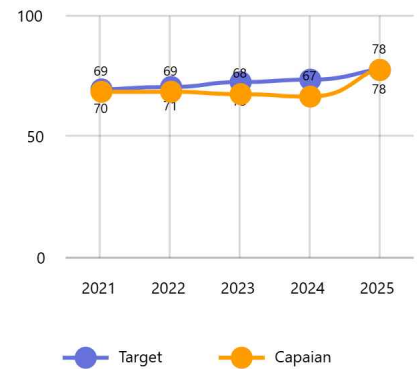
Nasional : 122 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 5 dari 22 Kabupaten/Kota

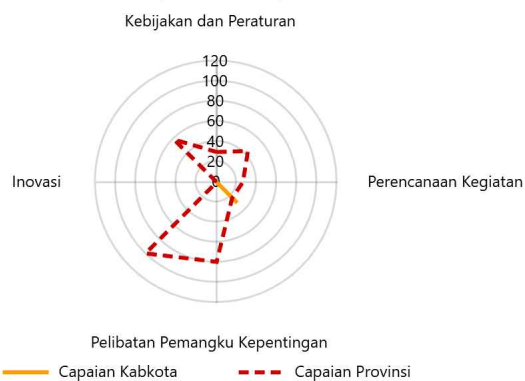
Posisi IKL



Tren IKL



Indeks Respon Tutupan Lahan



Kualitas Tutupan Lahan

Rekomendasi



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jend. Sudirman No. 94 Maumere, 86111 Telp. (0382)2400428
Pos Elektronik: dinaslingkunganhidupsikka@gmail.com

Usaha dan/atau Kegiatan Dilakukan Pemeriksaan

N O	USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN	JENIS KEGIATAN	TANGGAL/ TAHUN PEMERIKSAAN	STATUS	TINDAK LANJUT
1	Peternakan babi Adhy Baluele Dusun Ritat, RT 009/RW 004, Desa Manubura, Kecamatan Nelle/ Pius S.Ghawa	Peternakan babi	Kamis, 13 Februari 2025	TAAT	Tetap melakukan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai ketentuan dalam Dokumen Lingkungan
2	Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Koting di Dusun Kojagete, Desa Koting B, Kecamatan Koting	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumad, 14 Februari 2025	TIDAK TAAT	Wajib menyediakan IPAL Tetap melakukan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai Dokumen Lingkungan yang telah diterbitkan
3	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kopeta di Jalan. Litbang, RT 003/ RW 009 Kelurahan Kota Uneng	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Selasa, 18 Februari 2025	TIDAK TAAT	TPS Limbah B3 perlu dilengkapi dengan palet di dasar lantai agar tidak angsung menyentuh lantai sehingga menghindari timbulnya jamur Tetap melakukan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai Dokumen Lingkungan yang telah diterbitkan
4	Pusat Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Bola, Dusun Bola RT 005/RW 001 Desa Bola Kecamatan Bola	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Rabu, 19 Februari 2025	TIDAK TAAT	TPS Limbah B3 perlu dilengkapi dengan palet di dasar lantai agar tidak langsung menyentuh lantai sehingga menghindari timbulnya jamur Tetap melakukan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai Dokumen Lingkungan yang telah diterbitkan
5	Puskesmas Watubaing di Jalan Trans Maumere - Larantuka, Dusun Baolin Desa Watubaing Kecamatan Talibura	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Rabu, 20 Februari 2025	TIDAK TAAT	Menambah vegetasi pada RTH TPS Limbah B3 perlu dilengkapi dengan palet di dasar lantai agar tidak langsung menyentuh lantai sehingga menghindari timbulnya jamur Limbah cair medis yang berasal dari laboratorium tidak boleh langsung dibuang ke tanah. Sebaiknya disimpan dalam jerigen dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Wajib menyediakan IPAL Tetap melakukan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai Dokumen Lingkungan yang telah diterbitkan

6	Toko dan Penginapan TISARI milik Ihsak DJami Bale, Napunglangir RT.008/RW.001 Kelurahan Wolomarang	Toko dan Penginapan	Selasa, 25 Februari 2025	BELUM BEROPERASI	Tetap melakukan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai Dokumen Lingkungan yang telah diterbitkan
7	UPT Puskesmas Hewokloang berada di Dusun Baosak Desa Heopuat Kecamatan Hewokloang	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Rabu, 26 Februari 2025	TIDAK TAAT	Menambah vegetasi pada RTH Wajib menyediakan IPAL
8	UPT Puskesmas Nelle di Dusun Enak Desa Nelle Urung Kecamatan Nelle	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Rabu, 26 Februari 2025	TIDAK TAAT	Memperhatikan kembali jarak antara lubang peresapan dan bak penampungan air bersih Menambah vegetasi pada RTH Wajib menyediakan IPAL Tetap melakukan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai Dokumen Lingkungan yang telah diterbitkan
9	Pusat Kesehatan Masyarakat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Waigete di Jalan Raya Maumere Larantuka Kecamatan Waigete	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Rabu, 6 Maret 2025	TIDAK TAAT	Perlu berkoordinasi kembali dengan Dinas Kesehatan agar incinerator yang ada dapat difungsikan kembali TPS limbah B3 wajib dilengkapi dengan palet di dasar lantai agar limbah B3 tidak langsung bersentuhan dengan lantai untuk menghindari jamur Pintu TPS limbah B3 wajib dikunci agar meminimalisir kemungkinan ada binatang yang masuk Tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan yang baik
10	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Beru di Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Rabu, 10 Maret 2025	TIDAK TAAT	Wajib menyediakan IPAL Penanganan limbah padat non medis agar dikumpulkan dalam karung dan diangkut dengan truk sampah oleh petugas dari DLH Menyediakan palet pada dasar lantai TPS Limbah B3 Botol infus tidak boleh dibakar namun sebaiknya disimpan pada TPS Limbah B3
11	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Wolomarang Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Kamis, 11 Maret 2025	TIDAK TAAT	Wajib memperbaiki kembali IPAL agar dapat difungsikan Penanganan limbah padat non medis agar dikumpulkan dalam karung dan diangkut dengan truk sampah oleh petugas dari DLH Segera mengurus Dokumen SPPL

12	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Nita di Kecamatan Nita	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Kamis, 13 Maret 2025	TIDAK TAAT	Memperhatikan dan perlu memperbaiki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yaitu dengan pemasangan pintu, penyediaan palet dilantai sehingga limbah medis tidak bersentuhan langsung dengan lantai Pembangunan IPAL disesuaikan dengan standar lingkungan Tetap melakukan pengelolaan lingkungan yang baik
13	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Nanga di Kecamatan Lela	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Kamis, 14 Maret 2025	TIDAK TAAT	Sebelum pembangunan gedung baru, wajib mengurus Dokumen Lingkungan Wajib mengurus izin TPS Limbah B3 dan IPAL
14	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kewapante di Kecamatan Kewapante	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Kamis, 14 Maret 2025	TIDAK TAAT	Memperhatikan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 sesuai dengan arahan Tim Pengawasan Pembangunan IPAL disesuaikan dengan standar lingkungan Tetap melakukan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai dengan Dokumen Lingkungan yang diterbitkan
15	Rumah Sakit St Gabriel Kewapante berada di Desa Namangkewa Kecamatan Kewapante	Rumah Sakit	Rabu, 19 Maret 2025	TIDAK TAAT	Segera memperbaiki IPAL agar dapat difungsikan dengan baik Memperhatikan penyimpanan limbah medis dalam ruangan agar tertutup rapat Tetap melakukan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai dengan Dokumen Lingkungan yang diterbitkan
16	Hotel Lokaria Indah berada di Jalan Raya Maumere Larantuka Kecamatan Kangae	Hotel	Kamis/ 20 Maret 2025	TIDAK TAAT	Wajib menyiapkan lubang resapan untuk limbah cair yang berasal dari dapur Tetap melakukan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai dengan Dokumen Tetap melakukan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai dengan Dokumen Lingkungan yang diterbitkan
17	Hotel Eltari Indah berada di Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok	Hotel	Senin, 24 Maret 2025	TIDAK TAAT	Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka untuk mengurus rekomendasi layak lingkungan Menyediakan resapan sehingga limbah tidak langsung dibuang di drainase kota Menyediakan RTH Tetap melakukan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai ketentuan aturan yang berlaku
18	Hotel Silvia di Kelurahan Madawat Kecamatan Alok	Hotel	Senin, 24 Maret 2025	TIDAK TAAT	Tetap melakukan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai ketentuan aturan yang berlaku.
19	Hotel Go berada di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur	Hotel	Selasa, 24 Maret 2025	TAAT	Perlu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menjadi pelanggan sampah Tetap melakukan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai dengan Dokumen Lingkungan yang diterbitkan

20	Pabrik Tahu Tempe Bintang Jaya berada di Dusun Waipare A RT 009/RW 004 Desa Watumilok Kecamatan Kangae	Pabrik Tahu Tempe	Senin, 19 Mei 2025	TIDAK TAAT	Segera menutup saluran pembuangan yang mengarah ke laut Memperbaiki dan memfungsikan kembali IPAL yang ada yaitu : Air limbah terlebih dahulu diendapkan dalam bak pengendap untuk memisahkan partikel padat yang lebih berat Setelah pengendapan, air limbah disaring menggunakan berbagai media saringan (batu kali, ijuk, arang batok kelapa) - Batu kali : Membantu menyaring kotoran kasar dalam air limbah. - Ijuk : Menyaring kotoran halus yang tersisa setelah saringan batu kali. - Arang batok kelapa: Digunakan untuk menghilangkan bau dan rasa pada air limbah Air limbah yang sudah bersih dapat didesinfeksi menggunakan bahan kimia atau metode lain untuk membunuh bakteri dan virus Setelah itu dapat dialirkan ke lubang resapan Waktu perbaikan selama 3 bulan kemudian akan dilakukan pengawasan untuk mengecek kembali
21	Peternakan ayam pedaging milik Kris Ware berada di RT 027 / RW 002 Kelurahan Wailiti Kecamatan Alok Barat	Peternakan ayam pedaging	Selasa, 20 Mei 2025	TIDAK TAAT	Segera mengurus Dokumen Izin Lingkungan Wajib membersihkan kandang ayam seminggu 2x untuk mencegah terjadinya bau dan lalat disekitar kandang yang dapat mencemari lingkungan sekitar Membuat cor atau pasir yang dimasukan dalam karung yang digunakan sebagai pembatas agar air laut tidak membawa kotoran ke laut Membuat lubang untuk tempat penimbunan kotoran ternak yang telah bercampur dengan sekam padi Memasang terpal untuk mencegah bulu ayam berterbangan di sekitar pemukiman
22	Pabrik Tahu Super Jaya milik Budi Nuryanto di RT 020/ RW 004 Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat	Pabrik Tahu	Selasa, 20 Mei 2025	TIDAK TAAT	IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sederhana untuk pabrik tahu bisa memanfaatkan teknologi biofilter anaerobik-aerobik atau sistem anaerobik baffled reactor (ABR). Pemrakarsa perlu memperbaiki IPAL agar dapat berfungsi dengan baik, yaitu : Air limbah terlebih dahulu diendapkan dalam bak pengendap untuk memisahkan partikel padat yang lebih berat Setelah pengendapan, air limbah disaring menggunakan berbagai media saringan (batu kali, ijuk, arang batok kelapa) -Batu kali: Membantu menyaring kotoran kasar dalam air limbah. - Ijuk: Menyaring kotoran halus yang tersisa setelah saringan batu kali.

					- Arang batok kelapa: Digunakan untuk menghilangkan bau dan rasa pada air limbah Air limbah yang sudah bersih dapat didesinfeksi menggunakan bahan kimia atau metode lain untuk membunuh bakteri dan virus Setelah itu dapat dialirkan ke lubang resapan Perlu menyiram abu hasil pembakaran agar tidak beterbangan terbawa angin
23	Warung Makan Dapur Sambal di Kelurahan Madawat Kecamatan Alok	Warung Makan	Rabu, 21 Mei 2025	TIDAK TAAT	Segera mengurus Dokumen Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Tetap menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan yang baik
24	Warung Makan Ikan Bakar Suroboyo di Jl. Gajah Mada RT 003/RW 006 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok	Warung Makan	Rabu, 21 Mei 2025	TIDAK TAAT	Menutup saluran pembuangan yang menuju drainase kota sehingga limbah cair langsung masuk ke lubang resapan Membersihkan endapan minyak dan lemak
25	Pabrik Pengolahan Ikan CV. Biru Laut berada di Bebeng Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat	Pabrik Pengolahan Ikan	Kamis, 22 Mei 2025	TIDAK TAAT	Membersihkan sampah plastik yang berada di permukaan air pada lubang resapan Menutup lubang resapan Menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan melakukan pengelolaan lingkungan yang baik
26	Pengolahan Ikan CV. Citra Bajo Sejahtera di Wailiti RT 018/RW 003 Kelurahan Wailiti Kecamatan Alok Barat	Pengolahan Ikan	Kamis, 22 Mei 2025	TIDAK TAAT	Dilarang membuang limbah pengolahan ikan di laut Segera membuat lubang resapan dengan jangka waktu 6 bulan. Tim dari DLH akan melakukan monitoring pengawasan kembali untuk mengecek adanya lubang resapan
27	Warung Makan Podoroso milik Wibowo berada di Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur	Warung Makan	Jumad, 23 Mei 2025	TAAT	Tetap memperhatikan kebersihan lingkungan usaha dan/atau kegiatan sehingga tidak berdampak pada masyarakat setempat
28	Warung Bakso King milik Gunawan di RT 002/RW 001 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur	Warung Makan	Jumad, 23 Mei 2025	TAAT	Segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengurusan Rekomendasi Layak Lingkungan Tetap memperhatikan kebersihan lingkungan usaha dan/atau kegiatan sehingga tidak berdampak pada masyarakat setempat
29	Peternakan ayam pedaging milik Yosefus Oskarito di Jalan samping gereja RT.016/RW.005 Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat	Peternakan ayam pedaging	Senin, 26 Mei 2025	TAAT	Menyimpan sisa-sisa sekam yang masih berada dalam karung dalam ruangan tersendiri Karung bekas sekam dan pakan disimpan dengan baik dalam ruangan Perhatikan bulu ayam yang berterbangan ketika ayam sudah mencapai usia 20 hari sehingga tidak berpengaruh pada lingkungan sekitar usaha Tetap memperhatikan kebersihan lingkungan yang sudah ditentukan dalam Rekomendasi Layak Lingkungan yang sudah diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

30	Warung Makan Angkringan Lestari di Kelurahan Kabor Kecamatan Alok	Warung Makan	Senin, 26 Mei 2025	TIDAK TAAT	Segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengurusan Rekomendasi Layak Lingkungan Segera memasang penyaring pada got yang berada dalam dapur sehingga air yang mengalir ke drainase kota tidak bercampur dengan sebagian kecil sisa makanan Tetap memperhatikan kebersihan lingkungan usaha dan/atau kegiatan sehingga tidak berdampak pada masyarakat setempat
31	Perumahan Alok Indah 2 berada di Jl K.S Tubun Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur	Perumahan Alok Indah 2	Selasa, 27 Mei 2025	TIDAK TAAT	Wajib membuat TPS untuk penyimpanan sementara sampah dari rumah – rumah, agar dapat diangkut oleh petugas kebersihan dan wajib membayar retribusi sampah Tidak boleh membakar sampah Segera membangun lubang resapan untuk pembuangan dari drainase
32	Indomaret Moa Toda di RT.008/RW.002 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur	Toko	Selasa, 27 Mei 2025	TAAT	Tetap melakukan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai ketentuan yang tertera pada SPPL
33	Indomaret Anggrek di RT.001/RW.002 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok	Toko	Selasa, 27 Mei 2025	TAAT	Tetap melakukan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai ketentuan yang tertera pada SPPL
34	Pabrik Tahu Tempe “Qonita” di Dusun Jedawair RT.01/RW.01 Desa Geliting Kecamatan Kewapante	Pabrik Tahu Tempe	Rabu, 28 Mei 2025	TIDAK TAAT	Pemrakarsa dilarang membuang limbah cair ke laut Pemrakarsa wajib menyediakan IPAL. Pemrakarsa dilarang membuang limbah cair ke laut Pemrakarsa wajib menyediakan IPAL. IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sederhana untuk pabrik tahu bisa memanfaatkan teknologi biofilter anaerobik-aerobik atau sistem anaerobik baffled reactor (ABR) dengan metode : a/.Air limbah terlebih dahulu diendapkan dalam bak pengendap untuk memisahkan partikel padat yang lebih berat b/. Setelah pengendapan, air limbah disaring menggunakan berbagai media saringan (batu kali, ijuk, arang batok kelapa. Batu kali: Membantu menyaring kotoran kasar dalam air limbah. Ijuk: Menyaring kotoran halus yang tersisa setelah saringan batu kali. Arang batok kelapa: Digunakan untuk menghilangkan bau dan rasa pada air limbah c/. Air limbah yang sudah bersih dapat di desinfeksi menggunakan bahan kimia atau metode lain untuk membunuh bakteri dan virus Hasil dari IPAL kemudian dapat dialirkan ke lubang resapan Memperbaiki kembali resapan sehingga bisa dimanfaatkan

					Segera memasang cerobong asap Menutup pipa pembuangan sehingga limbah cair masuk semua ke resapan dan tidak dibuang ke laut Tetap memperhatikan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak berdampak dan meresahkan masyarakat disekitar usaha dan/atau kegiatan Mematuhi point-point yang tertera dalam Rekomendasi Layak Lingkungan yang sudah diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup
35	Pengolahan Kulit Sapi oleh UD. Mandiri Barokah berada di RT.031/RW.006 Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat	Pengolahan Kulit Sapi	Senin, 16 Juni 2025	TAAT	Tetap menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik
36	Industri Furniture oleh PT. Putra Timor Sentosa berada di Jalan Raya Magepanda RT.019/RW.004 Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat	Industri Furniture	Senin, 16 Juni 2025	TAAT	Limbah padat lainnya yang tidak diolah kembali agar dikumpulkan dan bekerjasama dengan DLH untuk pengangkutan Tetap menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik Menjadi pelanggan sampah dan membayar retribusi sampah setiap bulan
37	Alfamart Wairotang berada di Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur	Toko	Selasa, 17 Juni 2025	TAAT	Wajib menyediakan tanaman hijau dalam pot untuk diletakkan disekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan Tetap melakukan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai Dokumen Lingkungan yang dikeluarkan
38	Warung Makan Nano Nano berada di Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur	Warung Makan Nano Nano	Selasa, 17 Juni 2025	TIDAK TAAT	Menjaga kebersihan lokasi dengan membersihkan halaman belakang warung Akan dilakukan mediasi bersama penanggungjawab Rumah Makan Lamongan dan pemilik lahan untuk mengatasi permasalahan limbah cair
39	Rumah Makan Lamongan berada di Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur	Rumah Makan	Selasa, 17 Juni 2025	TIDAK TAAT	Akan dilakukan mediasi bersama penanggungjawab Warung Makan Nano Nano dan pemilik lahan untuk mengatasi permasalahan pembuangan limbah cair
40	Warung Makan Bakso King berada di Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur	Warung Makan	Selasa, 17 Juni 2025	TIDAK TAAT	Segera mengurus Dokumen Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Tetap menjaga kebersihan dan melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik
41	Tahu Tempe Putra Fajar Kelurahan Wairotang	Pabrik Tahu Tempe	Rabu, 25 Juni 2025	TAAT	Tetap memperhatikan kebersihan lingkungan usaha dan/atau kegiatan sehingga tidak berdampak pada masyarakat setempat

42	Pengolahan Tahu milik Hermin Tanlu Pali Padeng di Kelurahan Waioti	Pengolahan Tahu	Rabu, 25 Juni 2025	TIDAK TAAT	Segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengurusan Rekomendasi Layak Lingkungan Wajib membuat IPAL dan lubang resapan agar limbah tidak di buang ke laut Wajib memperbaiki cerobong asap. Cerobong asap di buat setinggi atap pabrik Tetap memperhatikan kebersihan lingkungan usaha dan/ atau kegiatan sehingga tidak berdampak pada masyarakat setempat
43	Pabrik Tahu Tempe UD Sido Moro RT.021/ RW.004 Kelurahan Wolomarang	Pabrik Tahu Tempe	Kamis, 26 Juni 2025	TAAT	Tetap memperhatikan kebersihan lingkungan usaha dan/atau kegiatan sehingga tidak berdampak pada masyarakat setempat
44	Pabrik Tahu Tempe UD AJN Mas di RT. 030/ RW.006 Kelurahan Wolomarang	Pabrik Tahu Tempe	Kamis, 26 Juni 2025	TIDAK TAAT	Tetap memperhatikan kebersihan lingkungan usaha dan/atau kegiatan sehingga tidak berdampak pada masyarakat setempat Limbah padat tidak boleh dibakar, namun dikumpulkan dan dibuang ke container sampah
45	Pertambangan di Watutena Desa Nelle Lorang Kecamatan Nelle	Penambangan di Desa Nelle Lorang, Kecamatan Nelle	Jumad, 4 Juli 2025	TIDAK TAAT	Agar pelaksanaan rapat dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga permasalahan ini dapat segera diatasi
46	Pertambangan di Desa Watu Gong Kecamatan Alok Timur	Pertambangan di Desa Watu Gong, Kecamatan Alok Timur	Jumad, 4 Juli 2025	TIDAK TAAT	Agar pelaksanaan pertemuan bersama penambang dan sopir dapat berjalan sesuai jadwal yang sudah direncanakan
47	Laundry Arema milik Suharni berada di Jl. Gajah Mada Kelurahan Kabor Kecamatan Alok	Laundry Arema milik Suharni	Selasa, 19 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Segera mengurus Rekomendasi layak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup pada setiap jam kerja Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik
48	Mixue Ice Cream milik Novita berada di Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur	Mixue Ice Cream milik Novita	Selasa, 19 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Segera mengurus Rekomendasi layak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup pada setiap jam kerja Membuat resapan sendiri agar limbah cair dari dapur tidak langsung dibuang ke drainase kota Memasang penyaring pada bak cucian untuk menghindari cepat penuhnya sumur resapan akibat tercampurnya limbah padat dengan limbah cair Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik

49	Perataan Lahan oleh PT Prima Subur di RT.028/RW.003 Kelurahan Wailiti Kecamatan Alok Barat	Perataan Lahan oleh PT Prima Subur	Selasa, 19 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Tim dari Dinas Lingkungan Hidup menyarankan kepada pengawas PT Prima Subur untuk menyampaikan kepada pemilik Alat Berat dalam hal ini PT Prima Subur untuk melakukan normalisasi kali yang telah ada tanpa merubah jalur kali dan memasang batu penyangga pada sisi kiri dan kanan kali agar pada saat musim hujan tiba tidak terjadi banjir Tetap menjaga RTH (tanaman yang ada) tanpa merusaknya Tim akan bersurat kepada PT Prima Subur terkait teknis normalisasi kali
50	Salon Merlin berada di Jl. Diponegoro Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat	Salon Merlin	Selasa, 19 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Mengurus Rekomendasi layak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup pada setiap jam kerja Tetap menjaga kebersihan sekitar usaha Menyarankan untuk membuat resapan agar air limbah hasil cucian tidak dibuang ke media tanah
51	Salon Cika milik Angel berada di Jl. Diponegoro Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat	Salon Cika	Rabu, 20 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Mengurus Rekomendasi layak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup pada setiap jam kerja Tetap menjaga kebersihan sekitar usaha
52	Tiara Barbershop berada di Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur	Tiara Barbershop	Rabu, 20 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Mengurus Rekomendasi layak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup pada setiap jam kerja Tetap menjaga kebersihan sekitar usaha
53	Warung Bakso Mas Narto milik Sunarto di RT.001/RW.005 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok	Warung Bakso Mas Narto	Rabu, 20 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Membuat resapan sendiri agar limbah cair dari dapur tidak langsung dibuang ke drainase kota Memasang penyaring pada bak cucian untuk menghindari cepat penuhnya sumur resapan akibat tercampurnya limbah padat dengan limbah cair Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik
54	Warung Makan Padang Minang milik Mulyadi di Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok	Warung Makan Padang Minang	Rabu, 20 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Mengurus Rekomendasi layak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup pada setiap jam kerja Membuat resapan sehingga limbah cair tidak langsung ke media tanah Tetap memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar usaha
55	Bengkel Motor Kristal milik Jovita Liem berada di Jl.Nenas Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur	Bengkel Motor Kristal	Kamis, 21 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Perlu mengurus Rekomendasi Layak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik

56	Bengkel dan Cuci Motor Mobil Renegade milik Riki berada di Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur	Bengkel dan Cuci Motor Mobil Renegade	Kamis, 21 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Perlu mengurus Rekomendasi Layak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Membuat resapan sehingga limbah cair tidak langsung masuk ke drainase kota dan mengalir ke badan jalan yang dapat menyebabkan licin yang dapat membahayakan pengguna jalan.
57	Warung Makan Soto Sate Sido Maju milik Musoleh berada di Kelurahan Madawat Kecamatan Alok	Warung Makan Soto Sate Sido Maju	Kamis, 21 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Perlu mengurus Rekomendasi Layak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Membuat resapan sendiri agar limbah cair dari dapur tidak langsung dibuang ke drainase kota Memasang penyaring pada bak cucian untuk menghindari penuhnya sumur resapan akibat tercampurnya limbah padat dan limbah cair
58	Warung Bakso Solo Pak Min milik Sadimin berada di Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok	Warung Bakso Solo Pak Min	Kamis, 21 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Perlu mengurus Rekomendasi Layak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik
59	Bengkel motor milik Frengky Irawan berada di Jl. Don Thomas Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur	Bengkel motor	Jumad, 22 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Perlu mengurus Rekomendasi Layak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik
60	Cuci Mobil dan Motor RSV milik Yohanes Mario berada di Jl. Diponegoro Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat	Cuci Mobil dan Motor RSV	Jumad, 22 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Perlu mengurus Rekomendasi Layak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik
61	Cuci Motor Lau-Lau milik Ade Padeng berada di Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok	Cuci Motor Lau-Lau	Jumad, 22 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Perlu mengurus Rekomendasi Layak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik
62	Salon Elisa milik Elisa Nona berada di Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur	Salon Elisa	Jumad, 22 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Perlu mengurus Rekomendasi Layak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik
63	Bengkel Kapten di Kelurahan Kabor Kecamatan Alok	Bengkel Kapten	Senin, 25 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Mengurus Rekomendasi layak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup pada setiap jam kerja Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha
64	Nazif Laundry milik Muhammad Ali berada di Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok	Nazif Laundry	Senin, 25 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Mengurus Rekomendasi layak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup pada setiap jam kerja Membuat resapan sehingga limbah cair tidak langsung masuk ke drainase kota dan mengalir ke badan jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan yang lain

					Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik
65	Salon Rere milik Renil Laga berada di Jl. Kesokuit No. 22 Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur	Salon Rere	Senin, 25 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Mengurus Rekomendasi layak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup pada setiap jam kerja Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik
66	Warung Makan Nano-Nano milik Edy Prayitno berada di Kelurahan Madawat Kecamatan Alok,	Warung Makan Nano-Nano	Senin, 25 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Mengurus Rekomendasi layak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup pada setiap jam kerja Membuat resapan sendiri agar limbah cair dari dapur tidak langsung dibuang ke drainase kota Memasang penyaring pada bak cucian untuk menghindari cepat penuhnya sumur resapan akibat tercampurnya limbah padat dengan limbah cair Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik
67	Bengkel Scorpio milik Frans Noven Seda Segaberada di Jalan Cemara Kelurahan Nangameting Kecamatan Alok Timur	Bengkel Scorpio	Selasa, 26 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Perlu mengurus Rekomendasi Layak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik
68	Bengkel Wolomarang milik Rudy berada di Jl. Diponegoro Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat	Bengkel Wolomarang	Selasa, 26 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Perlu mengurus Rekomendasi Layak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik
69	Salon Kecantikan Iky Salon milik Maria Iky berada di RT.002/RW.004 Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur	Salon Kecantikan Iky	Selasa, 26 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Perlu mengurus Rekomendasi Layak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik
70	Carla Salon milik Sarah Sabuin berada di Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok	Carla Salon	Selasa, 26 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Perlu mengurus Rekomendasi Layak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik Menyarankan untuk membuat resapan agar air limbah cucian tidak dibuang ke media tanah
71	Bengkel Motor Mobil Paladia milik Gaspar Jahong berada di Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok	Bengkel Motor Mobil Paladia	Rabu, 27 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Perlu mengurus Rekomendasi Layak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik

72	Bengkel Berkat Motor Waidoko milik Vinsensius Hengki Manik berada di Jl. Diponegoro Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat	Bengkel Berkat Motor Waidoko	Rabu, 27 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Perlu mengurus Rekomendasi Layak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik
73	Salon Citra milik Novensius Elia berada di Jl. Diponegoro Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok	Salon Citra	Rabu, 27 Agustus 2025	TIDAK TAAT	
74	Salon Yance milik Adriansa Feriyance berada di Jl. Lamantoro RT.006 Kelurahan Nangmeting Kecamatan Alok Timur	Salon Yance	Rabu, 27 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Perlu mengurus Rekomendasi Layak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik
75	Bengkel Motor Mobil Heaven milik Hongdy Santonio berada di Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok	Bengkel Motor Mobil Heaven	Jumad, 29 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Mengurus Rekomendasi layak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup pada setiap jam kerja Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik
76	Bengkel Bengkel Rafa milik Martinus Rivaldo berada di Jl. Nong Meak C1 Kelurahan Kabor Kecamatan Alok	Bengkel Bengkel Rafa	Jumad, 29 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Mengurus Rekomendasi layak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup pada setiap jam kerja Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha
77	Bengkel Viktori Motor milik Evander Kevin berada di Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur	Bengkel Viktori Motor	Jumad, 29 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Mengurus Rekomendasi layak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup pada setiap jam kerja Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha
78	Warung Makan Wawan Lamongan milik Udin berada di RT 002 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok	Warung Makan Wawan Lamongan	Jumad, 29 Agustus 2025	TIDAK TAAT	Mengurus Rekomendasi layak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup pada setiap jam kerja Membuat resapan sehingga limbah cair tidak langsung ke drainase kota Menyediakan filter/penyaring sehingga limbah padat dapat dipisahkan agar resapannya tidak cepat penuh dengan limbah padat Tetap memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar usaha
79	Bengkel Motor Ban milik Inosensius Nong Marsel berada di RT.011/RW.04 Kelurahan Nanglimang Kecamatan Alok	Bengkel Motor Ban	Senin, 01 September 2025	TIDAK TAAT	Perlu mengurus Rekomendasi Layak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik
80	Bengkel Ramayana milik Meliana Go berada di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Nangameting Kecamatan Alok Timur	Bengkel Ramayana	Senin, 01 September 2025	TIDAK TAAT	Perlu mengurus Rekomendasi Layak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik.

81	Bengkel Sigma milik Alfanditanto berada di Jl. Gajahmada No 29 Kelurahan Kabor Kecamatan Alok	Bengkel Sigma	Senin, 01 September 2025	TIDAK TAAT	Perlu mengurus Rekomendasi Layak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Tetap memperhatikan kebersihan sekitar usaha dan tetap menjaga proses pengelolaan lingkungan yang ada dengan baik
82	Salon Sukma milik Sukmawati berada di Jl. Diponegoro Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok	Salon Sukma	Senin, 01 September 2025	TIDAK BEROPERASI	
83	Perataan Lahan di Dusun Pomat Kelurahan Wailiti Kecamatan Alok Barat 2. Waktu	Perataan Lahan di Dusun Pomat	Senin, 29 September 2025	TIDAK TAAT	Tetap menjaga dan melakukan perapian lahan setelah batu besar di bongkar dan diletakan pada bagian sisi utara lahan untuk menghindari banjir pada saat musim penghujan Menjaga vegetasi yang digunakan sebagai pembatas lahan Memperhatikan jarak dari batas lahan pengambilan dengan batas lahan tetangga minimal 1 meter Trap yang dibuat sebanyak 1 trap pada bagian selatan lahan
84	Industri air minum dalam kemasan "MOF" oleh CV. Saputra Jaya Jalan Litbang Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok	Industri air minum dalam kemasan "MOF"	17 November 2025	TIDAK TAAT	Menyarankan untuk berkoordinasi dengan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup untuk proses pengangkutan sampah yang dihasilkan Tetap menjaga kebersihan agar proses produksi tetap terjaga
85	Wisata selam oleh PT. Pesona Teluk Maumere di Jalan Wairhang (Jalan Lingkungan) Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete	Wisata selam oleh PT. Pesona Teluk Maumere	18 November 2025	TIDAK BEROPERASI	Tim akan turun kembali untuk melakukan pengawasan rutin
86	Minimarket Indomaret oleh PT. Indomarco Prismatama/Indomaret di Desa Talibura Kecamatan Talibura	Minimarket Indomaret oleh PT. Indomarco Prismatama	18 November 2025	TAAT	Tetap menjaga kebersihan tempat usaha dan/atau kegiatan Perlu adanya pengaturan taman agar terlihat hijau (tanaman yang sudah ada agar rutin disiram)

Maumere, 31 Desember 2025

Pt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,



Drs. Adeodatus Buang da Cunha
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jend. Sudirman No. 94 Maumere, 86111 Telp. (0382)2400428
Pos Elektronik: dinaslingkunganhidupsikka@gmail.com

JUMLAH PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG TAAT TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2025

N O	KECAMATAN	JUMLAH PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	JENIS USAHA/KEGIATAN							KETERANGAN
			AGRO- INDUSTRI	MANU- FAKTUR	PRA- SARANA	JASA	PERTAM- BANGAN	ENER- GI	MIGAS	
(1)	(2)	(3)	(4)							(5)
1	Nelle	1	1							✓ Penanggungjawab Andhy Baluele ✓ Peternakan babi ✓ SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor: DLH. 660.4/182/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020
2	Alok	1				1				✓ 1 Toko (Indomaret); Memiliki SPPL
3	Alok Timur	7	2			5				✓ 1 Hotel Go : Memiliki UKL/UPL ✓ 1 Rumah Makan Wibowa : Memiliki SPPL ✓ 3 Toko (Indomaret) Memiliki SPPL ✓ - 2 Pabrik Tahu Tempe Putra Fajar ; Memiliki SPPL
4	Alok Barat	4	4							✓ 1 Pengolahan Kulit Sapi (UD Mandiri Barokah) ; Memiliki SPPL ✓ 1 Industri Furniture (PT. Putra Timor Sentosa); Memiliki SPPL Nomor : DLH .660.4/297/X/2020 ✓ 1 Pabrik Tahu Tempe (UD.SIDO); Memiliki SPPL ✓ 1 Pabrik Tahu Tempe (UD. AJN Mas); Memiliki SPPL
5	Talibura	1				1				✓ 1 Minimarket Indomaret (PT. Indomarco Prismatama) ; Memiliki izin Disling.660.4/45/1/2025
JUMLAH		14	7	0	0	7	0	0	0	

Maumere, 13 Februari 2026

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,


Fransiskus Federikus, SP
Pembina
NIP. 19771028 200212 1 009



JUMLAH TARGET TAHUNAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SECARA LANGSUNG
KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2025

N O	KECAMATAN	JUMLAH TARGET PENANGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	JENIS USAHA/KEGIATAN							KET.
			AGROIN DUSTRI	MANUFA KTUR	PRASARANA	JASA	PERTAM BANGAN	ENERGI	MIGAS	
(1)	(2)	(3)	(4)							(5)
1	Alok	27	1		1	25				berizin dan tidak berizin
2	Alok Timur	25	2		2	20	1			berizin dan tidak berizin
3	Alok Barat	18	9		1	6	2			berizin dan tidak berizin
4	Nelle	3	1		1		1			berizin dan tidak berizin
5	Koting	1			1					berizin dan tidak berizin
6	Talibura	2			1	1				berizin dan tidak berizin
7	Waigete	2			1	1				berizin dan tidak berizin
8	Bola	1			1					berizin dan tidak berizin
9	Hewokloang	1			1					berizin dan tidak berizin
10	Nita	1			1					berizin dan tidak berizin
11	Lela	1			1					berizin dan tidak berizin
12	Kewapante	3	1		2					berizin dan tidak berizin
13	Kangae	2	1			1				berizin dan tidak berizin
J U M L A H		87	15	0	14	54	4	0	0	

Maumere, 13 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,



Fransiskus Federikus, SP
Pembina

NIP. 19771028 200212 1 009



RINCIAN JUMLAH PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

YANG TAAT TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP YANG DITERBITKAN OLEH

PEMERINTAH KAB/KOTA

KABUPATEN SIKKA

TAHUN 2025

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha / Kegiatan	Kecamatan	Tanggal Penertiban Izin	Status Ketaatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, Izin PPU					Ket.
					Dokumen Lingkungan	Pengendalian Pencemaran Air (PPA)	Pengendalian Pencemaran Udara (PPU)	Pengelolaan B3	Pengelolaan Sampah Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)
1	Peternakan babi milik Adhy Baluele	Agrobisnis	Nelle	SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor : DLH. 660.4/ 182/ VII/ 2020 tanggal 24 Juli 2020	TAAT	TAAT	TAAT	-	-	
2	Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Koting	Prasarana	Koting	SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor : DLH.660.4/106/III/ 2022, tanggal 28 Maret 2022	TIDAK TAAT	TAAT	TIDAK TAAT	TAAT	TIDAK TAAT	
3	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kopeta	Prasarana	Alok	SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor : DLH.660.4/108/III/202 2, tanggal 29 Maret 2022	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TAAT	
4	Pusat Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Bola	Prasarana	Bola	SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor : Disling.660.4/411/IX/2 023, tanggal 21 September 2023	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	
5	Puskesmas Watubaing	Prasarana	Talibura	SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor isling.660.4/606/XII/20 23, tanggal 1 Desember 2023	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	
6	Toko dan Penginapan TISARI milik Ihsak Djami Bale	Jasa	Alok Barat	SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor : Disling 660.4/40/II/2024	BELUM BEROPE RASI					
7	UPT Puskesmas Hewokloang	Prasarana	Hewokloan g	SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor : Disling 660.4 /146.c/ IV/2024, tanggal 2 April 2024	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	
8	UPT Puskesmas Nelle	Prasarana	Nelle	SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor : Disling 660.4/146.e/IV/2024, tanggal 2 April 2024	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	
9	Pusat Kesehatan Masyarakat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Waigete	Prasarana	Waigete	-	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	
10	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Beru	Prasarana	Alok Timur	-	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	
11	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Wolomarang	Prasarana	Alok Barat	-	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	
12	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Nita	Prasarana	Nita	-	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	

13	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Nanga	Prasarana	Lela	-	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	
14	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kewapante	Prasarana	Kewapante	SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor : DLH.660.4/192/IV/2024, tanggal 8 Mei 2024	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	
15	Rumah Sakit St Gabriel Kewapante	Prasarana	Kewapante	-	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TAAT	
16	Hotel Lokaria Indah	Jasa	Kangae	UPL Rekomendasi Lingkungan Nomor : DLH.660.4/62/II/2019, Tanggal 20 Februari 2019	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TAAT	
17	Hotel Eltari Indah	Jasa	Kangae	-	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TIDAK TAAT	TAAT	
18	Hotel Silvia	Jasa	Alok	UKL-UPL	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
19	Hotel Go	Jasa	Alok Timur	UKL-UPL Tanggal 10 Januari 2014	TAAT	-	-	-	-	
20	Pabrik Tahu Tempe Bintang Jaya	Agroindustri	Kangae	SPPL - 22 Maret 2017	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
21	Peternakan ayam pedaging milik Kris Ware	Agroindustri	Alok Barat	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
22	Pabrik Tahu Super Jaya milik Budi Nuryanto	Agroindustri	Alok Barat	SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor : DLH.660.4/262/I/2022, tanggal 28 Januari 2022	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
23	Warung Makan Dapur Sambal	Jasa	Alok	SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor : DLH.660.4/262/I/2024, tanggal 28 Januari 2022	TIDAK TAAT	-	-	-	-	-
24	Warung Makan Ikan Bakar Suroboyo	Jasa	Alok	SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor : DLH.660.4/246/IX/2019, tanggal 19 September 2019	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
25	Pabrik Pengolahan Ikan CV. Biru Laut	Agroindustri	Alok Barat	SPPL	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
26	Pengolahan Ikan CV. Citra Bajo Sejahtera	Agroindustri	Alok Barat	SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor : DLH.660.4/490/XII/2022, tanggal 22 desember 2022	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
27	Warung Makan Podoroso milik Wibowo	Jasa	Alok Timur	SPPL	TAAT	-	-	-	-	
28	Warung Bakso King milik Gunawan	Jasa	Alok	–	TAAT	-	-	-	-	
29	Peternakan ayam pedaging milik Yosefus Oskarito	Agroindustri	Alok Barat	SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor : DLH.660.4/486/XII/2022, Tanggal : 20 Desember 2022	TAAT	-	-	-	-	
30	Warung Makan Angkringan Lestari	Jasa	Alok	–	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
31	Perumahan Alok Indah 2	Prasarana	Alok Timur	SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor : DLH.660.4/223.b/VI2024	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
32	Indomaret Moa Toda	Jasa	Alok Timur	SPPL	TAAT	-	-	-	-	
33	Indomaret Anggrek	Jasa	Alok	SPPL	TAAT	-	-	-	-	-
34	Pabrik Tahu Tempe “Qonita”	Agroindustri	Kewapante	SPPL	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
35	Pengolahan Kulit Sapi oleh UD. Mandiri Barokah	Agroindustri	Alok Barat	SPPL	TAAT	-	-	-	-	
36	Industri Furniture oleh PT. Putra Timor Sentosa	Manufaktur	Alok Barat	SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor : DLH.660.4/297/XI2020	TAAT	-	-	-	-	
37	Alfamart Wairotang	Jasa	Alok Barat	SPPL	TAAT	-	-	-	-	

38	Warung Makan Nano Nano	Jasa	Alok Timur	SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor : DLH.660.4/232/IXI2019	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
39	Rumah Makan Lamongan	Jasa	Alok Timur	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
40	Warung Makan Bakso King berada di Kelurahan Wairotang Kec. Alok Timur	Jasa	Alok Timur	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
41	Tahu Tempe Putra Fajar	Agrobisnis	Alok Timur	SPPL Tanggal : 7 November 2016	TAAT	-	-	-	-	
42	Pengolahan Tahu milik Hermin Tanlu Pali Padang	Agrobisnis	Alok Timur	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
43	Pabrik Tahu Tempe UD Sido Moro	Agrobisnis	Alok Barat	SPPL – 21 Maret 2017	TAAT	-	-	-	-	
44	Pabrik Tahu Tempe UD AJN Mas	Agrobisnis	Alok Barat	SPPL - 18 April 2017	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
45	Pertambangan	Pertambangan	Nelle	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
46	Pertambangan	Pertambangan	Alo Timur	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
47	Laundry Arema milik Suharni	Jasa	Alok	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
48	Mixue Ice Cream milik Novita	Agrobisnis	Alok Timur	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
49	Perataan Lahan oleh PT Prima Subur	Pertambangan	Alok Barat	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
50	Salon Merlin	Jasa	Alok Barat	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
51	Salon Cika milik Angel	Jasa	Alok Barat	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
52	Tiara Barbershop	Jasa	Alok Timur	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
53	Warung Bakso Mas Narto milik Sunarto	Jasa	Alok	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
54	Warung Makan Padang Minang milik Mulyadi	Jasa	Alok	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
55	Bengkel Motor Kristal milik Jovita Liem	Jasa	Alok Timur	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
56	Bengkel dan Cuci Motor Mobil Renegade milik Riki	Jasa	Alok	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
57	Warung Makan Soto Sate Sido Maju milik Musoleh	Jasa	Alok	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
58	Warung Bakso Solo Pak Min milik Sadimin	Jasa	Alok	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
59	Bengkel motor milik Frengky Irawan	Jasa	Alok Timur	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
60	Cuci Mobil dan Motor RSV milik Yohanes Mario	Jasa	Alok Barat	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
61	Cuci Motor Lau-Lau milik Ade Padang	Jasa	Alok	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
62	Salon Elisa milik Elisa Nona	Jasa	Alok Timur	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
63	Bengkel Kapten	Jasa	Alok	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
64	Nazif Laundry milik Muhammad Ali	Jasa	Alok	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
65	Salon Rere milik Renil Laga	Jasa	Alok Timur	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
66	Warung Makan Nano-Nano milik Edy Prayitno	Jasa	Alok	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
67	Bengkel Scorpio milik Frans Noven Seda Segi	Jasa	Alok Timur	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
68	Bengkel Wolomarang milik Rudy	Jasa	Alok Barat	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
69	Salon Kecantikan lky Salon milik Maria lky	Jasa	Alok	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	

70	Carla Salon milik Sarah Sabuin	Jasa	Alok	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
71	Bengkel Motor Mobil Paladia milik Gaspar Jahong	Jasa	Alok	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
72	Bengkel Berkat Motor Waidoko milik Vinsensius Hengki Manik	Jasa	Alok Barat	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
73	Salon Citra milik Novensius Elia	Jasa	Alok	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
74	Salon Yance milik Adriansa Feriyance	Jasa	Alok Timur	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
75	Bengkel Motor Mobil Heaven milik Hongdy Santonio	Jasa	Alok	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
76	Bengkel Bengkel Rafa milik Martinus Rivaldo	Jasa	Alok	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
77	Bengkel Viktori Motor milik Evander Kevin	Jasa	Alok Timur	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
78	Warung Makan Wawan Lamongan milik Udin	Jasa	Alok	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
79	Bengkel Motor Ban milik Inosensius Nong Marsel	Jasa	Alok	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
80	Bengkel Ramayana milik Meliana Go	Jasa	Alok Timur	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
81	Bengkel Sigma milik Alfanditanto	Jasa	Alok	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
82	Salon Sukma milik Sukmawati	Jasa	Alok	-	TIDAK BEROPE RASI	-	-	-	-	
83	Perataan Lahan	Pertambangan	Alok Barat	-	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
84	Industri air minum dalam kemasan “MOF” oleh CV. Saputra Jaya	Agroindustri	Alok	SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor : DLH.660.4/134//VI/12 025	TIDAK TAAT	-	-	-	-	
85	Wisata selam oleh PT. Pesona Teluk Maumere	Jasa	Waigete	SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor : DLH.660.4/31/II2025	TIDAK BEROPE RASI	-	-	-	-	
86	Minimarket Indomaret oleh PT. Indomarco Prismatama/ Indomaret	Jasa	Talibura	SPPL Rekomendasi Lingkungan Nomor : DLH.660.4/45/I/2025	TAAT	-	-	-	-	

Maumere, 13 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,


Fransiskus Federikus, SP
Pembina
NIP. 19771028 200212 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jend. Sudirman No. 94 Maumere, 86111 Telp. (0382)2400428
Pos Elektronik: dinaslingkunganhidupsikka@gmail.com

JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT, PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DI
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH REDUCE, REUSE,
RECYCLE, PUSAT DAUR ULANG, TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU, STASIUN
PERALIHAN ANTARA, PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI SAMPAH/ PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA SAMPAH, REFUSE DERIVED FUEL, PUSAT PENGOMPOSAN, BIODIGESTER,
BANK SAMPAH DAN FASILITAS LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN
DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/ TEMPAT
PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU KABUPATEN/KOTA ATAU TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR/ TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL DI WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Timbulan Sampah Berdasarkan Tahapan Penanganan Sampah				Total Timbulan sampah (ton/ Tahun)
			Pengangkutan (Ton/ Tahun)	Pemilahan (Ton/Tahun)	Pengolahan (Ton/Tahun)	Pemrosesan Akhir (Ton/Tahun)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Alok	33,163	3.962,80	1.095,00	48,00	2.819,80	4.841,80
2	Alok Barat	24,793	1.888,39	127,75	24,00	1.736,64	3.619,78
3	Alok Timur	34,788	4.038,00	1,45		4.036,55	5.079,05
4	Kewapante	15,746	1,68			1,68	2.298,92
5	Kangae	19,688	1,32		24,00	1,32	2.874,45
Jumlah		128,178	9.892,19	1.224,20	96,00	8.595,99	18.713,99

Maumere, 13 Februari 2026

Pt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,



Fransiskus Federikus, SP
Pembina

NIP. 19771028 200212 1 009



JUMLAH SELURUH TIMBUNAN SAMPAH DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN SIKKA

TAHUN 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Seluruh Timbunan Sampah Diwilayah Kecamatan (Ton / Tahun)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Alok	33.163	4.841,80	
2	Alok Barat	24.793	3.619,78	
3	Alok Timur	34.788	5.079,05	
4	Paga	17.722	2.587,41	
5	Mego	14.556	2.125,18	
6	Lela	12.170	1.776,82	
7	Nita	23.689	3.458,59	
8	Palue	10.373	1.514,46	
9	Nelle	6.442	940,53	
10	Talibura	25.555	3.731,03	
11	Waigete	27.757	4.052,52	
12	Kewapante	15.746	2.298,92	
13	Bola	11.148	1.627,61	
14	Magepanda	14.795	2.160,07	
15	Waiblama	9.024	1.317,50	
16	Koting	6.781	990,03	
17	Tana Wawo	9.918	1.448,03	
18	Hewokloang	10.016	1.462,34	
19	Kangae	19.688	2.874,45	
20	Doreng	12.915	1.885,59	
21	Mapitara	7.482	1.092,37	
J U M L A H		348.521	50.884,07	

Maumere, 13 Februari 2026

Pdt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,


Fransiskus Federikus, SP
Pembina
NIP. 19771028 200212 1 009